

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI INDONESIA PERIODE 2000-2022**

(Disertasi)

Oleh

Nama : Ukhti Ciptawaty
NPM : 2331041010



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2000-2022

Oleh

UKHTI CIPTAWATY

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang dengan persentase 8,47% dari total populasi. Rendahnya standar kemiskinan di Indonesia menuntut pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui program bantuan non-tunai dan tunai. Disertasi bertujuan untuk menganalisis pengaruh program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada aspek pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin di Indonesia selama dua dekade terakhir (2000–2022). Penelitian menggunakan pendekatan *Threshold Model Least*. Penelitian mencakup 34 provinsi dengan data sekunder dari BPS dan sumber resmi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan analisis pengaruh BPNT dan PKH terhadap pendapatan dan pengeluaran. Perbedaan menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikansi pengaruh antar provinsi. Pada Kuadran I, terdapat 6 provinsi yang memiliki pengaruh positif dari kedua program dalam aspek pendapatan, yakni Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Gorontalo, sedangkan di aspek pengeluaran terdapat 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kuadran II berisi 10 provinsi dengan BPNT berpengaruh pada pendapatan tetapi PKH tidak berpengaruh, termasuk Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Bali, sementara di sisi pengeluaran ada 2 provinsi, yaitu Riau dan Sulawesi Selatan. Kuadran III terdiri dari 4 provinsi yang menunjukkan pengaruh PKH pada pendapatan tanpa didukung BPNT, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Terakhir, Kuadran IV mencakup 20 provinsi di mana kedua program tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, termasuk Aceh, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada aspek pengeluaran terdapat 26 provinsi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh BPNT dan PKH. Beberapa provinsi merasakan efek positif kedua program namun banyak wilayah lain belum merasakan dampak signifikan sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan agar manfaat bantuan sosial dapat dirasakan lebih optimal dalam pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Kemiskinan, *Threshold*, BPNT, PKH.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS IN INDONESIA PERIOD 2000 - 2022

By

UKHTI CIPTAWATY

One indicator of government success is a decline in the number of people living in poverty. According to the latest data from the Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik/BPS) in March 2025, the number of poor people in Indonesia reached 23.85 million, representing 8.47% of the total population. The low poverty line in Indonesia demands that the government continue to improve equitable welfare through non-cash and cash assistance programs. This dissertation aims to analyze the influence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) and the Family Hope Program (PKH) on the income and expenditure aspects of the poor population in Indonesia over the last two decades (2000–2022). The study uses a Threshold Model Least approach and covers 34 provinces with secondary data from BPS and other official sources.

The results show significant variation in the impact of BPNT and PKH on income and expenditure among provinces. In Quadrant 1, six provinces showed a positive influence from both programs on income, including Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua, and Gorontalo; and four provinces showed the same on expenditure: Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, and Sulawesi Tenggara. Quadrant 2 contains ten provinces where BPNT influences income, but PKH does not, such as Sumatera Barat, Jawa Barat, and Bali, while Riau and Sulawesi Selatan show influence on expenditure. Quadrant 3 consists of four provinces showing PKH impacting income without BPNT influence, like Kepulauan Bangka Belitung and DKI Jakarta. Lastly, Quadrant 4 comprises 20 provinces where neither program influences income significantly, including Aceh, Jawa Tengah, and Kalimantan Timur. On the side of expenditure 26 provinces are neither influenced by BPNT nor PKH.

This analysis highlights that while BPNT and KPM have positive effects in some regions, many areas have not yet felt significant impacts, indicating the need for policy adjustments and strengthening, especially in provinces within Quadrant 4, to ensure these social assistance programs maximize their effectiveness in reducing poverty across Indonesia.

Keywords: Poverty, Threshold, BPNT, PKH.

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
INDONESIA PERIODE 2000-2022**

Oleh

UKHTI CIPTAWATY

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
DOKTOR ILMU EKONOMI

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

Judul Disertasi

**: EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 2000-
2022**

Nama Mahasiswa

: Ukhti Ciptawaty

No. Pokok Mahasiswa : 2331041010

Program Studi

: Doktor Ilmu Ekonomi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI,

Tim Promotor,

Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.
NIP.195907191987031002

Promotor

[Signature]
(.....)

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621199003 1 003

Co-Promotor

[Signature]
(.....)

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

[Signature]
Prof. Yuliansyah, M.S.A., Ph.D., Akt., CA.
NIP 19730723 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Sistem Informasi)

(.....)

Sekretaris : Prof. Yuliansyah, SE., M.SA., Ph.D., Akt. (.....)
(Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

Promotor : Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si

(.....)

Co – Promotor : Prof. Dr. Nairobi, S.E, M.Si

(.....)

Penguji Luar Komisi:

1. Prof. Dr. Ernie Hendrawaty S.E., M.Si.
(Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
FEB Universitas Lampung)
2. Prof. Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si
(Penguji Eksternal Universitas Bangka Belitung)
3. Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M
(Penguji Internal Universitas Lampung)
4. Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.
(Penguji Internal FEB Universitas Lampung)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

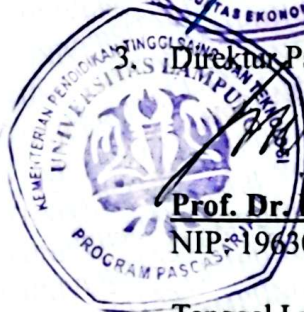
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bisnis
Universitas Lampung,

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003.



3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung,

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP. 19630101 198903 1 003



Tanggal Lulus Ujian Disertasi: 10 Februari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ukhti Ciptawaty

NPM : 2331041010

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026



Ukhti Ciptawaty

RIWAYAT HIDUP



Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si. lahir di Tanjungkarang pada 17 Mei 1985 dan berkarier sebagai dosen tetap di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Pendidikan Sarjana Ekonomi ditempuh di Universitas Lampung (2003–2007), kemudian dilanjutkan dengan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Sriwijaya (2012–

2015). Sejak tahun 2023, penulis meraih beasiswa dari Program Beasiswa Pendidikan Indonesia dan melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung dengan disertasi berjudul “Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Periode 2000-2022” di bawah bimbingan Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si dan Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

Sejak 2007 penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan secara konsisten. Kajian ilmiah penulis tercermin dari produktivitas publikasi dalam lima tahun terakhir, baik di jurnal internasional bereputasi maupun prosiding dan jurnal nasional. Tema penelitian yang dilaksanakan cukup beragam namun berakar pada ekonomi pembangunan, antara lain efektivitas program penanggulangan kemiskinan, dinamika ketimpangan dan kemiskinan di Sumatra, transmisi kebijakan moneter, keuangan daerah, serta hubungan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kualitas lingkungan. Selain publikasi, penulis aktif dalam berbagai penelitian kompetitif yang berfokus pada pemodelan pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural, kemiskinan, serta analisis spasial pembangunan wilayah. Di bidang pengabdian kepada masyarakat, penulis berperan dalam pendampingan dan pelatihan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perencanaan usaha pertanian, pemberdayaan bank sampah, serta peningkatan produktivitas BUMDes. Perjalanan akademik penulis berkonsentrasi pada isu kemiskinan, ketimpangan, keuangan publik, serta pengembangan kelembagaan desa.

MOTTO

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Q.S. Tāhā : 114).

Ayat ini mencerminkan kerendahan hati seorang penuntut ilmu, dorongan untuk terus belajar sepanjang hayat, dan relevan dengan peran Penulis sebagai akademisi yang mengembangkan ilmu pengetahuan.

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (Q.S. Al-Mujādalah : 11)

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan sejati lahir dari iman dan ilmu. Iman menjadi dasar semua amal, sedangkan ilmu mengangkat derajat seorang hamba karena dengan ilmu ia mampu memahami kebenaran dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

“Aku mendefinisikan diri dengan keberanian dan keyakinan.”

(Ukhti Ciptawaty, 2026)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada keluarga tercinta. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada suami tercinta yang senantiasa mendampingi dengan doa, kesabaran, dukungan moral, dan pengorbanan waktu, sehingga saya mampu melewati setiap fase studi ini dengan lebih kuat dan tegar. Kepada anak-anak tersayang, terima kasih atas pengertian, keceriaan, dan keikhlasan kalian menerima keterbatasan waktu Amih; semoga ketekunan dan kerja keras ini dapat menjadi teladan bagi perjalanan hidup dan pendidikan kalian di masa depan.

(Apih Bembeng, Kakak Adeeva dan Adek Al Fatih)

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada orang tua dan saudara tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan, menyemangati, dan memotivasi untuk menyelesaikan perjalanan belajar ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman atas dukungan, perhatian, dan bantuan dalam berbagai bentuk, yang membuat saya tidak pernah merasa berjalan sendirian.

Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia yang telah memfasilitasi pembiayaan studi, sehingga penyelesaian disertasi ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi institusi serta masyarakat luas.

Serta

Almamater tercinta

Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam, serta menyadarkan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis masih sangat terbatas. Penulisan disertasi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun dengan adanya bimbingan, dukungan serta saran dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga berperan sebagai Co-Promotor yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan disertasi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si., selaku Promotor, atas motivasi yang luar biasa, dukungan dan saran, serta waktu yang luar biasa dan tak kenal lelah sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.
3. Bapak Prof Yuliansyah, PhD., Akt. CA., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga sekaligus sebagai dosen pembahas internal yang senantiasa menjadi sumber solusi atas hambatan dan kesulitan dalam perjalanan akademis ini.
4. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing akademik ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang senantiasa memberikan dukungan dan tempat mengobrol atas cerita dan perjalanan selama kuliah.
5. Ibu Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M, selaku selaku dosen pembahas atas kesediaan waktu memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh ide-ide

baru bagi penyelesaian disertasi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., Ibu Prof. Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., dan Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas internal yang senantiasa memberikan ide perubahan yang lebih baik untuk disertasi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si selaku dosen pembahas eksternal yang senantiasa memudahkan dan mendukung penyelesaian disertasi ini.
8. Ibu Dr. Arivina Ratih selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, FEB Unila yang senantiasa memberikan dukungan atas keputusan dan langkah akademis ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan secara khusus dosen Prodi Doktor Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat serta mendampingi dan membantu penulis selama belajar di fakultas ekonomi dan bisnis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang senantiasa menjadi sumber inspirasi.
12. Prof Mustofa, Prof Sutopo dan Prof. Toto Gunarto yang senantiasa memberikan dukungan sepanjang proses penyelesaian studi ini.
13. Suami dan kedua anak saya yang menjadi semangat utama dalam menyelesaikan studi.
14. Kedua orang tua saya, saudara dan anggota keluarga lainnya yang selalu menyertai serta memberikan doa dan dukungan, serta kasih sayang yang terbaik kepada penulis. Terima kasih untuk semua doa serta dukungannya dan kebersamaannya selama ini.
15. Sahabat-sahabat satu diskusi dan perjuangan, Achmad Dhea, Edwin, dan Rudy. Terima kasih atas support dan ide-ide di luar kepalanya.
16. Sahabat-sahabat satu angkatan PDIE 2023 dan angkatan lainnya. Terima kasih atas semua bantuan dan semangat yang kalian berikan dalam proses perkuliahan dan penyelesaian disertasi ini.

17. Sahabat dari Jurusan; Bu Dr. Neli, Pak Didi, Bu Resha, Bu Vitri, Pak Arif.
Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan pendampingan kalian selama ini.
18. Sahabat dari alumni EP 2003; Mimi, Ani, Ujang dan dkk yang selalu bersemangat mendengarkan cerita perjalanan ini.
19. Almamater yang kebanggakan, Universitas Lampung.
20. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan disertasi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
21. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai saat ini banyak sekali tantangan dan juga cobaan yang telah dilalui semoga ke depannya menjadi lebih baik lagi.
22. Akhir kata, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga disertasi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Terima Kasih.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026
Penulis

Ukhti Ciptawaty

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	29
1.3 Pertanyaan Penelitian	31
1.4 Tujuan Penelitian.....	31
1.5 Keaslian Penelitian.....	32
1.6 Kebaruan Penelitian	44
 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
PERUMUSAN HIPOTESIS.....	49
2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	49
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	49
2.1.2 PDRB Per kapita	51
2.1.3 Teori Pertumbuhan Neoklasik	51
2.1.4 Teori Pertumbuhan Keynes	53
2.2 Teori Inflasi	54
2.3 Konsep Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).....	56
2.4 Teori Kemiskinan.....	59
2.4.1 Teori Kemiskinan oleh Nurske	59
2.4.2 Teori Kemiskinan oleh Myrdal.....	60
2.4.3 Teori Kemiskinan oleh David Ricardo; Kemiskinan Absolut dan Relatif.....	61
2.4.4 Teori Pengembangan oleh Barrett, Carter, dan Ikegami (BCI) (2007).....	61
2.5 Konsep Kemiskinan	61
2.5.1 Jenis Kemiskinan	62
2.5.2 Penyebab Kemiskinan.....	62
2.6 Pengentasan Kemiskinan.....	64
2.6.1 Indikator Kemiskinan	65
2.6.2 Teori Kebijakan Publik.....	67
2.6.3 Kerangka Kerja Kebijakan Publik	69

2.6.4 Teori Pilihan Rasional Publik	70
2.6.5 Teori Institusi Publik	71
2.6.6 Theory of State Capacity	72
2.6.7 Kebijakan Kesejahteraan Sosial.....	74
2.7 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.....	75
2.7.1 Sejarah Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia	76
2.7.2 Kebijakan Pemerintah dalam Intervensi Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).....	80
2.7.3 Kebijakan Pemerintah dalam Intervensi Kemiskinan Melalui Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT)	83
2.8 Kerangka Pemikiran	85
2.9 Pengembangan Hipotesis Berdasarkan Telaah Teoritis Penelitian Terdahulu	89
BAB III METODE PENELITIAN	91
3.1 Desain Penelitian.....	91
3.2 Objek Data.....	92
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	92
3.3.1 Variabel Penelitian.....	92
3.3.2 Definisi Operasional Variabel	95
3.4 Model Statistik Penelitian	100
3.4.1 Uji Stasioner	100
3.4.2 Pemodelan Kemiskinan dengan Regresi Threshold Effect Model	101
3.5 Rekomendasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pohon Faktor	108
3.5.1 Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (Pohon faktor kinerja) Instansi Pemerintah Sebagai Strategi Dasar Usaha Penanggulangan Kemiskinan	108
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN.....	112
4.1 Analisis Uji Model Threshold; Uji Stationer	112
4.2 Analisis Hasil Regresi Ambang Batas (Threshold) Pada 34 Provinsi di Indonesia	112
4.2.1 Hasil Interval Nilai Minimum Dan Maksimum Pada Pengaruh Variabel BPNT Dan PKH Terhadap Aspek Pendapatan Dan Pengeluaran.....	125
4.3 Hasil Pembahasan Pengaruh BPNT Terhadap Aspek Pendapatan	136
4.4 Hasil Pembahasan Pengaruh PKH Terhadap Aspek Pendapatan.....	148
4.4.1 Pengaruh PKH Secara Signifikan Namun Tidak Maksimal Terhadap Aspek Pendapatan.....	148
4.4.2 Pengaruh PKH Secara Signifikan Dan Maksimal Terhadap Aspek Pendapatan.....	153
4.5 Hasil Pembahasan Pengaruh BPNT Terhadap Aspek Pengeluaran	155
4.5.1 Hasil Sebaran Kebijakan BPNT Yang Signifikan Namun Tidak Maksimal Terhadap Aspek Pengeluaran	155
4.6 Hasil Pembahasan Pengaruh PKH Terhadap Aspek Pengeluaran	159
4.6.1 Pengaruh PKH Secara Signifikan Namun Tidak Maksimal Terhadap Aspek Pengeluaran	159

4.7	Hasil Kuadran BPNT dan PKH pada 34 Provinsi.....	163
4.7.1	Hasil Klasifikasi Pengaruh BPNT dan PKH pada 34 Provinsi Kuadran I	173
4.7.2	Hasil Klasifikasi Pengaruh BPNT dan PKH pada 34 Provinsi Kuadran II	173
4.7.3	Hasil Klasifikasi Pengaruh BPNT dan KPM pada 34 Provinsi Kuadran III.....	177
4.7.4	Hasil Klasifikasi Pengaruh BPNT dan PKH pada 34 Provinsi Kuadran IV	182
4.8	Hasil Pembahasan Wilayah Non-Threshold.....	188
4.8.1	Wilayah Non-Threshold BPNT dan PKH Pada Aspek Pendapatan	189
4.8.2	Provinsi Non-Threshold BPNT dan PKH Pada Aspek Pengeluaran.....	190
BAB V KESIMPULAN.....		192
5.1	Kesimpulan.....	192
5.2	Pengembangan Penelitian Masa Depan	193
5.3	Saran dan Rekomendasi Kebijakan.....	194
DAFTAR PUSTAKA		197
LAMPIRAN		0

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	95
Tabel 4.1. Nilai Koefisien, nilai ambang dan f- statistik Pada 34 Provinsi di Indonesia.....	113
Tabel 4.2. Klasifikasi Nilai Interval BPNT Aspek Pendapatan (%)	125
Tabel 4.3. Provinsi, Kategori, Koefisien dan Klasifikasi Interval BPNT Terhadap Aspek Pendapatan (%)	126
Tabel 4.4. Klasifikasi Nilai Interval PKH Aspek Pendapatan (%)	129
Tabel 4.5. Provinsi, Kategori, Koefisien dan Klasifikasi Interval Aspek PKH Terhadap Pendapatan (%).....	130
Tabel 4.6. Klasifikasi Nilai Interval BPNT Aspek Pengeluaran (%).....	132
Tabel 4.7. Provinsi, Kategori, Koefisien dan Klasifikasi Interval Aspek BPNT Terhadap Pengeluaran (%)	133
Tabel 4.8. Klasifikasi Nilai Interval PKH Aspek Pengeluaran (%).....	134
Tabel 4.9. Provinsi, Kategori, Koefisien dan Klasifikasi Interval sisi KPM terhadap Pengeluaran (%).....	135
Tabel 4.10. Spesifikasi Pembagian Kuadran BPNT dan PKH.....	163
Tabel 4.11. Kuadran Pengaruh BPNT dan KPM Pada Aspek Pendapatan.....	164
Tabel 4.12. Kuadran Pengaruh BPNT dan PKH Pada Aspek Pengeluaran	168
Tabel 4.13. Komponen, Strategi, Program Kerja Dan Instansi Terkait Wilayah Perkotaan Dengan Tingkat Kemiskinan Relatif Tinggi.....	177
Tabel 4.14. Komponen, Strategi, Program Kerja Dan Instansi Terkait Wilayah Ketergantungan Tinggi Pada Sektor Pertanian Dan Perkebunan Tradisional	181

Tabel 4.15. Komponen, Strategi, Program Kerja Dan Instansi Terkait Indeks Pembangunan Manusia.....	185
Tabel 4.16. Daftar Nama Provinsi Non-Threshold BPNT dan PKH	188

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Rata-rata Persentase Penduduk Miskin 34 Provinsi di Indonesia	17
Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010, di 34 Provinsi Di Indonesia	18
Gambar 1.3. Laju Inflasi inti/umum Y-O-Y, di 34 Provinsi Di Indonesia	19
Gambar 1.4. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan daerah, di 34 Provinsi Di Indonesia	21
Gambar 1.5. Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Penerima BPNT Penduduk Miskin 34 Provinsi Di Indonesia	26
Gambar 1.6. Rata-Rata Jumlah KPM Keluarga Penerima Bantuan Pada 34 Provinsi Di Indonesia.....	27
Gambar 2.1. Tahapan Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty).	64
Gambar 2.2. Tahapan Kebijakan Kemiskinan	68
Gambar 2.3. Framework for Organizotional Assesment	73
Gambar 2.4. Kerangka Alur Pemikiran.....	85
Gambar 3.1. Tahap Alur Regresi Treshold Model Bantuan Sosial.....	92
Gambar 3.2. Nilai Ambang Titik Minimal Threshold	104
Gambar 3.3. Nilai Ambang Titik Tengah dan Optimal Threshold	105
Gambar 3.4. Nilai Arg Min 1 dan Arg Max 2 Threshold	106
Gambar 3.5. Kerangka Dasar Pohon faktor kinerja Penjejang Kinerja PANRB No. 89 Tahun 2021	109
Gambar 4.1. Kuadran Signifikasi Pengaruh BPNT dan PKH Aspek Pendapatan.....	165
Gambar 4.2. Kuadran Signifikasi Pengaruh BPNT dan PKH Aspek Pengeluaran.....	169

Gambar 4.3. Kerangka Dasar Pohon faktor kinerja Penjejangan Kinerja Untuk Wilayah Perkotaan Dengan Tingkat Kemiskinan Relatif Tinggi	175
Gambar 4.4. Kerangka Dasar Pohon faktor kinerja Penjejangan Kinerja Untuk Wilayah Ketergantungan Tinggi Pada Sektor Pertanian	180
Gambar 4.5. Kerangka Dasar Pohon faktor kinerja Penjejangan Kinerja Untuk Wilayah Kemiskinan Struktural.....	184

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data Variabel Garis Kemiskinan, Pendapatan Penduduk Miskin, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, BPNT Dan PKH	L-1
Lampiran 2. Hasil Pengujian Stasioner	L-18
Lampiran 3. Hasil Perhitungan Model Regresi Threshold Variabel Terikat: PPKM (Aspek Pendapatan)	L-53
Lampiran 4. Hasil Perhitungan Model Regresi Threshold dengan Variabel Terikat Garis Kemiskinan (Aspek Pengeluaran)	L-159

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang telah ada sejak lama. Amartya Sen menekankan bahwa kemiskinan terkait dengan distribusi pendapatan individu yang berada di bawah garis standar kehidupan layak (Sen Amartya, 1976). Kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya pendapatan sehingga pemenuhan kebutuhan dasar menjadi sulit bagi masyarakat miskin. Masalah kemiskinan kompleks dan penanggulangannya memerlukan solusi dan strategi yang tepat serta berkelanjutan (Ikejiaku, 2009). Ozughalu (2016) mengatakan bahwa kemiskinan menjadi tantangan bagi suatu negara dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu negara (Kuncoro, 2015).

Kemiskinan merupakan tantangan semua pihak baik individu, swasta, pemerintah, maupun masyarakat internasional (Chifon, 2010). Kemiskinan mengacu pada tidak tercapainya berbagai atribut kesejahteraan, baik yang berhubungan dengan pendapatan maupun non-pendapatan, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan status gizi anak (Bourguignon, 1999). Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, psikologi, dan politik. Kemiskinan tampak pada keterbatasan kepemilikan alat produksi, upah rendah, daya tawar lemah, minimnya tabungan, serta ketidakmampuan bersaing secara ekonomi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai miskin (Astiyanti, 2017). Sen (1976) mengemukakan bahwa Konsep kemiskinan tidak hanya terkait dengan pendapatan, melainkan terdiri atas berbagai dimensi yang membentuk pemahaman keseluruhannya. Seseorang tidak hanya dianggap miskin karena pendapatan yang tidak cukup memenuhi kebutuhan tetapi juga

karena kurangnya peluang untuk keluar dari kemiskinan. Peluang keluar dari kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang menurunkan kesempatan mereka memperbaiki kondisi hidupnya.

Pendapat lain mengenai kemiskinan dinyatakan oleh Riedel dan Sachs (2005) Kemiskinan ditandai oleh hilangnya berbagai bentuk modal penting, seperti human capital berupa kesehatan, pendidikan, dan nutrisi yang baik; business capital; infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, perlindungan lingkungan, serta sarana publik lainnya; natural capital; public institutional capital yang mencakup administrasi publik yang baik, sistem pengadilan bersih, dan polisi efektif; serta *knowledge capital* atau modal ilmu pengetahuan. Kondisi ini terlihat jelas di Indonesia sebagai negara berpenghasilan rendah yang juga menghadapi masalah kemiskinan serupa dengan negara berkembang lainnya, yang dipicu oleh beberapa faktor utama.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kemiskinan telah memberikan kontribusi yang signifikan atas konsep kemiskinan, baik yang dilihat melalui aksioma proposisi dasar (*Monotonicity Axiom*), *Transfer Axiom*, *Sensitivity Transfer Axiom* maupun *Sub-group Monotonicity Axiom*. Fields (2019), Sen Amartya (1976), Thorbecke et al. (1984), Bourguignon (1999), Tsui (2002), Sen (2014) menjadi landasan dasar dan selanjutnya menjadi pengembangan pembahasan kebijakan kemiskinan. Aksioma kemiskinan sering kali dianggap sebagai salah satu dari empat aksioma yang mendasari teori kemiskinan. Aksioma kemiskinan merupakan konsep yang menekankan bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan melalui peningkatan pendapatan individu atau keluarga tetapi harus diatasi melalui perubahan struktural yang lebih luas dalam masyarakat. Aksioma berargumen bahwa kemiskinan bukanlah masalah individu atau keluarga. Kemiskinan dianggap masalah struktural yang berasal dari ketidakadilan ekonomi dan sosial oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan harus berfokus pada penyebab kemiskinan. Beberapa penyebab ketidakadilan dalam konsep kemiskinan antara lain tidak meratanya distribusi kekayaan, kesenjangan pendidikan, dan tidak meratanya akses sumber daya ekonomi (Ginting et al,

2010).

Hubungan antara aksioma pada kemiskinan pernah diteliti oleh Sir Author Bowley (Northampton et al, 2016). Sir Arthur Bowley adalah pelopor dalam pengukuran kemiskinan di Inggris. Bowley pada buku pertamanya berjudul *Livelihood and Poverty* (1915) mempelajari insiden kemiskinan di lima kota di Inggris. Buku tersebut membahas bagaimana pemerintah Amerika Serikat memperkirakan bahwa 14,4 persen populasi berada dalam kemiskinan pada tahun 1984, dibandingkan dengan 11,2 persen (Northampton, 2016). Negara Amerika dan Inggris sering dianggap negara adidaya namun kemiskinan tetap ada. Tingkat kemiskinan meningkat secara signifikan pada tahun 2022. Sekitar 15,3 juta orang Amerika hidup dalam kondisi miskin dan anak-anak yang paling terdampak. Peningkatan kemiskinan disebabkan oleh berakhirnya program bantuan seperti Kredit Pajak Anak yang sebelumnya membantu mengurangi angka kemiskinan. Program bantuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan fiskal negara tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kenyataan di kedua negara tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukan semata-mata masalah ekonomi melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan sosial dan akses terhadap sumber daya. Kemiskinan dipahami sebagai fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik.

Kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan sesuai Peraturan Presiden tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah yang memerlukan integrasi dan sinergi antarkedua tingkatan tersebut. Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 sebagai landasan program menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Salah satu kelemahan pelaksanaan program menanggulangi kemiskinan adalah belum jelasnya penilaian koefisien efektivitas. Penelitian oleh Firstiani dan Egamawati (2021) menyatakan bahwa selama tahun 2015-2020 anggaran

pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belum dapat berdampak pada pengurangan jumlah kemiskinan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa evaluasi kemiskinan secara statistik dan komprehensif perlu dilakukan dengan metode nilai ambang pada kemiskinan oleh karena itu pengembangan penelitian akan menggunakan *Threshold Modelling* (model ambang batas). Model ambang batas (*threshold*) memiliki peran strategis dalam analisis kebijakan pengentasan kemiskinan dari perspektif ekonomi. Pendekatan tersebut memungkinkan evaluasi efektivitas intervensi pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mengidentifikasi apakah target kebijakan telah tercapai secara optimal. Model ambang batas juga memberikan dasar empiris untuk merumuskan opsi kebijakan yang lebih efisien. Mekanisme *threshold* juga berfungsi sebagai sistem *feedback loop* yang mengungkap kelemahan implementasi program, sekaligus menilai konsistensi dan komitmen pelaksana kebijakan di tingkat masyarakat. Pada akhirnya model tidak hanya menilai kinerja kebijakan tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik dalam mencapai hasil ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. (Marhaeni et al, 2013).

Penelitian lain menjelaskan bagaimana model ambang batas (*threshold*) diterapkan untuk menentukan tingkat indeks tata kelola yang optimal. Apabila tingkat optimal tercapai maka berbagai tingkat kemiskinan akan berkurang seiring dengan kualitas tata kelola. Hubungan antara kualitas tata kelola dan kemiskinan bersifat non-linier. Temuan tersebut juga mengungkapkan bahwa rasio angka kemiskinan sebesar \$3,20 dan \$5,50 mulai menurun setelah indeks tata kelola mencapai tingkat ambang batas masing-masing sebesar 0,62 dan 0,70. Temuan-temuan yang diperoleh cukup kuat dan memberikan dukungan mendalam bagi tata kelola untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Anis Ochi, dkk., 2023).

Beberapa penelitian yang membahas hubungan non-linier dan ambang batas umumnya terwujud dalam konsep kemiskinan. Konsep tersebut membahas strategi dekonsentrasi kemiskinan yang berupaya untuk menggantikan lingkungan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari 40 persen dengan lingkungan yang tingkat kemiskinannya rendah (George C. Galster, 2018). Penelitian lain yang

dilaksanakan di Tiongkok membahas regresi empiris ambang batas untuk menunjukkan adanya ambang batas dalam hubungan antara globalisasi, kebijakan dan kemiskinan. Studi menggunakan data panel selama periode 1986-2002 yang mencakup dua puluh lima provinsi di Tiongkok serta menerapkan teknik regresi ambang batas. Penelitian memberikan perhatian khusus pada non linier dampak globalisasi terhadap masyarakat miskin. Hasil estimasi memberikan bukti kuat yang menunjukkan adanya ambang batas dalam hubungan antara globalisasi, kebijakan dan kemiskinan. Globalisasi hanya bermanfaat bagi masyarakat miskin setelah perekonomian mencapai ambang batas globalisasi tertentu (Liang, Zhicheng, 2006).

Penelitian Shanping Wang (2024) membahas bahwa untuk pertama kalinya model ambang batas digunakan untuk menyelidiki sejauh mana dan bagaimana mekanisme perluasan lahan konstruksi berpengaruh terhadap efisiensi pengentasan kemiskinan dari perspektif non linier. Hasil menunjukkan berbagai perbedaan kebijakan memiliki nilai ambang batas masing-masing dalam pengentasan kemiskinan. Francesca Grassetti (2018) menggunakan model *non-linier* melalui *threshold effect* sehingga memungkinkan untuk mengukur dinamika jangka panjang kebijakan pada negara terbelakang, berkembang maupun maju. Pada akhir penelitian diperoleh analisis kebijakan ekonomi yang berupaya meningkatkan modal per kapita dan terbebasnya perekonomian dari kemiskinan. Studi menguji hubungan antara transfer dana pemerintah Tiongkok ke daerah-daerah utama yang dilanda kemiskinan dan tingkat sumber daya manusia di daerah-daerah tersebut. Model regresi ambang batas (*threshold*) menemukan bahwa transfer dana pemerintah Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Penelitian oleh Zhenshan (2019) menganalisis dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal. Penelitian tersebut menyatakan bahwa ketika ambang batas terlampaui maka terdapat efek ambang batas yang signifikan. Transfer dana merangsang pertumbuhan ekonomi ketika jumlahnya melebihi RMB 4469 per kapita. Kajian memperkaya pemahaman teoritis mengenai hubungan kompleks antara penggunaan dana di daerah miskin dan dampaknya

terhadap dinamika pertumbuhan endogen (Zhenshan Yang, 2019). Penelitian lain yang mengadopsi pendekatan *threshold* dalam menganalisis ketimpangan ekonomi menunjukkan dinamika hubungan yang bersifat tidak linier antara perkembangan sektor keuangan dan distribusi pendapatan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa ekspansi keuangan berkontribusi positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan pada tingkat ambang tertentu. Kontribusi positif tersebut berbalik menjadi negatif setelah melewati titik ambang tersebut. Hal tersebut mencerminkan bahwa pendalaman keuangan yang lebih maju dapat memperluas akses ekonomi, mendorong inklusi keuangan, dan pada akhirnya menurunkan ketimpangan pendapatan. Temuan ambang batas menegaskan pentingnya mempertimbangkan efek non-linier dalam evaluasi kebijakan keuangan terhadap ketimpangan (Sikhawal, 2023). Berdasarkan isu yang sudah dijabarkan maka penelitian terkait program bantuan selanjutnya diharapkan memberikan analisis yang mendalam terkait model ambang batas (*threshold*) dan kemiskinan.

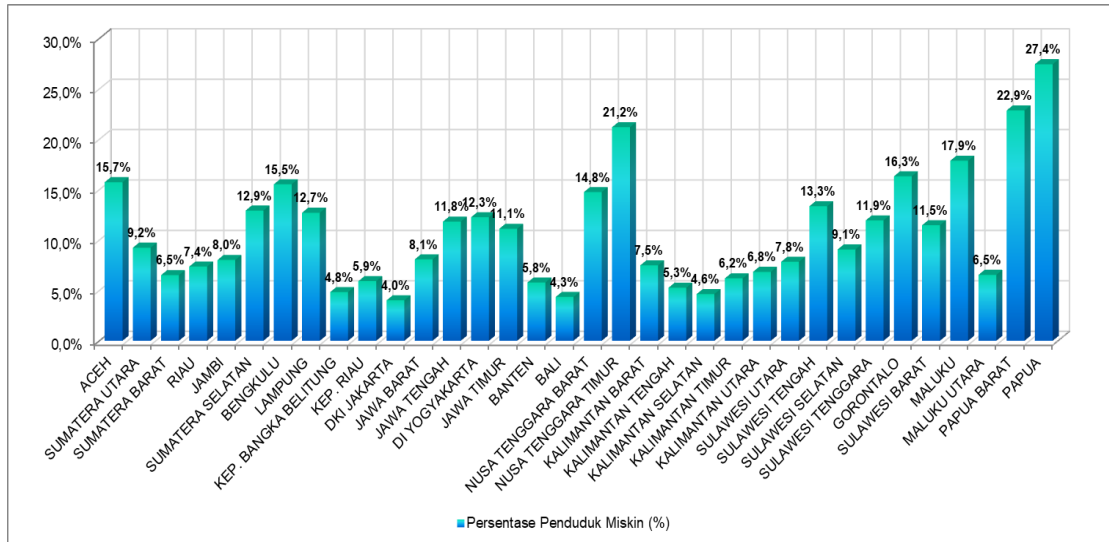
Kemiskinan adalah sebuah proses yang kompleks bukan sekadar serangkaian hubungan dari pendekatan kebijakan. Kebijakan kemiskinan harus fokus pada jaring pengaman sosial, pertumbuhan aset, peningkatan pendapatan, dan layanan dasar (Rakodi, 1995). Sudut pandang mengenai kemiskinan mengarah pada definisi kemiskinan sebagai keterbatasan dalam rangkaian konsumsi seorang individu kemakmuran sebagai kemampuan berkonsumsi. Peneliti dapat mengatakan bahwa kesejahteraan didefinisikan sebagai penguasaan atas barang dan jasa. Semakin sedikit penguasaan yang dimiliki seseorang terhadap sumber daya maka semakin sedikit pula kesejahteraan yang dapat dinikmatinya. Kemiskinan kemudian diartikan sebagai kemampuan penguasaan sumber daya di bawah garis kemiskinan (Medeiros, 2006). Kemiskinan menjadi masalah pembangunan yang belum ditemukan solusinya. Masalah kemiskinan senantiasa mengiringi proses pelaksanaan pembangunan oleh karena itu pemerintah perlu mengimplementasikan evaluasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter wilayahnya (Medeiros, 2006).

Pada tahun 2022, Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Indonesia naik sebesar 9,8% menjadi USD 4.580 dari USD 4.170 pada 2021. Prestasi ini menandai keberhasilan Indonesia naik ke kategori negara berpendapatan menengah atas. Tantangan kemiskinan belum selesai walaupun Indonesia naik kategori pendapatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, garis kemiskinan di Indonesia adalah Rp595.242 per kapita per bulan. Perbandingan standar garis kemiskinan Indonesia dengan negara lain, misalnya Afrika Selatan yang memiliki garis kemiskinan Rp722.037, memunculkan pertanyaan tentang relevansi standar kemiskinan di Indonesia saat ini (*Statistics South Africa*, 2024). Menurut Bank Dunia tahun 2019, sekitar 60% penduduk miskin ekstrem masih tinggal di Afrika Sub-Sahara dan 81% penduduk miskin global pada garis kemiskinan US\$3,65 berada di Afrika Sub-Sahara (seperti Republik Kongo dan Sudan) serta Asia Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa garis kemiskinan makanan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Afrika Selatan (Aron dkk., 2023). Republik Kongo adalah salah satu dari lima negara termiskin di dunia. Angka garis kemiskinan makanan di Afrika, termasuk Republik Kongo, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan makanan di Indonesia. Pengeluaran harian untuk masyarakat miskin di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara termiskin di dunia seperti Republik Kongo. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai relevansi standar garis kemiskinan yang digunakan di Indonesia saat ini.

Penelitian Itang (2015) menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, minimnya modal, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, malas bekerja, dan beban keluarga yang berat. Sementara itu, Pratama (2014) menjelaskan bahwa variabel inflasi, konsumsi, pendapatan per kapita, serta indeks pembangunan manusia (IPM) secara simultan memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Tisniwati (2012) menemukan bahwa angka harapan hidup berperan penting terhadap kemiskinan. Pemerintah memiliki peran untuk mengatur pemerataan kesejahteraan dan menghindari kemiskinan. Perlu dilakukan pemantauan kinerja pemerintah daerah secara berkala sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan, seperti penyimpangan anggaran belanja pemerintah, tingkat pengangguran tinggi,

kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta keterbatasan lapangan kerja (Yunus & Radjab, 2018). Kinerja penanggulangan kemiskinan tiap pemerintah daerah berbeda satu sama lain. Setiadi dan Kolip (2010) menyatakan kegagalan program menanggulangi kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor utama pertama terkait dengan program bantuan sosial yang cenderung berfokus pada bantuan langsung kepada kelompok miskin tanpa pendekatan pemberdayaan. Faktor kedua melihat bahwa masih terbatasnya pemahaman terkait penyebab kemiskinan masih sehingga program tidak disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman geografis dari barat hingga timur yang memerlukan pendekatan kontekstual. Bagus Sumargo dan Naomi Miduk M. Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia timur cenderung lebih tinggi sehingga indikator kemiskinan berbasis multidimensi di wilayah tersebut masih memerlukan penanganan.

Beberapa wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) cenderung lebih maju dari segi pembangunan dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari Kawasan Timur Indonesia (KTI). Saddam Tubaka (2019) meneliti bahwa provinsi di wilayah KTI masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, kecuali provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Badan Pusat Statistik menampilkan sepuluh provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi yang didominasi oleh provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, NTB dan Sulawesi Tengah.



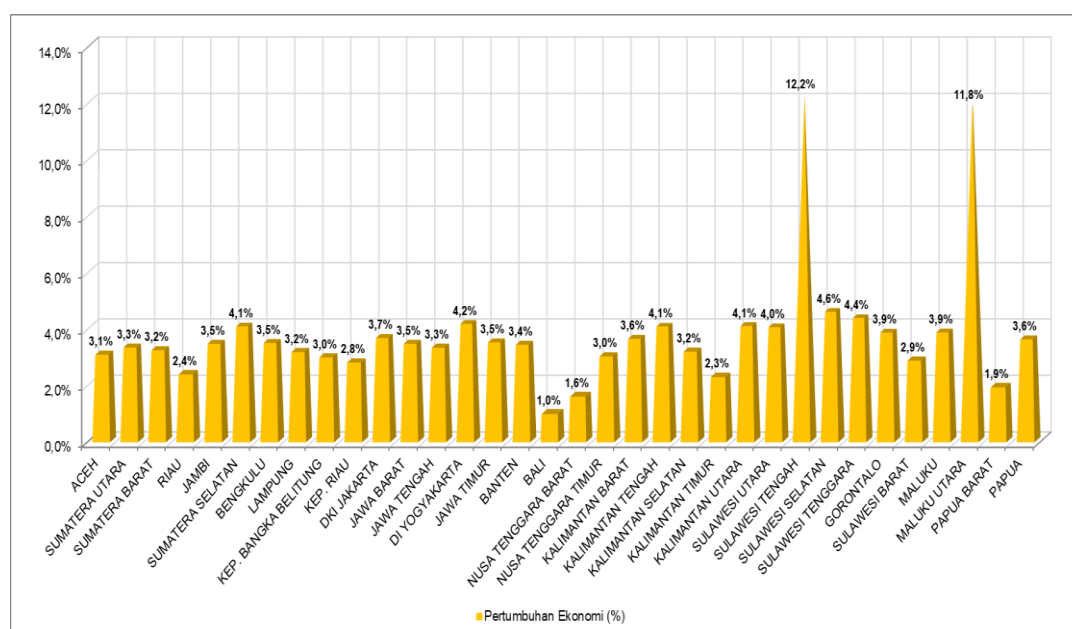
Sumber: Data Statistik Kemiskinan Indonesia tahun 2015-2022

Gambar 1.1. Rata-rata Persentase Penduduk Miskin 34 Provinsi di Indonesia

Grafik 1.1 menjelaskan tentang persentase penduduk miskin pada 34 Provinsi di Indonesia. Lima provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Aceh. Papua memiliki persentase sebesar 27,4 persen. Papua menjadi provinsi dengan penduduk miskin tertinggi dari provinsi lainnya. Tingginya persentase kemiskinan memerlukan dukungan yang signifikan dalam alokasi dana untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Papua Barat dengan persentase 22,9 persen membutuhkan program-program pembangunan ekonomi dan sosial. Nusa Tenggara Timur dengan persentase sebesar 21,2% merupakan peringkat ketiga kemiskinan tertinggi. Fokus pengembangan infrastruktur dan akses terhadap layanan sosial masih diperlukan untuk mengurangi kemiskinan.

Persentase penduduk miskin setiap wilayah di Indonesia memiliki masing-masing besaran dan faktor-faktor yang berbeda baik wilayah baik KBI dan KTI. Prowse (2009) menyatakan bahwa kemiskinan kronis tidak hanya ditandai oleh penghasilan yang sangat rendah, melainkan juga melibatkan kelaparan, malnutrisi, buta huruf, akses air minum yang terbatas, keamanan, layanan kesehatan, diskriminasi sosial, kerentanan fisik, dan politik. Penelitian Chici Shintia Laksani (2010) menganalisis *Pro-Poor Growth* di Indonesia melalui identifikasi pengurangan kemiskinan akibat ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di banyak provinsi di Indonesia belum berkualitas baik karena peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Berkurangnya angka kemiskinan diperkuat dengan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan di kalangan penduduk. Pengendalian kualitas kesejahteraan di Indonesia masih tergantung pada perkembangan perekonomian daerah (Suparman, 2022). Gambar 1.2 menjelaskan perkembangan laju pertumbuhan 34 provinsi. Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 12,2%. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, atau investasi infrastruktur yang berdampak positif pada perekonomian daerah. Maluku Utara dengan angka 11,8% menunjukkan bahwa Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi yang mungkin dipengaruhi oleh sektor kelautan, perikanan, dan pertambangan yang kuat. Sulawesi Selatan dengan angka 4,6% menjadikan Sulawesi Selatan dengan kinerja ekonomi yang kuat.

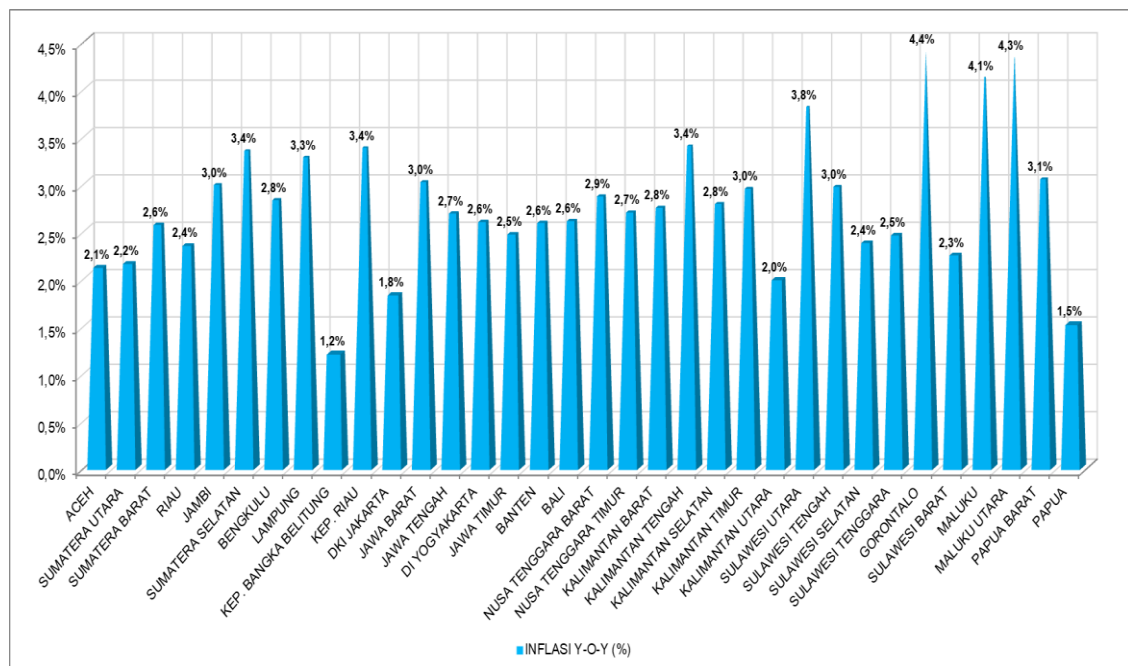


Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018-2022

Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010, di 34 Provinsi Di Indonesia

Pergerakan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel makro yang mengontrol dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang merata di kalangan lapisan masyarakat dapat mengindikasikan peran pemerintah yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat meningkat dan lapangan kerja akan terbuka lebar untuk menyerap tenaga kerja. Hal tersebut seharusnya berdampak positif pada kemiskinan di Indonesia (Muhammad Bukhori Dalimunthe, 2022).

Terdapat faktor harga yang menjadi salah satu variabel ekonomi makro selain angka pertumbuhan ekonomi. Inflasi dianggap berdampak positif terhadap kemiskinan, namun penelitian oleh Amalia (2012) menunjukkan bahwa inflasi dapat menjadi determinan ekonomi makro yang mempengaruhi kondisi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang disertai perbaikan distribusi pendapatan dapat meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan. Inflasi dapat memengaruhi kemiskinan dan berfungsi sebagai variabel kontrol dalam analisis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang adil dapat mengurangi kemiskinan walaupun ada kenaikan tingkat inflasi (Qisti Marhamah Nasution, 2023). Berikut adalah rata-rata inflasi 34 provinsi di Indonesia:

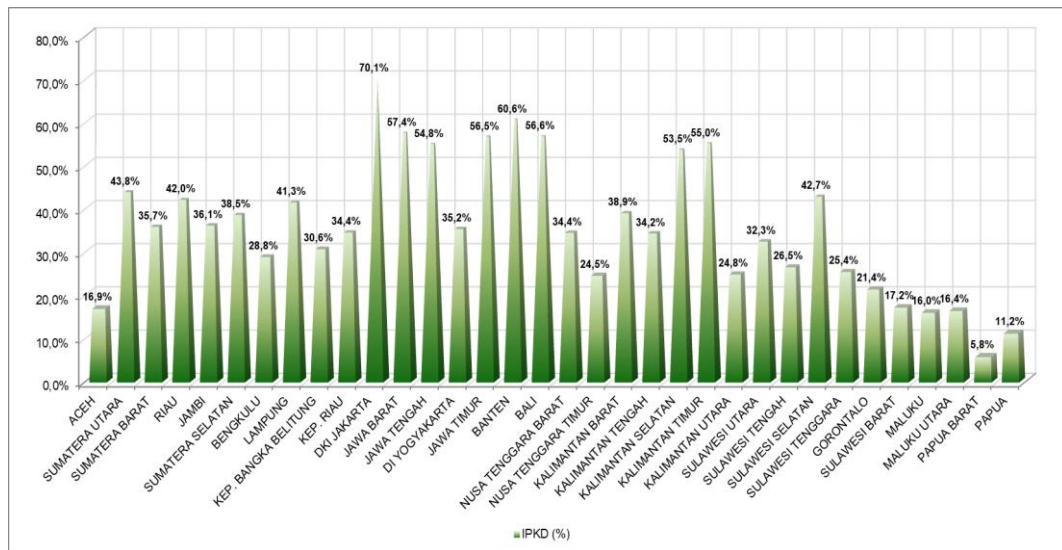


Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2018-2022

Gambar 1.3. Laju Inflasi inti/umum Y-O-Y, di 34 Provinsi Di Indonesia

Gambar di atas menunjukkan perkembangan inflasi pada 34 provinsi. Provinsi dengan Inflasi Y-O-Y tertinggi adalah Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku. Gorontalo dengan angka 4,4% mengindikasikan bahwa tingginya angka inflasi di mungkin disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok atau faktor distribusi yang terhambat. Maluku Utara dengan angka 4,3% mungkin disebabkan oleh ketergantungan pada impor barang atau kurangnya produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maluku dengan angka laju inflasi sebesar 4,1% mengindikasikan sulitnya faktor geografis dan distribusi barang yang tidak merata dapat menjadi penyebab utama tingginya inflasi. Inflasi dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di suatu negara dan jumlah produksi serta permintaan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan naik turunnya harga barang atau jasa (Coibion, 2019).

Inflasi hanya salah satu faktor yang menjadi indikator mempengaruhi kemiskinan. Indikator lain yang dianggap penting yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Prakoso (2019) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan namun Asmara & Cahaya (2014) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah justru berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Temuan yang bertolak belakang menggambarkan bahwa kebijakan kemandirian keuangan tidak selalu mampu menekan tingkat kemiskinan secara konsisten di berbagai daerah (Asmara & Cahaya, 2014). Berikut adalah rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan daerah 34 provinsi di Indonesia:



Sumber: Sistem Informasi Data Dasar Regional, BAPPENAS 2018-2022

Gambar 1.4. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan daerah, di 34 Provinsi Di Indonesia

Tiga provinsi dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tertinggi menunjukkan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan publik yang relatif lebih optimal dibandingkan daerah lain. DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan IPKD 70,1%, mencerminkan kualitas manajemen fiskal yang kuat, dukungan sumber daya manusia berkompetensi tinggi, serta infrastruktur kelembagaan yang mapan sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional. Provinsi Banten menyusul dengan IPKD 60,6%, merefleksikan efektivitas dalam alokasi anggaran untuk pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik, sehingga menghasilkan kinerja fiskal yang efisien. Bali dengan IPKD 56,6% juga menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang adaptif dan transparan meskipun menghadapi tekanan ekonomi struktural pada sektor pariwisata. Keuangan daerah yang adaptif dan transparan mengindikasikan bahwa tata kelola fiskal yang baik berkorelasi dengan kapasitas institusional dan strategi pembangunan daerah yang terukur.

Tiga provinsi dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terendah menggambarkan adanya tantangan struktural dalam tata kelola fiskal dan kapasitas institusional daerah. Papua Barat menempati posisi terendah dengan IPKD 5,8%, yang mengindikasikan kelemahan signifikan dalam manajemen keuangan publik, termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta

infrastruktur administratif yang belum optimal. Papua menyusul dengan IPKD 11,2%, di mana kondisi geografis dan tingkat aksesibilitas yang rendah turut mempengaruhi efektivitas perencanaan dan implementasi anggaran daerah. Sementara itu, Maluku memiliki IPKD 16,0%, mencerminkan hambatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fiskal, yang berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan anggaran. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas tata kelola fiskal diperlukan untuk mencapai efektivitas pembangunan yang lebih inklusif di wilayah-wilayah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah tercermin melalui dampaknya terhadap indikator pembangunan, salah satunya perubahan tingkat kemiskinan. Penurunan kemiskinan menjadi ukuran penting efektivitas kebijakan fiskal dan alokasi anggaran, mengingat kelompok masyarakat miskin menghadapi keterbatasan akses terhadap sektor-sektor esensial seperti kesehatan, layanan sosial dan pendidikan. Pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat sasaran guna memperkuat inklusi ekonomi dan sosial sehingga pengelolaan keuangan publik mampu menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat (Cristian, F Sepuldeva and Vazques, 2011).

Pemerintah Indonesia menetapkan tiga pendekatan utama dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia terdiri atas tiga pendekatan utama. Pertama, menciptakan kondisi makroekonomi yang kondusif untuk keberlanjutan program. Kedua, memberikan bantuan dan perlindungan sosial secara langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, memperkuat kapasitas masyarakat miskin dan aparatur pelaksana agar program lebih efektif dan luas jangkauannya. Pendekatan terintegrasi ini memastikan intervensi pemerintah bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998–1999), Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah akibat dampak krisis moneter 1997–1998 (Zimran dkk., 1998). Pada tahun 1998, angka kemiskinan melonjak drastis hingga sekitar 24,2% dari total penduduk. Pemerintah memperkuat program bantuan sosial untuk menanggulangi dampak sosial-ekonomi. Program mengutamakan

subsidi dan bantuan pangan yang tergabung dalam inisiatif besar Bernama Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) (Timmerman dkk., 2021). Beberapa komponen JPS dinamakan Program Padat Karya Desa-Pengembangan Wilayah Terpadu (PKD-PWT) di NTT, Sulawesi Selatan, NTB dan Sulawesi Utara (Prawoto, 2009). Sasaran program JPS yang digagas World Bank pada tahun 2000 menekankan pada pemberian perlindungan kepada kelompok yang sedang mengalami penurunan kemampuan sehingga tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya (*transient poverty*). Jaring pengaman sosial menjadikan masyarakat yang terkena dampak krisis sebagai target penerima bantuan (Firstiani & Egamawati, 2021). Komponen pokok program penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi bantuan tunai dan bantuan non-tunai. Bantuan tunai berupa alokasi subsidi tunai terbatas untuk masyarakat rentan, termasuk bantuan uang untuk kebutuhan dasar namun sayangnya bantuan tidak merata di semua wilayah (Firstiani & Egamawati, 2021). Program utama lain yang dijalankan adalah Program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin yang diberikan dalam bentuk bantuan non-tunai. Pada tahun 2005, pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai respons atas pencabutan subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok (Papilaya, 2020). BLT diberikan tanpa syarat kepada keluarga miskin. Program penanggulangan kemiskinan senantiasa mengalami evolusi nama program-programnya. Kedua program baik tunai maupun non-tunai saling melengkapi dan tidak saling menggantikan, apalagi diintegrasikan dalam pendekatan yang komprehensif sesuai dengan kerentanan masyarakat.

Perkembangan program menanggulangi kemiskinan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional. Pada periode transisi tahun 2001–2004, penanggulangan kemiskinan masih bersifat project oriented dan sektoral, seperti melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Namun, perubahan signifikan terjadi dengan dibentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 yang diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) mulai menempatkan kemiskinan sebagai persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Istilah bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum muncul tetapi pemerintah tetap memberikan bantuan pangan dan tunai berupa penguatan pangan untuk orang miskin, subsidi dan bantuan tunai pada daerah-daerah tertinggal.

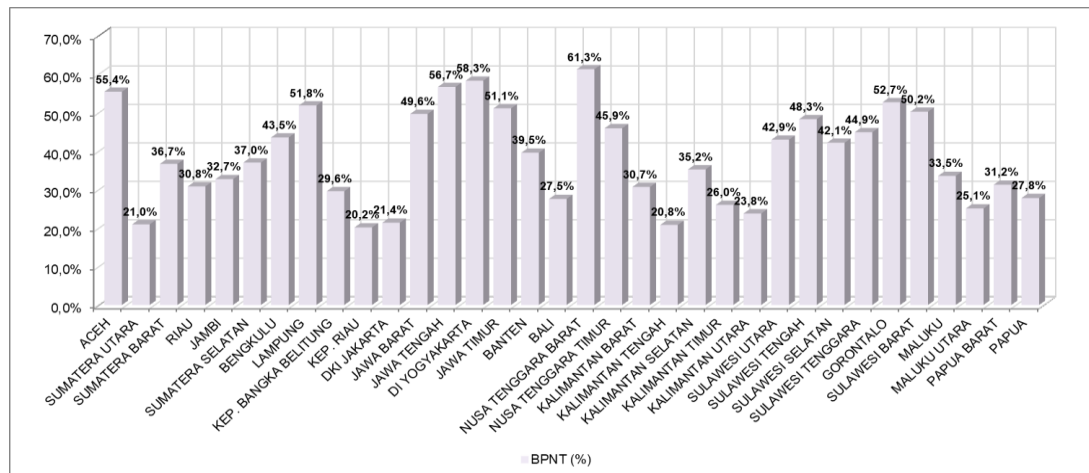
Pada periode 2005–2009, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengintegrasikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2005–2009) dan menempatkan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan. Salah satu terobosan penting pada masa Presiden SBY adalah diluncurkannya program BLT pada tahun 2005 melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BLT yang menjadi cikal bakal bantuan langsung berskala nasional dengan basis data rumah tangga miskin. Program bantuan pangan bagi masyarakat miskin tetap berupa program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan belum dalam bentuk non-tunai seperti BPNT. Paradigma penanggulangan kemiskinan mengalami perubahan penting memasuki periode transformasi 2015–2019 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Landasan hukum utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu terobosan signifikan dalam periode Presiden Joko Widodo adalah peluncuran program BPNT pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. BPNT hadir sebagai pengganti program Raskin untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuan pangan bagi masyarakat miskin. Program BLT mulai dikurangi karena fokus pemerintah dialihkan pada program-program berbasis pemberdayaan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perubahan besar terjadi pada masa pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020. Pemerintah meluncurkan berbagai skema BLT secara masif sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. BLT disalurkan melalui berbagai jalur seperti BLT Dana Desa, BLT UMKM, dan BLT pekerja. Di sisi lain, BPNT juga diperluas jangkauannya dan diintegrasikan secara digital melalui *e-wallet* dan *e-warung*. Program BLT dan BPNT kini menjadi instrumen penting dalam perlindungan

sosial di Indonesia karena berlandaskan pada kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan mengalami tren dan integrasi berkesinambungan dalam bentuk program Bantuan Program Non-tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi topik penelitian yang menarik. Program ini dirancang untuk menjaga standar hidup rumah tangga miskin saat menghadapi guncangan ekonomi sekaligus membuka peluang peran perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga. Sejak diluncurkan tahun 2007, PKH bertujuan meringankan beban rumah tangga miskin melalui mekanisme bantuan bersyarat (Suharto, 2009; Roidah, 2016; Annisa, 2020). PKH menjadi andalan bantuan tunai sedangkan bantuan non-tunainya adalah BPNT. Penyaluran BPNT didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20, 2019. Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerja sama dengan bank milik pemerintah. BPNT pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk pemenuhan kebutuhan pokok. BPNT mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan dan nutrisi yang lebih seimbang (PerPres No.63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 8 n.d.).

Belanja bantuan sosial dan subsidi memiliki potensi untuk menciptakan efek *multiplier* ekonomi. Dana yang dikeluarkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat penerima bantuan sehingga memberikan dorongan kepada sektor-sektor ekonomi lokal. (Monica Ferreira, 2015). Grafik 5 menjelaskan bagaimana lima wilayah dengan penerimaan BPNT tertinggi mencakup; Nusa Tenggara Barat (61,3%), DIY Yogyakarta (58,3%), Jawa Tengah (56,7%), Aceh (55,4%) dan Gorontalo (52,7%). Nusa Tenggara Barat mencerminkan tingkat kemiskinan yang tinggi dan kebutuhan bantuan pangan yang signifikan. Rendahnya persentase penerima BPNT mungkin mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih baik atau manajemen bantuan yang lebih efisien. Contoh kasus ditemukan di Kalimantan Tengah yang memiliki tantangan geografis dan distribusi penduduk namun

memiliki persentase penerima BPNT lebih rendah. Berikut adalah tabel keadaan raskin/bantuan non-tunai pada 34 provinsi di Indonesia:



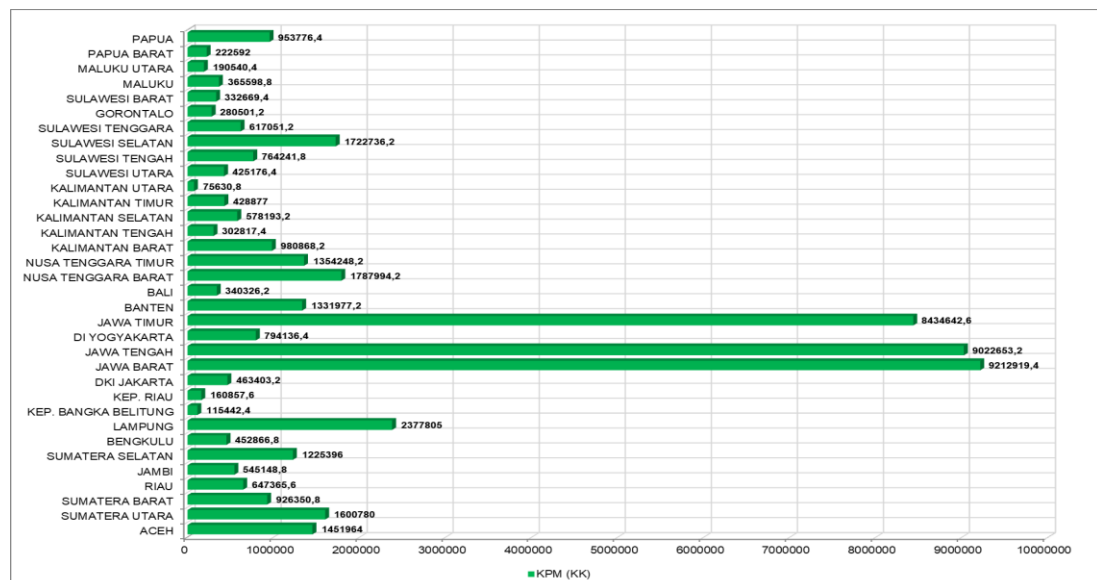
Sumber: Data Statistik Kemiskinan Indonesia Tahun 2010-2022

Gambar 1.5. Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Penerima BPNT Penduduk Miskin 34 Provinsi Di Indonesia

Perlu dilakukan penelitian untuk memahami dan menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah seperti BPNT dan PKH dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) guna menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tergantung pada kelompok sasaran dan daerah mana yang ditargetnya, misalnya siapa dan lokasi mereka tinggal (Remi, Tjiptoherijanto, 2002). Todaro (2015) menuliskan bahwa diperlukan lebih banyak pengetahuan tentang siapa yang termasuk golongan miskin dan apa karakteristik ekonomi mereka sebelum merumuskan program dan kebijakan yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Pendapatan dan subsidi pemerintah berperan penting dalam menyangga rumah tangga yang mengalami kemiskinan namun ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menjadikan mereka terus bergantung pada pemerintah. Dukungan yang berlebihan ini diduga membuat masyarakat kurang termotivasi untuk mengembangkan diri guna meningkatkan perekonomian (Nanda Herijal Putra, 2021). Kajian evaluasi PKH juga diperlukan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan lainnya (Sarman, et

al, 2000). PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial atau *social assistance*, yaitu jaminan sosial berupa tunjangan uang, barang, atau layanan kesejahteraan yang diberikan kepada keluarga rentan tanpa penghasilan layak. Sasaran utamanya meliputi keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, orang dengan cacat fisik/mental, kelompok minoritas, yatim piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, serta korban konflik sosial (Kemensos, 2013).

Grafik 1.6 mendata rata-rata jumlah penerima KPM di Indonesia. Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki populasi KPM terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut diduga mencerminkan kebutuhan bantuan sosial yang besar untuk mendukung kesejahteraan penduduk. Provinsi-provinsi tersebut memiliki tantangan ekonomi yang membuat banyak keluarga membutuhkan bantuan sosial. Kondisi 3 provinsi di Jawa berbeda dengan Provinsi Bangka Belitung yang ternyata memiliki jumlah penerima PKH yang rendah. Keadaan Papua Barat juga cukup menarik karena provinsi tersebut memiliki jumlah penerima PKH yang rendah meskipun memiliki tantangan geografis.



Sumber: Data Statistik Kemiskinan Indonesia tahun 2010-2022

Gambar 1.6. Rata-Rata Jumlah KPM Keluarga Penerima Bantuan Pada 34 Provinsi Di Indonesia

Penelitian Waluyo, B., Khoirunurrofik (2021) menganalisis PKH periode 2015-2019. PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan baik secara nasional, di daerah tertinggal maupun non-tertinggal. Pengaruh PKH lebih lemah di daerah tertinggal dibandingkan daerah maju. Peningkatan nominal tunjangan PKH harus disertai perluasan cakupan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang masih banyak daerahnya tertinggal. Aksesibilitas wilayah, prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta ketepatan penyaluran kepada masyarakat miskin di daerah tertinggal menjadi faktor kunci efektivitas PKH. Kelemahan penelitian sebelumnya adalah belum dapat menentukan koefisien efektivitas program secara pasti.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya hanya membahas hubungan dan pengaruh antara variabel kebijakan dan kemiskinan. Penelitian Osabohien (2020) menganalisis tentang pengaruh program bantuan sosial terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara Afrika. Hasil studi menunjukkan bahwa program bantuan sosial berpengaruh signifikan pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan namun perbedaan regional akan membedakan hasil pengaruh kebijakan perlindungan sosial. Skoufias & Di Maro (2008) menyatakan bahwa program Progres a di Meksiko berkontribusi menurunkan kemiskinan jangka pendek, tetapi tidak semua dampaknya signifikan. Beberapa program hanya mengurangi kedalaman kemiskinan tanpa berhasil mengeluarkan penerima dari garis kemiskinan. Perbedaan pengaruh ini disebabkan oleh variasi besaran bantuan, cakupan program, dan ketepatan penyaluran kepada masyarakat miskin yang memenuhi kriteria (Martorano & Sanfilippo, 2012). Hasil penelitian Muliati et al. (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Temuan Muliati et al. (2019) bertentangan dengan sejumlah teori dan literatur yang menyatakan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah seharusnya memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Pengeluaran pemerintah yang tidak berdampak terjadi karena tujuan anggaran tidak secara eksplisit ditujukan untuk program kemiskinan yang tepat. Penelitian yang ada belum menjawab bagaimana efek kebijakan karena belum mampu menjelaskan pengeluaran pemerintah dan

kemiskinan . Beberapa penelitian terdahulu belum mampu memberikan analisis jangka panjang dan evaluasi koefisien program penanggulangan kemiskinan (Ailiyah, 2023; Ariansyah dkk., 2025, 2025; Kamaruddin & Awaru, 2025; Ridha, 2024). Nilai koefisien seharusnya dapat dikaitkan dengan hubungan antara ambang batas non-linear dan kemiskinan secara umum maka dibutuhkan penelitian yang memanfaatkan analisis hubungan antara ambang batas non-linear dan kemiskinan. Hubungan secara detail per wilayah, per kebijakan dan dilihat berdasarkan rentang waktu bagaimana evaluasi dan pengaruh pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan memanfaatkan model ambang batas. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Efektivitas Program Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Periode 2000 - 2022” perlu dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan model ambang batas (*Threshold*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan memperhatikan data yang disajikan sebelumnya maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Skoufias dan Di Maro (2008) menyatakan bahwa *Progres* di Mexico signifikan untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek namun tidak semua program berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan. Penelitian lain oleh Yosra (2024) menyebutkan tidak sejalannya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ditandai dengan minimnya pengaruh peningkatan ekonomi pada ambang batas tertentu. Minimnya pengaruh bantuan sosial juga ditemukan di Indonesia (Ailiyah, 2023; Ariansyah dkk., 2025, 2025; Kamaruddin & Awaru, 2025; Ridha, 2024). Program *Pro-Poor* seperti program BPNT dan PKH di Indonesia yang telah dijalankan selama puluhan tahun belum berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Bantuan tunai dan non-tunai tersebut seharusnya mampu mengentaskan kemiskinan namun kemiskinan di Indonesia tetap tinggi. Efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum terbukti dengan analisis empiris.
2. Penelitian Martorano & Sanfilippo (2012) membahas perbedaan pengaruh program kemiskinan terhadap penurunan kemiskinan sangat mungkin terjadi karena adanya perbedaan besaran, cakupan, serta ketepatan bantuan untuk

menyasar masyarakat miskin yang memenuhi kriteria program. Penelitian Muliati (2019), Osahabien (2020) serta Waluyo (2021) menemukan bahwa program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan tunai belum mampu menjadi jawaban untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat miskin di Indonesia.

3. Penelitian oleh Nadhifah dan Mustofa (2021) menunjukkan bahwa BPNT memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. BPNT dianggap berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan namun data kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem internasional. Persentase penduduk miskin Indonesia malah makin meningkat menjadi 19,9% apabila standar yang digunakan adalah standar internasional (World Bank, 2024). Tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menunjukkan program bantuan non-tunai belum berperan maksimal pada aspek pengeluaran penduduk miskin.
4. Mingzha (2022) meneliti dampak bantuan keuangan dan bantuan digitalisasi dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian menemukan bahwa terjadi penurunan efek pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Tiongkok. Penelitian lain oleh Zhensyang Yang (2019) menganalisis pengaruh transfer dana pemerintah Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi di daerah miskin. Hasil penelitian tersebut menekankan pentingnya penggunaan dana yang tepat untuk pengentasan kemiskinan yang efektif. Masalah serupa ditemukan di Indonesia karena dampak bantuan tunai seperti PKH masih perlu penyempurnaan.
5. Penelitian oleh Osabohien (2020) menunjukkan bahwa program bantuan sosial berpengaruh signifikan pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan namun perlindungan sosial tiap wilayah memiliki karakter berbeda dan membutuhkan jenis kebijakan perlindungan sosial yang berbeda. Penelitian lain yang sejalan dengan hasil Osabohien (2020) adalah penelitian mengenai pentingnya tata kelola dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Anis Ochi, Yosra Said, 2023). Program menanggulangi kemiskinan yang

bersifat nasional belum tentu berdampak sama dan merata dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian akan menganalisis dua model regresi ambang batas (*threshold*) dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah BPNT memiliki pengaruh terhadap pendapatan per kapita penduduk miskin pada aspek pendapatan?
2. Apakah PKH memiliki pengaruh terhadap pendapatan per kapita penduduk miskin pada aspek pendapatan?
3. Apakah BPNT memiliki pengaruh terhadap pengeluaran penduduk miskin pada aspek pengeluaran?
4. Apakah PKH memiliki pengaruh terhadap pengeluaran penduduk miskin pada aspek pengeluaran?
5. Bagaimana perbandingan analisis pengaruh pelaksanaan program BPNT dan PKH serta bagaimana strategi tata kelola program yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menyelidiki pengaruh antara variabel *threshold* (BPNT dan PKH) dengan variabel indikator kemiskinan, yaitu pendapatan per kapita penduduk miskin (aspek pendapatan) dan garis kemiskinan (aspek pengeluaran). Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian akan menganalisis dua model regresi *threshold* dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh BPNT pada aspek pendapatan.
2. Menganalisis pengaruh PKH pada aspek pendapatan.
3. Menganalisis pengaruh BPNT pada aspek pengeluaran.
4. Menganalisis pengaruh PKH pada aspek pengeluaran.
5. Menganalisis perbandingan analisis pengaruh pelaksanaan program BPNT dan PKH serta bagaimana strategi tata kelola program yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), telah menghasilkan berbagai temuan penting. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih menyisakan keterbatasan signifikan. Misalnya, Waluyo dan Khoirunurrofik (2021) menemukan hubungan negatif signifikan antara PKH dengan tingkat kemiskinan baik secara nasional maupun di daerah tertinggal, namun studi mereka menggunakan pendekatan kualitatif tanpa analisis data jangka panjang yang komprehensif. Nadhifah dan Mustofa (2021) menegaskan pengaruh signifikan BPNT dalam menekan kemiskinan, tetapi pendekatan mereka masih mengasumsikan hubungan linier dan menggunakan data agregat nasional sehingga kurang mempertimbangkan variasi antar wilayah. Selain itu, Martorano dan Sanfilippo (2012) menyoroti bahwa efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada cakupan, besaran, dan ketepatan sasaran, namun belum mengkaji dampak efek non-linear atau ambang batas dalam konteks pengentasan kemiskinan. Studi internasional oleh Skoufias dan Di Maro (2008) pada program Progreso di Meksiko juga menunjukkan bahwa dampak program tidak merata di seluruh wilayah.

Kendala lain di Indonesia adalah minimnya penelitian yang menerapkan model statistik yang mampu menangkap efek ambang batas (*threshold*) dan non-linearitas pengaruh program dalam konteks sosial-ekonomi dan geografis antar provinsi. Sebagian besar literatur masih kurang memperhatikan karakteristik lokal sehingga pemahaman tentang efektivitas program BPNT dan PKH cenderung bersifat umum dan kurang kontekstual (Osabohien, 2020; Anis Ochi dkk., 2023). Evaluasi kebijakan kuantitatif yang mengaitkan koefisien efektivitas dengan dinamika waktu dan interaksi antar program juga masih sangat terbatas (Firstiani Egamawati, 2021).

Penelitian pada Tabel 1.1 menjadi dasar penting dalam pemilihan berbagai variabel dan acuan materi yang digunakan untuk mengembangkan keaslian dan kebaruan disertasi sehingga disertasi memiliki nilai kontribusi yang berdampak.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
1	Felicia Putri Anggrasari & Muhammad Hanri (2025)	Data menggunakan data time series 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2022 sebagai sampel untuk analisis pengaruh ambang batas.	Teori Trap Kemiskinan (<i>Poverty Trap</i>): Menggambarkan bagaimana individu atau rumah tangga yang terperangkap dalam kemiskinan mungkin tidak dapat keluar meskipun ada pertumbuhan ekonomi biasa, dan hanya dapat keluar jika ada intervensi atau bantuan yang lebih kuat. Teori Kesejahteraan Sosial: Menekankan peran bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan, dengan fokus pada pengaruh tunjangan tunai terhadap tingkat kemiskinan. Model ambang batas <i>Threshold Effect</i>	Studi menganalisis pengaruh program bantuan tunai dan non-tunai pemerintah Indonesia terhadap pendapatan masyarakat miskin (Pov1) dan garis kemiskinan (Pov2) dengan regresi sebanyak 138 regresi (2002–2015). Hasil akan menunjukkan adanya efek ambang batas pada masing-masing provinsi di Indonesia sejak 2000-2022.	Model ambang batas (threshold effect) yang digunakan berfokus pada identifikasi titik optimal efektivitas bantuan, namun belum sepenuhnya menangkap hubungan nonlinier atau interaksi kompleks antara variabel sosial-ekonomi lainnya, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan kondisi infrastruktur daerah. Setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Penelitian belum sepenuhnya memperhitungkan faktor-faktor kontekstual tersebut, sehingga hasil ambang batas antarprovinsi bisa saja tidak sepenuhnya merepresentasikan realitas lokal.
2	Anis Ochi, Yosra Saidi, Mohamed Ali Labidi (2023)	Penelitian bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat efek ambang batas (<i>threshold</i>) nonlinier dari kualitas tata kelola dan bantuan-bantuan sosial/pembangunan terhadap tingkat kemiskinan. Data penelitian terdiri dari 57	Model ambang batas panel dinamis. <i>Threshold Effect</i> . Jumlah Kepala Keluarga Miskin dan Bantuan sosial dan pembangunan resmi (NODAR) Teori kemiskinan, Sebagian besar teori kemiskinan dapat	Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola yang baik dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, terutama jika berada di atas ambang batas tertentu. Jika indeks tata kelola melebihi 0,2, maka kemiskinan	Penelitian menggunakan model ambang batas (threshold) yang mengidentifikasi titik tertentu dari kualitas tata kelola untuk melihat dampaknya terhadap kemiskinan. Namun, model mungkin tidak menangkap dinamika kompleks

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		negara Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika untuk periode 2010–2019. Dengan Target Jumlah keluarga Miskin.	diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok teori utama: politik, struktural, dan perilaku. Teori politik berpendapat bahwa kemiskinan adalah hasil politik yang didorong oleh hubungan kekuasaan dan pilihan kolektif tentang cara mendistribusikan sumber daya (Brady et al. 2016).	ekstrem mulai menurun secara nyata. Untuk tingkat pengeluaran \$3,20 per hari, dampak positif terlihat saat indeks mencapai 0,62, dan untuk \$5,50 per hari pada indeks 0,70. Artinya, semakin baik tata kelola suatu negara, semakin efektif upaya pengurangan kemiskinannya. Selain itu, bantuan pembangunan resmi (NODAR) juga berperan penting dalam mendukung penurunan kemiskinan, terutama jika diarahkan untuk memperbaiki tata kelola. Kebijakan yang fokus pada reformasi tata kelola sangat dibutuhkan agar dampak pengurangan kemiskinan lebih optimal dan berkelanjutan.	dari perubahan kebijakan atau konteks sosial-politik yang lebih luas.
3	Yosra Saidi, Mohamed Ali Labidi, Anis Ochi (2023)	Menganalisis hubungan tiga arah antara kemiskinan ekstrem, kualitas tata kelola, dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sub-Sahara Afrika selama periode 2010–2019. Secara khusus, penelitian ingin menentukan apakah terdapat ambang batas kualitas tata kelola, di atas mana pertumbuhan ekonomi dan tata kelola yang lebih	Data Panel dengan Model ambang batas panel dinamis. <i>Threshold Effect</i> . Model Panel Threshold Regression (PTR) dan Panel Smooth Transition Regression (PSTR) untuk menentukan tingkat indeks tata kelola yang optimal, yang jika tercapai	Penelitian menemukan bahwa tata kelola yang baik secara signifikan mengurangi kemiskinan ekstrem setelah melewati ambang batas tertentu (GGI 0,314 dan IIAG 66,9). Pertumbuhan ekonomi juga mulai berdampak pada pengurangan kemiskinan jika tata kelola mencapai ambang yang lebih tinggi	Meskipun ditemukan hubungan negatif antara tata kelola dan kemiskinan ekstrem, studi belum secara tuntas menjelaskan arah kausalitas—apakah tata kelola yang lebih baik mengurangi kemiskinan, atau sebaliknya, pengurangan kemiskinan memungkinkan perbaikan tata

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		baik dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan ekstrem. Analisis empiris didasarkan pada data tahunan dari 490 observasi untuk 49 negara Afrika Sub-Sahara. Periode penelitian berlangsung dari tahun 2010 hingga 2019.	akan membuat kemiskinan ekstrem menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas tata kelola.	(GGI 0,367 dan IIAG 63,2). Tata kelola yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan harus mencakup penciptaan iklim investasi yang kondusif dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam memberdayakan masyarakat miskin	kelola.
4	Mingzhao Xiong, Wenqi Li , Brian Wenqi Li , Brian Sheng Xian Teo dan Jaizah Othman . (2022)	Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak bantuan keuangan terhadap pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan Tiongkok, serta mengeksplorasi efek pertumbuhan ekonomi regional dan kesenjangan pendapatan terhadap pengurangan kemiskinan. Penelitian juga bertujuan memberikan saran kebijakan untuk mempercepat pengembangan bantuan keuangan dan merancang strategi pengurangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi regional.	Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis dan Model ambang batas <i>Threshold Effect</i>. Teori Ekonomi Pertumbuhan Endogen, yang dikembangkan oleh Paul Romer, menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi seperti bantuan keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan modal manusia, teknologi, dan inovasi yang membantu mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Teori	Penelitian menemukan bahwa bantuan keuangan, termasuk cakupan, kedalaman penggunaan, dan digitalisasi, secara signifikan mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah timur Tiongkok. Efeknya lebih besar di daerah pedesaan, dan bantuan keuangan mendorong pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi regional dan pengurangan kesenjangan pendapatan perkotaan-pedesaan. Uji ambang batas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional memiliki dampak yang semakin besar	Penelitian mungkin belum sepenuhnya memasukkan semua variabel yang relevan yang dapat memengaruhi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan, seperti kebijakan sosial lain, kebijakan sektor pendidikan, atau faktor politik.

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		Data menggunakan data panel 30 provinsi di Tiongkok dari tahun 2011 hingga 2020 sebagai sampel untuk analisis empiris.	Kesenjangan Pendapatan menganalisis ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan bagaimana pengurangannya dapat menurunkan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan.	dalam pengentasan kemiskinan seiring peningkatan nilai ambang batas. Saran kebijakan meliputi percepatan pengembangan bantuan keuangan, strategi pengurangan kemiskinan berbasis wilayah, dan pengurangan kesenjangan pendapatan.	
5	Segun Thompson Bolarinwa, Munacinga Simatele (2022)	Penelitian bertujuan untuk memvalidasi keberadaan ambang batas (threshold) dalam hubungan antara informalitas dan kebijakan-kebijakan tentang kemiskinan terhadap kemiskinan di negara-negara Data dari 40 negara Afrika sub-Sahara terpilih antara tahun 1991 dan 2018 digunakan untuk studi	Model Regresi ambang batas <i>Threshold Effect</i> dan Metode Momen Umum (SGMM) untuk mengontrol endogenitas dan simultanitas. Variabel utama yang dipakai Persentase Kemiskinan, Garis Kemiskinan, Pendapatan Masyarakat miskin dan Masyarakat pekerja sektor informal Teori Kemiskinan Boeke (1953), Lewis (1954) dan Hart (1973), (Lewis, 1954)	Kebijakan pengentasan kemiskinan harus mempertimbangkan tingkat informalitas ekonomi. Tingkat informalitas yang terlalu tinggi menunjukkan lemahnya regulasi pasar tenaga kerja dan perlindungan sosial, yang justru memperburuk kemiskinan dan menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan yang menekan informalitas secara terukur—seperti perluasan lapangan kerja formal, perlindungan pekerja, dan insentif usaha formal—dapat memperkuat upaya pengurangan kemiskinan secara efektif. Pemerintah harus beroperasi dalam batas optimal informalitas agar kebijakan kemiskinan menjadi lebih berdampak dan berkelanjutan.	Kebijakan yang efektif dalam menekan informalitas dan mengurangi kemiskinan mungkin tidak sepenuhnya aplikatif di semua negara atau wilayah. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berbeda dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan kemiskinan. Kebijakan yang bekerja di satu negara bisa jadi tidak relevan di negara lain dengan kondisi pasar kerja dan sektor informal yang berbeda.

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
6	Zhenshan Yang (2019)	Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas transfer dana pemerintah Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan, khususnya terhadap akumulasi modal manusia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi endogen. Studi juga bertujuan untuk mengidentifikasi ambang batas efektivitas dana dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah miskin, dengan menganalisis hubungan antara besarnya dana yang ditransfer dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Model regresi panel ambang batas efek tetap pada data dari 592 daerah dari tahun 2002 hingga 2015	Regresi ambang batas <i>Threshold Effect</i> Hansen (1996, 1999) yang menerapkan teknik regresi ambang batas untuk menyelidiki hubungan nonlinier antara kebijakan perangkap kemiskinan daerah-daerah. Penelitian menggunakan teori pertumbuhan endogen, yang menekankan pentingnya modal manusia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, digunakan juga teori ambang batas, yang menyatakan bahwa dana bantuan hanya efektif jika berada pada level tertentu—terlalu sedikit kurang berdampak, terlalu banyak bisa menimbulkan efek negatif.	Studi menganalisis pengaruh transfer dana pemerintah Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi di daerah miskin dengan data dari 592 daerah (2002–2015). Hasil menunjukkan adanya efek ambang batas: dana di bawah RMB 1.291 per kapita mendorong pertumbuhan, dana di atasnya justru menghambat, dan baru merangsang kembali jika melebihi RMB 4.469. Temuan menekankan pentingnya penggunaan dana yang tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan yang efektif.	Studi menekankan ambang batas kuantitatif dana, tetapi tidak mengevaluasi kualitas implementasi program atau efisiensi penggunaan dana tersebut.
7	Francesca Grasseti, Cristiana Mammana, Elisabetta Michetti (2018)	Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara globalisasi dan kemiskinan, serta bagaimana dinamika ekonomi dapat mempengaruhi	Regresi ambang batas <i>Threshold Effect</i>, Hansen (1996, 1999) yang menerapkan teknik regresi ambang batas untuk	Model yang dihasilkan digambarkan dengan peta diskontinu nonlinier yang menghasilkan jebakan kemiskinan dan dinamika yang	Model memberikan wawasan tentang dinamika jangka panjang dan perangkap kemiskinan, kebijakan ekonomi yang dapat mengintervensi

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Penelitian juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perangkap kemiskinan dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat membantu mengatasi masalah ini. Negara maju dan negara berkembang.	menyelidiki hubungan nonlinier antara kebijakan perangkap kemiskinan negara maju dan berkembang. Teori Penelitian menyelidiki dinamika kualitatif dan kuantitatif dari model pertumbuhan Solow–Swan dengan tabungan diferensial seperti yang diusulkan oleh Böhm dan Kaas (J Econ Dyn Control 24:965–980, 2000) dengan asumsi fungsi produksi Cobb–Douglas (SCD) yang bergeser (lihat Capasso et al. dalam Nonlinear Anal. 11:3858–3876, 2010)	kompleks. Selain itu, fenomena multistabilitas mungkin muncul: selain “lingkaran setan kemiskinan”, perilaku jangka panjang mungkin mencakup periode boom dan bust. yang kompleks dapat muncul, oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berupaya meningkatkan modal per kapita mungkin akan gagal dan perekonomian mungkin akan terjebak dalam perangkap kemiskinan. Model tersebut menyajikan cekungan yang kompleks sehingga kebijakan ekonomi dapat gagal dan ekonomi dapat terperangkap dalam perangkap kemiskinan bahkan ketika negara dengan tingkat modal per kapita yang cukup tinggi dipertimbangkan.	atau mengubah dinamika tersebut mungkin tidak dijelaskan secara rinci, sehingga tidak memberikan panduan langsung untuk pembuat kebijakan.
8	Ali Benabdenour, Sabrina Msakni and Wajdi Bardi (2018)	Studi mengusulkan untuk meneliti hubungan antara pembangunan keuangan, pembangunan ekonomi, dan kemiskinan untuk panel yang terdiri dari 49 negara di Eropa dan Amerika selama periode 2004-2017.	Regresi ambang batas <i>Threshold Effect</i> Dengan menggunakan model PTR yang dikembangkan oleh Hansen (1999), kami mengusulkan untuk memverifikasi bahwa hubungan antara pembangunan	Hasil utama menunjukkan bahwa efek pembangunan keuangan terhadap kemiskinan merupakan fungsi dari tingkat pembangunan ekonomi dan pembangunan keuangan. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa tingkat ambang batas yang	Penelitian belum memasukkan peran tata kelola, stabilitas politik, atau kualitas lembaga keuangan, yang juga dapat memengaruhi efektivitas pengembangan keuangan terhadap pengurangan kemiskinan.

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
			keuangan, pembangunan ekonomi, dan kemiskinan mungkin bersifat nonlinier. Kami harus mengidentifikasi, secara endogen, ambang batas yang terkait dengan pembangunan keuangan dan pembangunan ekonomi yang memisahkan rezim pertumbuhan yang berbeda.	terkait dengan pengembangan keuangan dan pembangunan ekonomi diperlukan untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pengembangan keuangan diperlukan dalam strategi pengurangan kemiskinan; kebijakan ekonomi ini harus cukup untuk menempatkan ekonomi di atas ambang batas dan berhasil memerangi kemiskinan.	
9	Richard C. Fording, William D. Berry (2007)	Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak pengeluaran kesejahteraan, khususnya bantuan tunai dan tunjangan upah, terhadap pengurangan kemiskinan, dengan memperhatikan ambang batas tertentu yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel seperti tingkat tunjangan tunai, upah pekerja tidak terampil, dan jenis bantuan (tunai vs. barang) dalam meningkatkan efektivitas kebijakan	Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis dan Model ambang batas <i>Threshold Effect</i> . Teori Trap Kemiskinan (Poverty Trap): Menggambarkan bagaimana individu atau rumah tangga yang terperangkap dalam kemiskinan mungkin tidak dapat keluar meskipun ada pertumbuhan ekonomi biasa, dan hanya dapat keluar jika ada intervensi atau bantuan yang lebih kuat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak bantuan tunai terhadap kemiskinan tergantung pada tiga faktor: tingkat tunjangan tunai, upah pekerja tidak terampil, dan proporsi bantuan tunai dibandingkan dengan bantuan barang. Sejak 1970-an, pengeluaran kesejahteraan semakin tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Namun, penurunan efektivitas ini terkait dengan cara tingkat kemiskinan diukur, yang meremehkan dampak sebenarnya	Tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi efektivitas pengeluaran kesejahteraan, seperti kebijakan luar negeri atau krisis ekonomi global.

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		kesejahteraan dalam mengurangi kemiskinan. Data tahunan gabungan dari 48 negara bagian kontinental untuk periode 1961–90. Amerika Serikat	Teori Kesejahteraan Sosial: Menekankan peran bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan, dengan fokus pada pengaruh tunjangan tunai terhadap tingkat kemiskinan.	dari peningkatan tunjangan kesejahteraan.	
10	Zhicheng Liang (2006)	Tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki hubungan antara globalisasi, kebijakan kemiskinan di China, dengan fokus pada dampak nonlinier globalisasi terhadap masyarakat miskin. Provinsi di Tiongkok selama periode 1986-2002. Dengan Sample Jumlah Penduduk Miskin.	Regresi ambang batas <i>Threshold Effect</i> Hansen (1999, 2000), jumlah dan lokasi efek ambang batas. Teori kemiskinan, Penelitian menggunakan teori ambang batas (threshold theory), yang menyatakan bahwa dampak globalisasi terhadap kemiskinan bersifat nonlinier, artinya globalisasi hanya memberikan manfaat bagi masyarakat miskin setelah ekonomi mencapai tingkat tertentu dalam proses globalisasi.	Tiongkok telah mengalami integrasi cepat dalam perekonomian global dan mencapai kemajuan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian empiris menunjukkan adanya ambang batas dalam hubungan antara globalisasi dan kemiskinan, di mana globalisasi hanya memberikan manfaat bagi masyarakat miskin setelah ekonomi mencapai ambang batas tertentu. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang mempercepat integrasi global dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi kaum miskin untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan.	Penelitian hanya memfokuskan pada hubungan antara globalisasi dan kemiskinan, sehingga faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, seperti reformasi domestik, kebijakan sosial, atau perubahan teknologi, tidak dianalisis secara mendalam.
11	Walter Enders, Gary A. Hoover (2003)	Penelitian bertujuan untuk menganalisis	Ordinary Least Squares (OLS)	Penelitian menunjukkan	Meskipun model nonlinier lebih

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
		dampak nonlinier dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, serta mengevaluasi peran kebijakan transfer pemerintah dan faktor-faktor lain seperti jumlah kepala rumah tangga perempuan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian juga bertujuan untuk membandingkan efektivitas model nonlinier, seperti regresi ambang batas dan pendekatan Fourier, dengan model linier standar dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Data selama periode sampel 1961–1996, Amerika Serikat.	regression analysis dan Model ambang batas <i>Threshold Effect</i>. Teori Trap Kemiskinan menjelaskan bahwa individu atau negara yang terperangkap dalam kemiskinan ekstrem kesulitan untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi biasa. Mereka hanya dapat keluar dari kemiskinan jika ada pertumbuhan yang cukup kuat. Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow, Amartya Sen, dan David R. Weil, yang menyoroti keterbatasan akses terhadap modal, keterampilan, dan peluang sebagai faktor utama.	bahwa model nonlinier seperti regresi ambang batas dan pendekatan Fourier lebih akurat dalam menjelaskan dinamika kemiskinan dibanding model linier. Pertumbuhan ekonomi yang kuat terbukti secara signifikan mengurangi kemiskinan, terutama bagi kelompok berpendidikan rendah yang sebelumnya tidak tersentuh oleh pertumbuhan biasa. Selain itu, peningkatan jumlah kepala rumah tangga perempuan cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan. Kebijakan transfer langsung dan dukungan pemerintah menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan.	akurat dibandingkan model linier, kompleksitas model tersebut dapat membuatnya lebih sulit untuk diinterpretasikan dan diterapkan dalam kebijakan praktis.
12	Penelitian 2025	Data menggunakan data time series 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2022 sebagai sampel untuk analisis pengaruh ambang batas.	Teori Trap Kemiskinan (Poverty Trap): Menggambarkan bagaimana individu atau rumah tangga yang terperangkap dalam kemiskinan mungkin tidak dapat keluar meskipun ada pertumbuhan ekonomi biasa,	Studi menganalisis pengaruh program bantuan tunai dan non-tunai pemerintah Indonesia terhadap pendapatan masyarakat miskin (Pov1) dan garis kemiskinan (Pov2) dengan regresi sebanyak 138 regresi (2002–2015). Hasil akan menunjukkan adanya efek	Studi membatasi hanya pada dua variabel program menanggulangi kemiskinan menjadi dua program Pro-Poor yaitu bantuan non tunai (BPNT) dan bantuan tunai (PKH). Studi juga membatasi penelitian pada basis data 34

Tabel 1.1 Lanjutan

No	Penelitian	Tujuan dan Objek Penelitian	Dasar Teori dan Variabel Utama	Hasil Penelitian	Keterbatasan
			dan hanya dapat keluar jika ada intervensi atau bantuan yang lebih kuat. Teori Kesejahteraan Sosial: Menekankan peran bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan, dengan fokus pada pengaruh tunjangan tunai terhadap tingkat kemiskinan. Model ambang batas Threshold Effect	ambang batas pada masing-masing provinsi di Indonesia sejak 2000-2022.	provinsi dengan jangka waktu selama 23 tahun sejak 2000 sampai 2023.

Sumber: Penelitian, 2025

Tabel 1.1 memberikan landasan yang penting sekaligus memperlihatkan keterbatasan studi sebelumnya. Anggrasari dan Hanri (2025) menganalisis data series 34 provinsi menggunakan model regresi ambang batas dan menemukan efek threshold dalam pengaruh bantuan sosial terhadap pendapatan masyarakat miskin namun belum menangkap interaksi non-linear dengan variabel sosial-ekonomi lain seperti pendidikan dan ketenagakerjaan. Studi Anis Ochi dan Saidi (2023) mengemukakan bahwa kualitas tata kelola daerah berpengaruh ambang batas signifikan terhadap penurunan kemiskinan, namun belum mengintegrasikan evaluasi program BPNT dan PKH secara simultan.

Studi lain seperti Zhenshan Yang (2019) dan Francesca Grasseti dkk., (2018) memberikan bukti empiris adanya efek ambang batas pada hubungan pengelolaan dana, globalisasi, dan kemiskinan, menegaskan pentingnya mempertimbangkan non-linearitas dalam analisis kebijakan sosial. Namun, studi-studi lebih banyak berfokus pada konteks internasional dan belum mengkaji fenomena tersebut secara rinci di tingkat provinsi di Indonesia dengan pendekatan longitudinal dan komprehensif. Shanping Wang (2024) juga mengidentifikasi nilai ambang batas dalam pengentasan kemiskinan dengan kebijakan berbeda antar daerah, namun

belum membahas secara khusus peran program BPNT dan PKH.

Studi empiri terdahulu memperlihatkan kurangnya bahasan mengenai pengaruh program bantuan dengan karakteristik wilayah. Penelitian akan mengisi gap tersebut dengan menggunakan metode regresi ambang batas (*threshold regression*). Model menganalisis bagaimana pengaruh program BPNT dan PKH yang bervariasi dan berubah ketika suatu wilayah melewati ambang batas sosial-ekonomi tertentu. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih akurat mengenai variasi efektifitas intervensi kebijakan serta rumusan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti sesuai kondisi riil tiap wilayah di Indonesia.

Terdapat gap literatur yang signifikan terkait minimnya penggunaan model regresi ambang batas untuk secara simultan mengkaji pengaruh BPNT dan PKH di tingkat provinsi di Indonesia. Mayoritas penelitian sebelumnya masih mengandalkan asumsi linier dan data agregat nasional, mengabaikan variasi kontekstual antar wilayah sehingga belum dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan mekanisme kebijakan bantuan sosial. Penelitian berupaya menutup gap tersebut dengan menerapkan model *threshold regression* yang menangkap hubungan non-linier dan efek ambang batas, serta mengintegrasikan evaluasi kebijakan berbasis wilayah dan waktu secara komprehensif. Pernyataan kesenjangan penelitian secara eksplisit mengacu pada penelitian-penelitian utama dalam penelitian dan menegaskan keunikan serta kebutuhan penelitian.

Disertasi menghadirkan pendekatan baru yang signifikan dalam kajian penanggulangan kemiskinan melalui BPNT dan PKH di tingkat provinsi di Indonesia. Kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada penerapan metode statistik yang inovatif, yaitu model regresi ambang batas (*threshold regression*), tetapi juga pada pemetaan empiris yang mendalam serta pengaruh kebijakan yang dikaji komprehensif. Penelitian model ambang batas (*threshold*) akan berbeda dari sebagian besar studi terdahulu yang umumnya menggunakan analisis regresi sederhana dengan asumsi linieritas dan data nasional agregat. Hasil studi akan

menganalisis variasi pengaruh program dalam cakupan wilayah yang heterogen dan perubahan pengaruh yang tidak selalu linier. Efek ambang batas akan memperhitungkan pengaruh implementasi kebijakan sosial selama periode jangka panjang. Penelitian akan memberikan kontribusi baik dari sisi empiris maupun implikasi kebijakan yang lebih responsif terhadap potensi dan karakteristik setiap daerah.

1.6 Kebaruan Penelitian

1) Kebaruan Empiris

- a. Kebaruan empiris penelitian terletak pada hasil evaluasi efektivitas kebijakan nasional yang berbasis provinsi sesuai dengan potensi dan karakter wilayah masing-masing. Penelitian menunjukkan bahwa BPNT dan PKH tidak menghasilkan satu kebijakan nasional yang seragam tetapi membentuk rezim efektivitas yang beragam. Model ambang batas menghasilkan analisis provinsi tanpa pengaruh signifikan, provinsi yang baru merespons pada ambang batas bawah, dan provinsi yang mencapai ambang batas atas sehingga manfaat program benar-benar tercermin pada pendapatan dan pengeluaran rumah tangga miskin. Temuan ini memberikan dasar empiris bagi perubahan desain kebijakan nasional yang homogen menjadi pendekatan yang mengadopsi potensi dan karakter sesuai tipologi wilayah, seperti provinsi dengan kemiskinan struktural pertanian, kemiskinan perkotaan, maupun wilayah terpencil yang membutuhkan konfigurasi intervensi khusus.
- b. Penelitian ini secara eksplisit berbeda dari studi terdahulu karena secara khusus memfokuskan dua program pro-poor utama Indonesia, BPNT (non-tunai) dan PKH (tunai bersyarat) yang dianalisis sekaligus dari sisi pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin pada tingkat provinsi. Keterbaruan empiris muncul ketika model penelitian mampu mengidentifikasi provinsi yang responsif dan tidak responsif terhadap BPNT dan PKH, membedakan peran BPNT sebagai pelindung konsumsi pangan dan PKH sebagai pengungkit pendapatan dan pengeluaran yang lebih luas, serta menunjukkan bahwa efektivitas kedua program sangat

dipengaruhi oleh karakter struktural dan sosial ekonomi wilayah.

- c. Penggunaan deret waktu panjang 2000–2022 untuk 34 provinsi memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap dinamika dan kluster pengaruh provinsi responsif dan tidak responsif terhadap BPNT dan PKH, baik pada aspek pendapatan maupun pengeluaran. Hasil perhitungan penelitian akan memamparkan ratusan estimasi ambang batas. Penelitian mampu menangkap variasi makroekonomi dan perbedaan implementasi program yang belum dihasilkan dari studi sebelumnya dengan analisis data yang lebih pendek.

2) Kebaruan Implikasi

- a. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan unit analisis negara dan indikator agregat dalam model regresi ambang batas untuk mengkaji kebijakan program kemiskinan. Penelitian terdahulu hanya mampu menangkap pola rata-rata makro. Kemiskinan diposisikan sebagai fenomena nasional yang relatif homogen sehingga kemiskinan lebih banyak dinilai dari perubahan indikator agregat. Implikasi kebijakan pada model penelitian kali ini secara khusus menganalisis bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dilihat dari sisi pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin pada unit provinsi. Hasil penelitian selanjutnya mampu menangkap heterogenitas kebijakan yang dapat disesuaikan dengan struktural dan karakteristik sosial ekonomi antarprovinsi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan implikasi kebijakan baru yang tidak sekadar menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh kebijakan secara nasional namun juga menentukan efektivitas BPNT dan PKH berdasarkan karakter wilayah masing-masing provinsi. Analisis implikasi masing-masing provinsi menghasilkan kluster kebijakan yang operasional bagi perencana di tingkat pusat dan daerah.
- b. Penelitian dengan basis data jangka waktu panjang memperkaya hasil analisis kuantitatif penelitian sebelumnya sehingga model memberikan dasar yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti dan sensitif

terhadap tantangan serta keunggulan di tiap wilayah. Kebijakan disusun dengan menganalisis pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin selama lebih dari dua decade. Kebijakan disusun dari pola jangka panjang yang memperlihatkan konsistensi, kemunduran, atau pergeseran efektivitas BPNT dan PKH di masing-masing provinsi. Pola ini memungkinkan perumusan kebijakan yang mampu menyusun peta jalan penanggulangan kemiskinan yang bersifat dinamis, bertahap, dan terukur terhadap respons empiris tiap provinsi dari waktu ke waktu, bukan sekadar menetapkan target nasional yang seragam dan statis.

Penelitian memungkinkan analisis yang bersifat berkelanjutan dan lebih komprehensif oleh karena penelitian juga menghasilkan kontribusi dari beberapa aspek kontribusi berikut:

1) Kontribusi Empiris

- a. Kontribusi empiris penelitian ini terletak pada penyediaan bukti kuantitatif yang langsung operasional bagi evaluasi program penanggulangan kemiskinan berbasis provinsi. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas BPNT dan PKH berbeda antar wilayah. Analisis efektivitas dimulai dari provinsi yang tidak merespons, provinsi yang baru merespons pada ambang batas bawah, hingga provinsi yang telah mencapai ambang batas atas sehingga dampak program tercermin nyata pada pendapatan dan pengeluaran rumah tangga miskin. Studi ini berkontribusi pada penguatan argumen empiris bahwa kebijakan nasional perlu mengadopsi potensi dan karakter tipologi wilayah. Pemetaan rezim efektivitas ini menjadi kontribusi empiris penting karena menyediakan dasar kuantitatif yang jelas untuk merancang intervensi yang berbeda antara provinsi dengan kemiskinan struktural di sektor pertanian, provinsi dengan kemiskinan perkotaan, serta wilayah terpencil dengan keterbatasan akses.

- b. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menyajikan bukti kuantitatif yang secara langsung membedakan efektivitas dua program pro-poor utama, BPNT dan PKH, terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin pada tingkat provinsi, sekaligus dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Dengan kemampuan mengidentifikasi provinsi yang responsif dan tidak responsif terhadap masing-masing program, studi ini menghasilkan peta empiris yang menunjukkan di mana BPNT efektif sebagai pelindung konsumsi pangan dan di mana PKH berfungsi sebagai pengungkit pendapatan dan pengeluaran yang lebih luas. Temuan tersebut memperkaya literatur karena menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain nasionalnya, tetapi juga oleh karakter struktural dan sosial ekonomi wilayah, sehingga menyediakan dasar empiris yang kuat bagi perumusan strategi diferensiasi kebijakan BPNT dan PKH antarprovinsi.
- c. Kontribusi empiris penelitian ini terletak pada penyediaan analisis berkelanjutan yang mendalam melalui deret waktu panjang 2000–2022 untuk 34 provinsi. Analisis tersebut memungkinkan identifikasi dinamika dan kluster provinsi responsif serta tidak responsif terhadap BPNT dan PKH pada aspek pendapatan dan pengeluaran. Dengan ratusan estimasi ambang batas, studi ini berkontribusi dengan menangkap variasi makroekonomi, perubahan implementasi program, serta pengaruh efektivitas yang tidak dapat dihasilkan oleh penelitian sebelumnya dengan horizon data lebih pendek. Temuan ini memperkaya literatur empiris karena memberikan peta bukti kuantitatif yang komprehensif tentang bagaimana efektivitas program berubah seiring waktu di berbagai konteks provinsi, sehingga menjadi dasar yang lebih kokoh untuk merancang strategi penanggulangan kemiskinan yang adaptif terhadap tren jangka panjang.

2) Kontribusi Kebijakan

- a. Penelitian berkontribusi pada ranah kebijakan dengan menyediakan evaluasi berbasis wilayah dari dua sisi program pro-poor. Temuan

menghubungkan nilai koefisien efektivitas program dengan mekanisme non-linear sehingga memberikan wawasan yang lebih tajam kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang adaptif dan berbasis bukti. Pendekatan komparatif antara BPNT dan PKH memungkinkan perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, efisien, serta sensitif terhadap keunggulan dan tantangan di masing-masing wilayah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keberlanjutan dan dampak program bantuan sosial di Indonesia.

- b. Penelitian ini memberikan kontribusi kebijakan dengan menyediakan dasar empiris untuk merancang strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak lagi berbasis target nasional yang seragam, tetapi bertumpu pada pola jangka panjang pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin di tiap provinsi. Hasil perhitungan mampu membaca konsistensi, kemunduran, dan pergeseran efektivitas BPNT dan PKH selama lebih dari dua dekade. Penelitian ini memungkinkan perumus kebijakan menyusun peta jalan penanggulangan kemiskinan yang dinamis dan bertahap. Kebijakan disesuaikan dengan kondisi provinsi masing-masing. Provinsi yang konsisten responsif dapat diarahkan pada penguatan program produktif, provinsi yang stagnan atau mundur memerlukan redesain kombinasi dan besaran bantuan serta perbaikan implementasi, sementara provinsi yang belum responsif membutuhkan intervensi struktural pendukung sebelum skala bantuan ditingkatkan. Dengan demikian, kontribusi kebijakannya adalah penguatan kerangka perencanaan berbasis bukti jangka panjang yang sensitif terhadap tantangan dan keunggulan masing-masing wilayah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat nasional dapat dioperasionalkan dalam bentuk rute berbeda untuk tiap provinsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan menyelidiki bagaimana dan mengapa ekonomi suatu negara atau daerah berkembang seiring waktu. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi, termasuk teori klasik yang menekankan peran akumulasi modal dan tenaga kerja hingga teori modern yang menggabungkan kebijakan ekonomi, inovasi, dan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi berfokus pada faktor-faktor yang mendorong peningkatan output ekonomi, pendapatan per kapita, dan kemakmuran dalam jangka panjang. Memahami teori pertumbuhan ekonomi membantu menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi dan dinamikanya..

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Aktivitas ekonomi merupakan proses yang memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa lama proses tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akhirnya aktivitas ekonomi menimbulkan aliran balas jasa kepada masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. (Mankiew, 2003). Perkembangan ekonomi dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebut pertumbuhan ekonomi, yang selalu diukur dalam persen (Sukirno, 2010). Peningkatan *Gross Domestic Product (GDP)* dan *Gross National Product (GNP)* adalah indikator utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terdiri dari tiga komponen. Pertama, akumulasi modal, yang mencakup semua jenis investasi baru pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Kedua, peningkatan populasi mengikuti peningkatan angkatan kerja dalam beberapa tahun berikutnya. Ketiga, kemajuan

dalam bidang teknologi (Todaro, 2003).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh komponen ekonomi regional, adalah konteks ekonomi yang sering digunakan. Namun, pendapatan per kapita adalah total pendapatan wilayah atau daerah dibagi dengan populasinya pada tahun yang sama (Tarigan, 2005). Sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi adalah empat komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi neoklasik menekankan modal dan tenaga kerja serta perkembangan teknologi sebagai elemen baru, sumber daya alam tidak diperlukan untuk keberhasilan ekonomi modern (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dihitung dengan menggunakan harga berlaku dan harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku, juga dikenal sebagai PDB nominal, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. PDB atas dasar harga konstan, juga dikenal sebagai PDB riil, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai harga dasar (Kuncoro, 2013).

Pertumbuhan ekonomi regional (provinsi atau kab) atau PDRB dapat diukur dengan menghitung persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari periode ke periode. Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang, dengan fokus pada proses karena proses mengandung elemen dinamis yang menunjukkan perubahan atau perkembangan, sehingga laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu (Widodo, 1990).

$$\Delta PDRB_i = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\Delta PDRB_i$ = Laju pertumbuhan ekonomi (rate of growth)
i = Tahun tertentu

(t-i) = Tahun sebelum tertentu tersebut
 PDRB = Produk domestik regional bruto

2.1.2 PDRB Per kapita

PDRB per kapita adalah indikator yang menunjukkan nilai produk domestik per penduduk rata-rata, atau nilai barang dan jasa yang secara potensial dapat diterima setiap individu. Data per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB (atas dasar harga konstan dan harga berlaku) dengan jumlah penduduk (pertengahan tahun). Pendapatan per kapita nasional atau regional dapat digunakan sebagai ukuran kemakmuran. PDRB per kapita adalah ukuran yang lebih baik. (Manalu dkk., 2024) (Sawitri, 2022).

2.1.3 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama periode tertentu. Perhitungan PDB dapat dilakukan dari kedua sisi permintaan dan penawaran, masing-masing. Pertumbuhan ekonomi melalui sisi permintaan disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi melalui sisi penawaran disebabkan oleh penurunan harga barang dan jasa. Ada banyak literatur dan model empiris yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi dan non-ekonomi terhadap pertumbuhan. Hubungan fungsional antara variabel dependen dan sejumlah variabel penjelas menunjukkan model pertumbuhan. Model pertumbuhan Neo-klasik mendasarkan analisisnya pada model fungsi produksi Cobb-Douglas: (Mankiw, 2000), (Barro, Sala-i-Martin, 1995):

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

Y_t : Tingkat pertumbuhan pada tahun t.
 A_t : Tingkat kemajuan teknologi pada tahun t.
 K_t : Jumlah stok modal pada tahun t.
 L_t : Jumlah tenaga kerja pada tahun t.
 α, β : Elastisitas Produksi dari input Modal dan Tenaga Kerja

Mankiw (2000), Barro, Sala-i-Martin (1995), Barro (2004) menyatakan bahwa model pertumbuhan neo-klasik berpendapat bahwa fungsi produksi memiliki

pengembalian skala konstan (pengembalian skala konstan), berlakunya hasil yang semakin menurun untuk setiap input (pengembalian yang menurun), dan elastisitas penggantian positif untuk setiap input.:

$$Y = F(K, L)$$

Kondisi *constan returns to scale* (pengembalian skala konstan) terhadap output dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = F(K, L) = L \cdot F(K/L, 1) = L \cdot f(k)$$

$k = K/L$ adalah rasio modal per tenaga kerja.

$y = Y/L$ adalah menunjukkan jumlah output per pekerja.

Persediaan kapital dipengaruhi oleh dua kekuatan yang saling berpengaruh: investasi (i) dan penyusutan. Tingkat output suatu perekonomian dapat berubah sepanjang waktu dan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi (δ). Investasi meningkatkan persediaan modal dengan membeli barang baru, sementara penyusutan (δ) mengurangi penggunaan modal. Investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan kapital per pekerja dinyatakan sebagai berikut:

$$i = s f(k)$$

$$\Delta k = i - \delta k$$

Output y dan investasi i meningkat seiring dengan peningkatan persediaan kapital, tetapi sebaliknya, penyusutan meningkat. Proses produksi akan berlanjut sampai tingkat penyusutan (δ) sama dengan investasi (i). Jika perekonomian berada pada tingkat persediaan kapital tunggal k^* (investasi dan penyusutan seimbang) dimana $\Delta k = 0$, maka perekonomian berada pada kondisi mapan k^* . Tingkat persediaan kapital mapan menunjukkan keseimbangan perekonomian dalam jangka panjang.

Model pertumbuhan neo-klasik mengatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara dan perbedaan kemakmuran daerah di dalamnya. Perbedaan kemakmuran antar daerah cenderung meningkat pada awal pembangunan tetapi perbedaan cenderung menurun setelah pembangunan berlangsung lama.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Keynes

Teori pertumbuhan Keynes mengemukakan bahwa faktor penentu u pertumbuhan ekonomi adalah *aggregate demand* (AD), yang dikendalikan oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor, serta kemampuan untuk memenuhi permintaan jasa dan barang dalam perekonomian. Persamaan Teori Pertumbuhan Keynes:

$$Y = (C + I + G) + X - M$$

Sisi permintaan agregat sangat penting dalam teori Keynes. Keynes berpendapat bahwa investasi dapat berfungsi sebagai jembatan penengah atau solusi alternatif dalam kasus di mana permintaan efektif tidak tercapai menyebabkan ketidakseimbangan antara konsumsi dan pendapatan. Ini karena efek multiplier peningkatan investasi juga akan meningkatkan pendapatan (Krugman, 2018). Program kesejahteraan dan kesejahteraan negara sangat bergantung pada intervensi pemerintah. Pemerintah sangat bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan ekonomi, baik dari skala individu, perusahaan hingga ekonomi nasional.

Menurut Krugman (2018), ketimpangan standar hidup yang semakin meningkat karena kesenjangan pendapatan yang semakin besar menyebabkan negara berkembang, yang merupakan kelompok terpinggirkan, tertindas secara ekonomi dan bergerak menghantam arus globalisasi. Pengeluaran pemerintah (G) secara teoretis menjadi alat penting untuk memerangi kemiskinan karena:

- a) Meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah,
- b) Mendorong penciptaan lapangan kerja.
- c) Memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,
- d) Mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui program redistributif.

Pendekatan kesejahteraan negara menegaskan bahwa intervensi pemerintah sangat penting untuk memperbaiki ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Salah satu landasan teoretis utama untuk menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengarah pada penurunan kemiskinan yang signifikan adalah kegagalan pasar. Menurut Stiglitz (1989), ketika pasar tidak dapat mendistribusikan sumber

daya secara optimal, terjadi kegagalan pasar. Struktur harga dan output yang dihasilkan tidak merefleksikan nilai sosial yang sebenarnya sehingga kelompok berpendapatan rendah memiliki akses yang terbatas terhadap layanan publik seperti pendidikan dan faktor produksi yang sangat penting untuk mobilitas ekonomi dan peningkatan produktivitas. Kepastian distribusi manfaat pembangunan yang lebih inklusif dan memperkuat kapasitas sosial-ekonomi penting bagi kelompok rentan dalam kerangka pertumbuhan berkelanjutan. Negara harus intervensi melalui instrumen kebijakan sosial, program redistribusi pendapatan, dan penyediaan layanan publik. Kegagalan penyediaan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan struktural. Mekanisme pasar tidak memiliki insentif untuk menyediakan barang tersebut secara adil dan merata. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa kegagalan pasar tanpa intervensi pemerintah dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang eksklusif, atau pertumbuhan yang tidak inklusif, di mana kelompok tertentu menerima manfaat pembangunan dan kelompok miskin tetap terpinggirkan dari akses dan hasil pembangunan. Instrumen utama untuk mengoreksi distorsi adalah intervensi pemerintah melalui kebijakan redistribusi, penyediaan barang publik, dan regulasi pasar yang kuat. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, intervensi pemerintah diperlukan. Intervensi ini juga harus membantu masyarakat berpendapatan rendah lebih mampu berpartisipasi secara produktif dalam aktivitas ekonomi.

2.2 Teori Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan harga, atau kenaikan harga yang berkelanjutan (Mankiw, 2006). Inflasi didefinisikan kenaikan harga yang terus meningkat dengan cepat (Mishkin, 2008). Salah satu ukuran ekonomi yang paling penting adalah inflasi. Dua dari banyak variabel yang dapat memengaruhi inflasi adalah tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Inflasi tidak berarti harga barang naik dengan persentase yang sama. Kenaikan harga barang dapat terjadi pada waktu yang berbeda, tetapi harga umum barang harus naik secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Teori kuantitas, teori Keynes, dan teori

strukturalisme merupakan bagian dari teori inflasi (Mishkin, 2008):

1. Teori Kuantitas; PDRB menggambarkan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu, sehingga menjadi indikator utama untuk menilai kinerja ekonomi wilayah tersebut secara makro. Pertumbuhan ekonomi sendiri umumnya diukur dari persentase perubahan PDRB riil (harga konstan) dari satu tahun ke tahun berikutnya, sehingga setiap kenaikan atau penurunan PDRB riil langsung tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, PDRB berperan sebagai dasar perhitungan dan cermin dari dinamika pertumbuhan ekonomi. PDRB riil akan tumbuh ketika aktivitas produksi meningkat dan pertumbuhan ekonomi tercatat positif serta menunjukkan ekspansi ekonomi. Sebaliknya, stagnasi atau penurunan PDRB riil mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi yang berpotensi memengaruhi pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
2. Teori Keynes; Keynes tidak sepenuhnya setuju dengan teori kuantitas uang karena menganggap ekonomi berada dalam kondisi full employment, atau kapasitas ekonomi penuh. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa penambahan jumlah uang beredar justru akan meningkatkan output. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan meningkat namun tingkat harga tidak akan meningkat karena penambahan jumlah uang beredar serta uang tidak netral sepenuhnya.
3. Teori strukturalisme; Teori struktural menyatakan bahwa inflasi di negara berkembang muncul akibat kekakuan struktur ekonomi. Masalah pertama adalah ketidakelastisan pendapatan ekspor, di mana pertumbuhan ekspor lebih lambat daripada industri lain karena produksi barang ekspor kurang responsif terhadap kenaikan harga, sehingga menyulitkan impor barang esensial. Masalah kedua meliputi produksi pangan domestik yang tidak elastis, sehingga pasokannya tak mampu mengejar pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita, yang memicu kenaikan harga makanan, tuntutan upah pekerja, serta biaya produksi secara keseluruhan. Kebijakan substitusi impor dengan biaya tinggi juga memperburuk inflasi.

2.3 Konsep Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Beberapa peraturan perundangan yang membahas IPKD antara lain; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 juga membahas tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah juga digunakan (bkad.sulselprov.go.id). IPKD merupakan satuan ukuran yang dibuat berdasarkan berbagai faktor dan metrik untuk mengevaluasi kualitas manajemen keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel selama jangka waktu yang ditetapkan. Pengukuran IPKD untuk provinsi dilakukan oleh Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri. Pengukuran untuk kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui badan penelitian dan pengembangan provinsi atau setara. Pengukuran ini mencakup elemen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD per 1 tahun sebelum tahun berjalan.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 menetapkan bahwa IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi yang terdiri dari indikator-indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam suatu periode tertentu. Permendagri Nomor 19 tahun 2020 menyatakan bahwa IPKD diukur dengan 6 dimensi, dan masing-masing dimensi mencakup metrik tertentu, seperti yang tercantum di bawah ini:

1. Kesesuaian antara dokumen perencanaan keuangan dengan penganggaran keuangan, mencakup indikator:
 - a) Kesesuaian nomenklatur program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) merupakan penilaian kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang ada pada dokumen RPJMD dan RKPD. Penilaian kesesuaian program dilakukan untuk program pada urusan pemerintahan daerah.

- b) Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS merupakan penilaian kesesuaian nomenklatur program pada RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilakukan terhadap adanya kesesuaian program pada masing-masing urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah dengan memperhatikan nomenklatur program yang ada pada dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - c) Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diukur dengan mencermati adanya kesesuaian program pada masing-masing urusan pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum dalam KUA-PPAS dan APBD.
 - d) Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS merupakan penilaian kesesuaian pagu program pada RKPD dan KUA-PPAS ditekankan pada penilaian kesesuaian jumlah pagu per program pada dokumen tersebut dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tersedia.
 - e) Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD merupakan penilaian kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD ditekankan pada penilaian kesesuaian jumlah pagu per program pada dokumen KUA-PPAS dan APBD dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tersedia.
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup indikator:
- a) Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%.
 - b) Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% di luar gaji.
 - c) Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer.
 - d) Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi atau dokumen terkait

pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat dikenal sebagai transparansi pengelolaan keuangan daerah. Beberapa indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah termasuk:

1. Ketepatan waktu ditemukan saat seseorang dapat mengetahui seberapa cepat informasi atau dokumen pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersedia di *website* atau situs web resmi pemerintah daerah atau melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Informasi atau dokumen pengelolaan keuangan harus tersedia dalam kurun waktu 30 hari setelah dokumen pengelolaan keuangan dirilis.
2. Akses dapat diukur dengan kesediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah untuk diakses secara umum dan terbuka untuk publik melalui *website* atau situs resmi dari pemerintah daerah ataupun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Penyerapan anggaran belanja merupakan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dari anggaran belanja yang sudah direncanakan dalam APBD. Penilaian penyerapan anggaran dilakukan terhadap persentase ketercapaian minimal 80% antara anggaran belanja yang sudah dianggarkan dalam APBD dengan realisasi anggaran yang terjadi pada tahun anggaran. Penyerapan anggaran belanja mencakup indikator berikut:
 - a) Penyerapan anggaran belanja operasional
 - b) Penyerapan anggaran belanja modal
 - c) Penyerapan anggaran belanja tidak terduga
 - d) Penyerapan anggaran belanja transfer
5. Kondisi keuangan daerah Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian diluar rencana yang mungkin terjadi, dan untuk melaksanakan keuangan secara efisien dan efektif. Dimensi kondisi keuangan daerah mencakup indikator berikut:
 - a) Kemandirian keuangan
 - b) Fleksibilitas keuangan
 - c) Solvabilitas operasional
 - d) Solvabilitas jangka pendek

- e) Solvabilitas jangka panjang
 - f) Solvabilitas layanan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut. Opini BPK atas LKPD diberikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Studi terkait IPKD menemukan rasio kemandirian fiskal daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi tidak otomatis menurunkan kemiskinan. *Fiscal rigidity* mengalokasikan PAD ke belanja rutin birokrasi. Hal itu membatasi ruang fiskal untuk program *pro-poor*. (Ardella Wahyu Luthvia, 2023).

2.4 Teori Kemiskinan

Teori kemiskinan telah berkembang melalui berbagai perspektif dan pendekatan, dengan banyak ahli yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang fenomena kemiskinan.

2.4.1 Teori Kemiskinan oleh Nurske

Nurkse (1961) berbicara tentang fenomena yang dikenal sebagai "lingkaran setan" kemiskinan yang berdampak pada masyarakat miskin di negara-negara miskin. Tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh kemampuan menabung yang rendah dan kapasitas modal untuk investasi yang rendah. Proses melingkar terjadi jika tidak ada intervensi dari luar, yang membuat sulit bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan (Muhammad Nurjihadi, 2002). Konsep lingkaran setan kemiskinan yang dinyatakan oleh Nurkse berargumen bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, antara lain:

- a) Pendapatan Rendah: Kemiskinan seringkali melibatkan individu atau keluarga dengan pendapatan yang sangat rendah, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b) Kurangnya Tabungan: Kemampuan untuk menabung menjadi sangat terbatas ketika Anda memiliki pendapatan yang rendah. Tidak mungkin bagi orang

- untuk menginvestasikan uang dalam pendidikan, kesehatan, atau bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan mereka jika mereka tidak memiliki tabungan.
- c) Keterbatasan Modal: Tidak cukup tabungan menyebabkan kurangnya modal untuk investasi dalam usaha produktif. Rendahnya produktivitas menyebabkan lebih sedikit pendapatan.
 - d) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan: Pelatihan dan pendidikan sering tidak tersedia bagi individu yang hidup dalam kemiskinan sehingga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau meningkatkan keterampilan mereka.

Nurkse menyatakan bahwa kondisi kemiskinan yang berkelanjutan menciptakan siklus kemiskinan yang berulang. Saat individu tidak memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik maka akan tercipta halangan untuk menghasilkan lebih banyak uang, ini merupakan salah satu tanda kemiskinan. Individu juga tidak dapat melakukan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup karena tidak dapat menabung. Teori Nurkse menekankan betapa pentingnya tindakan kebijakan untuk menghentikan kemiskinan berulang. Masyarakat dapat keluar dari lingkaran setan kemiskinan melalui kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan, memberikan akses ke pendidikan dan mendorong investasi dalam modal. Pemahaman teori lingkaran setan kemiskinan berperan penting dalam strategi pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.

2.4.2 Teori Kemiskinan oleh Myrdal

Myrdal (1964) menyatakan bahwa daerah miskin mengalami tabungan rendah sehingga investasi pun rendah. Investasi rendah menyebabkan produktivitas rendah dan pendapatan daerah tetap rendah. Siklus ini terus berulang terutama di pedesaan Asia Selatan. Myrdal memahami sistem sosial negara Asia Selatan sebagai jaringan kondisi kausal yang saling terkait sehingga perubahan satu kondisi memengaruhi kondisi lain. Myrdal mengelompokkan kondisi tersebut menjadi enam kategori yaitu output dan pendapatan kondisi produksi tingkat kehidupan pandangan hidup kerja organisasi sosial serta kebijakan. Pendapatan kondisi produksi dan tingkat kehidupan termasuk faktor ekonomi meskipun

sebagian ahli hanya menganggap pendapatan dan kondisi produksi sebagai faktor ekonomi (Galanter, n.d.). Pendapatan, kondisi produksi, dan tingkat kehidupan termasuk faktor ekonomi meskipun sebagian ahli hanya menganggap pendapatan serta kondisi produksi sebagai faktor ekonomi. Unsur-unsur ekonomi berperan dalam penyebab kemiskinan tetapi bukan satu-satunya faktor. Negara sedang maupun berkembang membutuhkan teori kemiskinan yang dipengaruhi oleh perbedaan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya (Hasmin, 2011).

2.4.3 Teori Kemiskinan oleh David Ricardo; Kemiskinan Absolut dan Relatif

Ricardo membedakan kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut terjadi ketika individu gagal memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan pakaian dan tempat tinggal sehingga diukur dari pendapatan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan relatif muncul ketika individu memiliki pendapatan cukup untuk kebutuhan dasar namun jauh di bawah rata-rata masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kesenjangan sosial. Ricardo memandang kemiskinan bukan hanya akibat kurangnya sumber daya tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antara populasi dan ekonomi (Dinar dkk., 2018). Berdasarkan pendapat Ricardo terkait kemiskinan maka perlu ada perhatian terhadap kebijakan yang memengaruhi upah dan pertumbuhan populasi, serta distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Kebijakan- kebijakan tersebut menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan (Ginting dkk., 2010).

2.4.4 Teori Pengembangan oleh Barrett, Carter, dan Ikegami (BCI) (2007)

Model BCI mempertimbangkan manfaat tanpa perubahan ekonomi dan menyederhanakan wawasan tentang kemiskinan kronis serta ambang batas aset. Model sederhana ini menyarankan ukuran kerentanan beserta dampaknya terhadap kemiskinan kronis saat dipadukan dengan analisis guncangan dan risiko (Carter & Ikegami, 2012).

2.5 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan telah ada sejak munculnya peradaban manusia di bumi. Kemiskinan menjadi indikator utama ketertinggalan suatu negara. (Bappenas, 2014) membagi konsep kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan relatif (*relative poverty*)

dan kemiskinan absolut (*absoulut poverty*). Kemiskinan relatif terjadi karena individu gagal memenuhi kebutuhan dasar akibat kebijakan pembangunan yang menimbulkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Kemiskinan absolut muncul ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar seperti sandang pangan kesehatan pendidikan serta air bersih.

Elesh (1970) menyatakan bahwa kemiskinan kultural muncul akibat jebakan perilaku internal individu atau kelompok masyarakat sehingga menghambat mobilitas sosial mereka. Kemiskinan struktural terjadi karena faktor eksternal seperti aturan yang tidak berpihak pada individu miskin sehingga membatasi kesempatan kerja pendidikan dan kesehatan layak. Konsep kemiskinan mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok rendahnya kemampuan ekonomis serta keterbatasan partisipasi politik dan sosial budaya sehari-hari (Laderchi dkk., 2006).

2.5.1 Jenis Kemiskinan

Menurut jenisnya kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis yaitu kemiskinan alamiah, kultural dan struktural. Kemiskinan alamiah disebabkan oleh faktor internal manusia seperti tidak adanya niat berubah dari kebiasaan miskin, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan sumber daya. Kemiskinan kultural muncul karena sikap individu atau kelompok masyarakat yang menolak perbaikan tingkat hidup meskipun mendapat bantuan dari pihak lain. Kemiskinan struktural terjadi akibat kelembagaan, organisasi pemerintah, atau tatanan sosial yang menghambat mobilitas vertikal sehingga orang kaya terus menikmati kekayaan sementara orang miskin terjebak dalam kemiskinannya (Harniati, 2010).

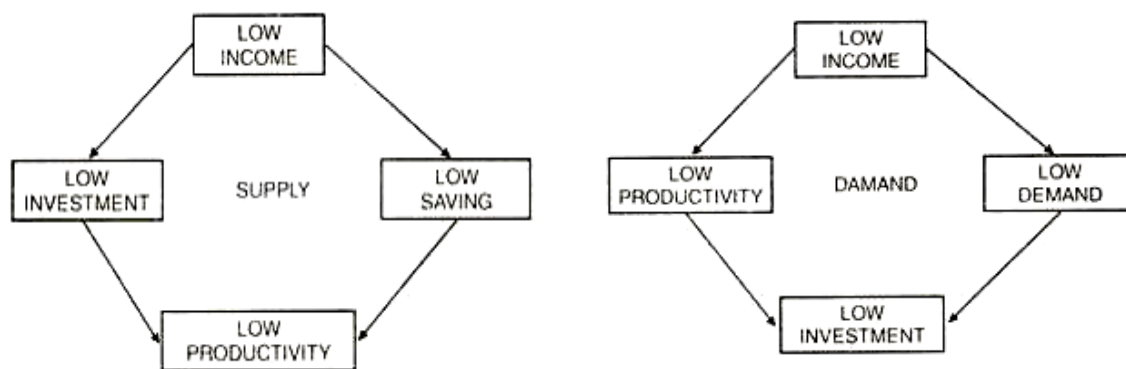
2.5.2 Penyebab Kemiskinan

Tiga miliar penduduk dunia hidup dari pendapatan kurang dari dua dollar Amerika per hari. Lebih dari satu miliar hidup dalam kemiskinan absolut, menggelandang dan terlantar di daerah kumuh, terinfeksi penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang mematikan. Penyebab kemiskinan merupakan lingkaran setan (*vicious circle*), muncul dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh terjadi

akibat dari sistem perekonomian dan politik dunia yang tidak memihak kepada masyarakat miskin dan terjadinya hambatan kehidupan politik dan sosial budaya (Corbett dan Fikkert, 2012). Nehen (2012) menulis beberapa indikator penyebab kemiskinan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kualitas pendidikan buruk sehingga kinerja dan produktivitas kerja rendah yang berakibat pada pendapatan masyarakat rendah. Terbatasnya kesempatan kerja memperburuk ketidakmerataan pendapatan masyarakat. Terbatasnya fasilitas umum seperti sarana pendidikan dan kesehatan juga memperparah kondisi masyarakat secara keseluruhan. Budaya masyarakat pada akhirnya menolak perubahan motivasi dan etos kerja menghambat upaya peningkatan kualitas hidup.

Penyebab kemiskinan lain dinyatakan oleh Papilaya (2013) dengan fakta bahwa penyebab kemiskinan adalah individu itu sendiri karena rendahnya upaya mengubah sikap dan meninggalkan kebiasaan lama. Faktor personal memperburuk kondisi tersebut melalui rendahnya keterampilan pengetahuan kepribadian sistem nilai serta kemampuan bertindak. Faktor situasional memengaruhi kemiskinan melalui lingkungan sosial budaya dan ekonomi. Ketidakmampuan pemerintah memenuhi pemerataan pendapatan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan sehingga memunculkan kemiskinan relatif.

Teori yang umum digunakan sebagai landasan pemikiran penyebab kemiskinan adalah teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori lingkaran setan mengatakan suatu negara miskin karena dia miskin (Kuncoro, 2006). Produktivitas menjadi rendah karena adanya keterbelakangan, kegagalan pasar, dan kurangnya modal. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Berdasarkan hukum sebab akibat tersebut maka setiap tindakan untuk pengentasan kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan (Kuncoro, 2006). Berikut skema lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*):



Sumber: Nurkse (1953) *Model of Vicious Circle of Poverty (VCP)*

Gambar 2.1. Tahapan Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty)

Lingkaran setan kemiskinan menghambat pembentukan modal tinggi karena masyarakat miskin kesulitan menabung akibat pendapatan dan produktivitas rendah. Menurut Nurkse, lingkaran ini terjadi dari sisi penawaran modal ketika pendapatan rendah menurunkan tabungan investasi dan produktivitas sehingga kemiskinan berlanjut, sementara dari sisi permintaan modal perangsang investasi rendah karena pasar terbatas akibat pendapatan masyarakat kecil yang berasal dari investasi masa lalu minim. Kemiskinan bersifat multidimensi meliputi kegagalan pengelolaan aset rendahnya teknologi kurangnya akses kesehatan pendidikan air bersih etos kerja rendah sumber daya alam terbatas pengaruh politik geografi adat serta lingkaran setan itu sendiri. Siklus kemiskinan yang turun-temurun membentuk mental miskin seperti rendah diri dan kurang motivasi pada generasi berikutnya (Sawitri, 2022).

2.6 Pengentasan Kemiskinan

Standar World Bank menyatakan bahwa negara kategori berpendapatan menengah ke atas menganggap seseorang miskin apabila penghasilan atau pengeluarannya kurang dari \$6,85 PPP per hari atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan. Hal tersebut berdasarkan nilai tukar per \$PPP 2017 adalah Rp 5.089, dengan inflasi 13% sejak 2017 (smeru.or.id). Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan standar kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) namun demikian tingkat kemiskinan di Indonesia hampir sama dengan rata-rata negara berpendapatan rendah. Menurut BPS, seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya kurang

dari Rp535.547 per bulan, atau setara dengan \$3,16 PPP per hari. Batas kemiskinan terbaru untuk negara berpendapatan rendah adalah \$2,15 PPP per hari. Zastrow (2008), menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Absolut; metode ini bergantung pada batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar suatu keluarga. Jika penghasilan atau pendapatan keluarga tidak memenuhi batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, keluarga tersebut dianggap miskin. Metode ini memiliki kelemahan karena kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, lingkungan, dan tempat tinggal mereka.
2. Pendekatan relatif.; Metode ini menggunakan ketidakseimbangan pendapatan untuk membandingkan pendapatan individu atau rumah tangga dengan rata-rata pendapatan populasi. Selama ketidakseimbangan pendapatan tetap ada, kemiskinan akan tetap ada. Metode tersebut berpendapat bahwa distribusi pendapatan masyarakat dan tingkat kemiskinan tidak sama di setiap tempat..
3. Pendekatan kebutuhan dasar; Pendekatan tersebut menekankan dua elemen penting. Pertama, kemiskinan didefinisikan sebagai ketika seseorang memiliki pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, papan, pakaian, dan barang rumah tangga lainnya. Kedua, seseorang dengan pendapatan tersebut juga tidak dapat memenuhi kebutuhan lain seperti air bersih, sanitasi, transportasi umum, layanan kesehatan, dan pendidikan.

2.6.1 Indikator Kemiskinan

Bappenas (2006) menetapkan indikator kemiskinan sebagai berikut:

1. Keterbatasan pangan, yang merupakan ukuran dari jumlah kecukupan dan kualitas makanan yang dikonsumsi, seperti asupan kalori yang rendah, gizi yang buruk untuk bayi, anak balita, dan ibu.
2. Terbatasnya akses dan kualitas layanan kesehatan berkualitas tinggi yang tersedia bagi masyarakat miskin, termasuk lokasi fasilitas layanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggal mereka. Masyarakat miskin tidak dapat

mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan karena biaya pengobatan dan perawatan yang tinggi.

3. Indikator diukur dari keterbatasan sarana pendidikan yang tersedia. Tidak adanya kesempatan kerja dan usaha, seperti kurangnya kesempatan kerja berdampak pada perbedaan pengupahan antara pria dan wanita, dan kurangnya kesempatan berusaha berdampak pada kurangnya perlindungan bagi pekerja anak dan perempuan.
4. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki perumahan karena tingginya harga tanah. Tingginya harga tanah menyebabkan tidak cukup tersedianya permukiman yang sehat dan layak huni, dan keterbatasan akses terhadap sanitasi mempengaruhi kesehatan masyarakat.
5. Keterbatasan akses terhadap air bersih: indikator yang digunakan adalah kesulitan mendapatkan air bersih dan penguasaan yang berlebihan terhadap sumber air, yang menyebabkan kualitas air buruk. Sebagai sumber daya alam, akses terhadap air harus dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum, bukan oleh perusahaan untuk keuntungan pribadi.
6. Keterbatasan akses terhadap tanah: indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan sumber tanah.
7. Terbatasnya akses terhadap sumber daya alam. Dua indikator yang digunakan adalah kondisi lingkungan hidup yang buruk dan rendahnya sumber daya alam. Kondisi lingkungan sangat terkait dengan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, pesisir, dan pertambangan.
8. Tidak adanya jaminan rasa aman. Rasa tidak aman merujuk pada ketidakpastian bahwa seseorang tidak akan merasa dilindungi atau dilindungi. Penjaga keamanan harus bersikap adil terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
9. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi. Ini diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengambilan kebijakan.
10. Besarnya beban kependudukan terkait dengan tekanan hidup masyarakat dan jumlah tanggungan keluarga.

2.6.2 Teori Kebijakan Publik

Chief J.O. (1981) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan untuk mencapai tujuan tertentu yang terkait dengan masalah tertentu yang memengaruhi sebagian besar warga negara. Keputusan yang dibuat oleh negara, terutama pemerintah, sebagai strategi untuk mencapai tujuan negara disebut kebijakan publik (Nugroho D., 2008). Strategi kebijakan publik memiliki tujuan untuk memulai masyarakat dan kemudian masuk ke dalam masyarakat ketika mencapai masyarakat yang diinginkan. Kebijakan publik berbeda karena keputusan politik dibuat oleh "otoritas" sistem politik, yang terdiri dari "para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasihat, para raja, dan sebagainya" (Agustino, 2006). Selain itu, disebutkan bahwa individu yang memiliki wewenang tertinggi dalam sistem politik untuk menetapkan kebijakan publik adalah mereka yang memiliki tanggung jawab tertinggi untuk melaksanakannya.

Tahap-tahap dalam Pembuatan Kebijakan Publik. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut (William N. Dunn, 2003) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda merupakan langkah dan proses yang sangat strategis. Selama penyusunan agenda, ada kesempatan untuk memaknai masalah publik dan prioritas agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah masalah menjadi masalah publik dan mendapat prioritas di agenda publik, maka isu tersebut berhak atas sumber daya publik yang lebih besar. Sangat penting untuk menentukan masalah publik mana yang akan menjadi bagian dari agenda pemerintah. Masalah kebijakan sering disebut sebagai masalah kebijakan atau masalah kebijakan. Masalah kebijakan biasanya muncul karena pertentangan pendapat di antara para aktor tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan. Menurut (William N. Dunn, 1999), isu kebijakan adalah hasil atau konsekuensi dari adanya perdebatan tentang rumusan, rincian, penjelasan, dan penilaian suatu masalah.

2. Formulasi Kebijakan

Para pembuat kebijakan kemudian membahas masalah yang sudah ada dalam agenda mereka. Setelah masalah didefinisikan, pemecahan terbaik dicari.

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

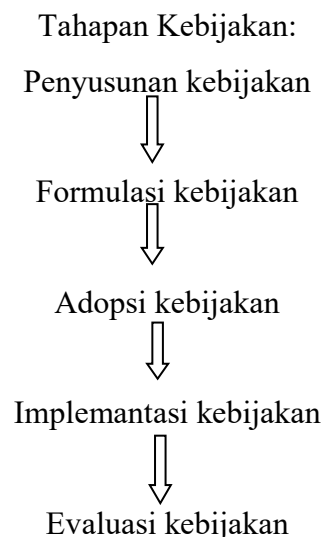
Memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan adalah tujuan legitimasi. Jika kedaulatan rakyat mengatur legitimasi dalam suatu masyarakat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Warga negara harus tetap percaya bahwa mereka harus mendukung tindakan pemerintah yang sah. Simbol tertentu dapat digunakan untuk mengelola legislatif, mengajarkan warga negara untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Penilaian / Evaluasi Kebijakan Evaluasi

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan efeknya. Evaluasi dianggap sebagai suatu kegiatan yang berfungsi. Evaluasi kebijakan dilakukan selama seluruh proses kebijakan, bukan hanya pada tahap akhir sehingga evaluasi kebijakan dapat mencakup tahap perumusan masalah kebijakan program, tahap implementasi, dan tahap dampak kebijakan. Secara singkat, tahap kebijakan adalah seperti gambar berikut.



Sumber: Budi Winarno (2007)

Gambar 2.2. Tahapan Kebijakan Kemiskinan

Menurut James E. Anderson 2006 dalam bukunya berjudul “*Public Policy Making · An Introduction*” mengartikan bahwa kebijakan publik Kebijakan publik berorientasi pada tujuan tertentu yang direncanakan oleh aktor-aktor sistem politik sebagai arah atau pola tindakan pejabat pemerintah. Kebijakan tersebut mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah bukan sekadar keinginannya sehingga dapat bersifat positif atau negatif. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau publik, bukan kehidupan privat, yang dibuat oleh administrator negara untuk memecahkan masalah publik dan mencapai tujuan. Wahab (1991) menyatakan bahwa tindakan aktif dan pasif pemerintah untuk mengatasi masalah publik selalu dikaitkan dengan kebijakan publik. Kebijakan pemerintah dibuat untuk dilaksanakan (Wahab, 2002). Menurut Parson (2005), penentuan tujuan dan tindakan yang diambil untuk mencapainya dikenal sebagai implementasi kebijakan. Jika suatu kebijakan salah atau tidak dapat menyelesaikan masalah yang dimaksudkan, maka kebijakan itu mungkin gagal meskipun diterapkan dengan baik. Sementara itu, kebijakan yang baik juga mungkin gagal jika diterapkan dengan salah.

2.6.3 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel berikut, yaitu:

1. Tujuan yang akan dicapai; Tujuan kebijakan mencakup kompleksitas yang akan dicapai sehingga semakin rumit tujuannya semakin sulit kinerja kebijakan tercapai. Sebaliknya tujuan sederhana lebih mudah diwujudkan.
2. Preferensi nilai; Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan; Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan pelaku yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

5. Lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya; Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan; Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis (Suharno, 2010).

2.6.4 Teori Pilihan Rasional Publik

Teori Pilihan Rasional dikenal dari pernyataan Johnson dan Keehn (1994). Selama dua dekade terakhir, teori pilihan rasional (*rational choice*) telah berkembang menjadi salah satu pendekatan dominan dalam ilmu politik. Awalnya, teori ini hanya terbatas pada kajian tertentu, namun kini telah meluas dan diterapkan pada berbagai bidang, termasuk kajian mengenai wilayah kekuasaan yang sebelumnya kurang menerima pendekatan rasional (Wirawan, 2014). Sejalan dengan itu, (Hedstrom dan Charlotta, 2008) menjelaskan bahwa teori pilihan rasional merupakan bentuk esensial dari sejumlah konsep psikologi sosial eksperimental dan penelitian mutakhir yang berfokus pada hubungan antara teori-teori perkembangan dan fenomena sosial pada tingkat makro.

Definisi mengenai teori pilihan rasional sangat beragam. (Huber, 1997) menjelaskan teori pilihan rasional melalui analisis yang menilai perilaku individu sebagai tindakan yang disengaja atau purposif, sedangkan (Mansbridge, 1980) mengemukakan pandangan yang lebih ketat dengan menekankan bahwa pelaku bertindak berdasarkan motivasi kepentingan diri. Teori pilihan rasional menempatkan intensionalitas sebagai inti utama, di mana penjelasan tindakan manusia (*intentional explanations*) tidak hanya menggambarkan individu bertindak demi tujuan tertentu, tetapi juga mempertimbangkan keyakinan, nilai, serta kehendak sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Teori pilihan rasional menganggap individu bertindak secara logis untuk mencapai kepuasan maksimal dengan biaya minimal. Individu memiliki urutan preferensi terhadap pilihan yang konsisten sehingga ilmuwan sosial menyimpulkan adanya fungsi utilitas untuk menilai setiap opsi.

Secara keseluruhan, teori rasionalitas menempatkan individu sebagai aktor utama dalam pembentukan struktur sosial. Fenomena sosial yang signifikan dianggap sebagai hasil logis dari akumulasi keputusan rasional individu yang berinteraksi satu sama lain dalam konteks kepentingan, strategi, dan optimasi hasil. Aktor sebagai individu juga memiliki pilihan yang memiliki nilai dasar yang digunakan untuk membuat pilihan tersebut, menggunakan pertimbangan mendalam yang didasarkan pada kesadaran mereka. Aktor juga memiliki kekuatan untuk berusaha untuk membuat pilihan dan tindakan yang ingin mereka lakukan. Sumber daya adalah tempat aktor memiliki kendali dan kepentingan, tetapi aktor juga dapat mengontrolnya. (Ritzer & Goodman, 2012).

Menurut teori pilihan rasional, aktor bertindak dengan tujuan dan maksud yang jelas. Setiap tindakannya diarahkan secara logis untuk mencapai hasil yang diinginkannya. Sebagai aktor utama, pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi proses pembangunan dari tingkat pusat hingga desa. Keberhasilan pembangunan bergantung pada masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan dan pemerintah sebagai otoritas struktural. Masyarakat bukan hanya pihak yang menerima manfaat dari pembangunan; mereka juga merupakan aktor utama dalam menentukan jalan, keberlanjutan, dan keberhasilan hasil pembangunan (Ritzer & Goodman, 2012).

2.6.5 Teori Institusi Publik

Teori institusi menjelaskan bagaimana struktur sosial norma dan praktik organisasi serta masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Institusi mencakup norma nilai formal dan informal yang memengaruhi perilaku individu serta kelompok dalam administrasi publik (Scott, 2019). Teori ini membantu memahami bagaimana individu bertindak dalam struktur sosial besar dan dipengaruhi konteks sosial tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang menekankan pentingnya teori institusi dalam administrasi publik:

a) Pemahaman mengenai Struktur dan Fungsi Institusi.

Struktur dan fungsi institusi sangat penting dalam administrasi publik karena mengatur pengelolaan sumber daya publik. Teori institusi menjelaskan norma nilai serta aturan memengaruhi perilaku aktor organisasi publik (North, 2018).

Analisis struktur institusi memberikan wawasan pengambilan keputusan dan implementasinya sehingga menciptakan komunikasi efektif keputusan transparan akuntabel serta kemampuan mengidentifikasi hambatan peluang dalam perubahan sosial politik dinamis.

b) Pengaruh Aturan dan Norma Pengaruh

Aturan dan norma dalam administrasi publik membentuk kerangka interaksi antar aktor organisasi. Teori institusi menyatakan norma serta aturan mengatur perilaku individu dan keputusan kolektif organisasi publik. Pemahaman baik tentang aturan norma tersebut meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya publik serta layanan masyarakat melalui stabilitas konsistensi efisiensi dan transparansi pengambilan keputusan.

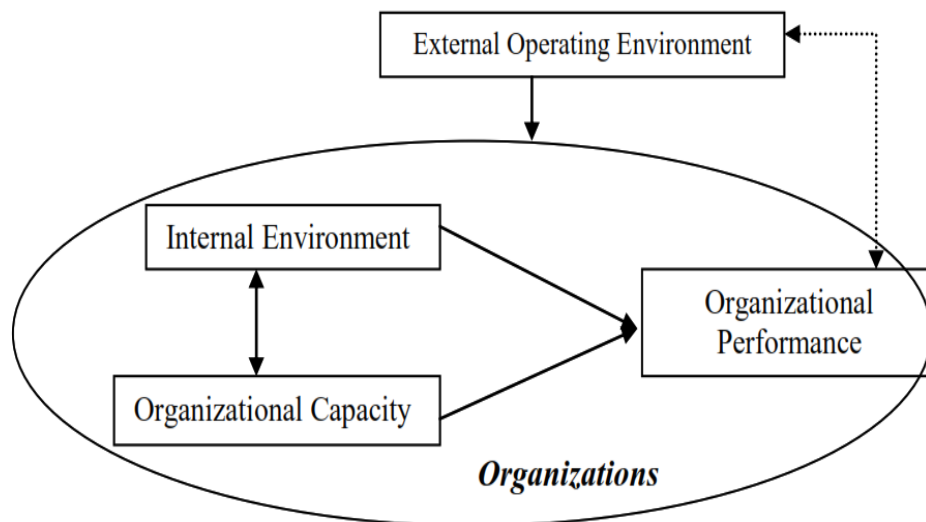
c) Stabilitas dan Perubahan dalam Administrasi

Stabilitas dan perubahan saling terkait dalam administrasi publik sehingga teori institusi menjelaskan dinamika keduanya. Stabilitas institusi penting untuk memastikan aturan norma diikuti sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut DiMaggio dan Powell (2018) institusi mempertahankan stabilitas sekaligus menciptakan perubahan di konteks dinamis melalui rutinitas kebiasaan inovasi serta partisipasi pemangku kepentingan.

2.6.6 Theory of State Capacity

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan organisasi. Konsep pengembangan kapasitas organisasi pada sektor publik mulai muncul pada awal 1980-an. Stinchcombe (1965) menyebutkan lima variabel dasar yang memengaruhi kapasitas organisasi, yaitu kemampuan mengelola lingkungan sosial dan internal untuk mencapai tujuan. Pendapat ini sejalan dengan Douglas Norton dkk., (2003) yang mendefinisikan "kapasitas organisasi sebagai potensi kinerja organisasi untuk berhasil menerapkan keterampilan dan sumber daya guna mencapai tujuan serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Tujuan pengembangan kapasitas adalah meningkatkan potensi kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik." keterkaitan pengembangan kapasitas digambarkan sebagai

berikut:



Gambar 2.3. Framework for Organizational Assessment
(Sumber: Douglas Norton, dkk., 2003)

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan secara efektif. Konsep ini terkait erat dengan pengembangan kelembagaan (*organizational development*) yang sudah dikenal sejak awal 1980-an. Stinchcombe (1965) menyebutkan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada pengelolaan lingkungan internal dan eksternal. Douglas Norton dkk., (2003) mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber daya dan keahlian guna mencapai tujuan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Narayanan dkk., (1993) menyatakan bahwa pengembangan kelembagaan adalah upaya jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah dan berinovasi secara berkelanjutan, dengan mengelola budaya organisasi secara efektif dan kolaboratif, serta didukung oleh agen perubahan dan teknologi perubahan. Model kontingensi Nadler dan Tushman menggarisbawahi pentingnya komponen tugas, individu, struktur organisasi, dan hubungan informal dalam organisasi. Konsep ini sejalan dengan pengembangan

kapasitas menurut Douglas dkk., yang menekankan peningkatan struktur kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengelolaan dinamika internal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Eade (1997) menekankan bahwa pengembangan kapasitas adalah karakteristik yang terkait dengan partisipasi, pemberdayaan, masyarakat sipil, dan partisipasi publik. Ia mengidentifikasi tiga strategi utama pengembangan kapasitas, yakni penguatan organisasi dan manajemen, penyediaan sumber daya dan prasarana, serta pengembangan jaringan (*network*). Pendapat ini diperkuat oleh Edralin (1997), yang menambahkan dua strategi penting yaitu pengelolaan lingkungan dan kemampuan fiskal serta program. UNDP (1999) juga merumuskan sembilan dimensi pengembangan kapasitas yang mencakup misi dan strategi birokrasi, kultur dan struktur organisasi, kompetensi dan proses organisasi, sumber daya manusia, keuangan, informasi hingga infrastruktur. Pengembangan kapasitas menjadi proses penting dalam menjamin efektivitas dan keberlanjutan organisasi pemerintah daerah.

2.6.7 Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Nasikun (1996), kesejahteraan dapat digambarkan sebagai persamaan makna dari konsep martabat manusia, yang dapat dilihat melalui empat indikator: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) identitas (*identity*).

Badan Pusat Statistik (BPS) menterjemahkan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup ([BPS] Badan Pusat Statistik, 2024). Kesejahteraan sosial secara

definitif merupakan kondisi atau keadaan sejahtera yang mencakup sejahtera fisik, mental, dan sosial, serta perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu (Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf, 2014). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.7 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Pembangunan adalah proses yang memiliki banyak aspek dan termasuk perubahan pada struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat, dan institusi nasional. Selain itu, pembangunan juga mencakup mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1977). Sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 (revisi UU No. 32 tahun 2004), pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat membutuhkan partisipasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Daerah diizinkan untuk berkembang secara mandiri dan kreatif sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Ini memungkinkan pembangunan direncanakan dan dilakukan sesuai dengan keinginan dan keinginan masyarakat setempat.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) telah disusun melalui proses partisipasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat. SNPK menekankan pendekatan berbasis hak (*right-based approach*) dengan fokus pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar rakyat, serta kesetaraan gender dan percepatan pengembangan wilayah. Saat ini, sekitar 60% pemerintah kabupaten/kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

PP No. 39/2012 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana warga negara memenuhi kebutuhan material spiritual dan sosial untuk hidup layak serta berkembang diri. Pemerintah Indonesia menjalankan program pengentasan

kemiskinan melalui tiga pendekatan yaitu kebijakan tidak langsung yang mendukung kondisi pengentasan kemiskinan kebijakan langsung untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta kebijakan khusus yang mempersiapkan masyarakat miskin dan aparat pelaksana. Program jaminan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), ditujukan untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, dengan fokus pada kelompok masyarakat paling miskin.

2.7.1 Sejarah Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Dari buku pusat analisis evaluasi nasional penanggulangan kemiskinan (Pocut Eliza, 2016) memberikan konsep kebijakan yang ada di Indonesia selama beberapa kepemimpinan:

1. Kebijakan Periode Transisi tahun 2001-2004

Upaya penanggulangan kemiskinan biasanya berfokus pada proyek dan sektor berdasarkan arahan presiden, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pergantian kepemimpinan menjadikan sulit untuk mempertahankan konsistensi program. Pendekatan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor ini sebenarnya telah dimulai sejak masa transisi pasca reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Fokus utama pemerintahan Gusdur masih pada konsolidasi dan normalisasi kondisi politik pasca reformasi. Pergantian kepemimpinan pada akhir tahun 2001 menyebabkan pergeseran program menanggulangi kemiskinan nasional. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan dan membentuk KPK. Perpres tersebut selanjutnya diperbaharui lagi menjadi Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Periode transisi menjadikan kemiskinan sebagai masalah yang melibatkan banyak aspek, dan semua pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan, bertanggung jawab untuk menanganinya. Upaya penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui keadilan dan kesetaraan gender, percepatan pembangunan perdesaan, perkotaan, kawasan pesisir, dan

daerah tertinggal.

2. Periode Kebijakan Konsolidasi dan Inisiasi *by Name by Address* Tahun 2005-2009

Pada tahun 2004, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan telah dituangkan dalam Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan 2005-2009 yang diintegrasikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 di era Kabinet Indonesia Bersatu presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun juga menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pertama dalam pembangunan. Prinsip utamanya menekankan bahwa Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan harus diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005 – 2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006. Pada periode inilah penataan kelembagaan juga mulai diupayakan, yaitu dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Secara bertahap, penataan kelembagaan tersebut juga dilakukan di daerah dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dikoordinir oleh Departemen Dalam Negeri.

Strategi tersebut didukung dengan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing, yaitu Klaster I (Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga); Klaster II (Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat); Klaster III (Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil). Pada periode ini, basis data rumah tangga juga mengalami pemutakhiran melalui PPLS 2011 inilah yang kemudian penyempurnaan sampai dikeluarkannya kebijakan Klaster IV – Program Pro-Rakyat.

3. Periode Kebijakan Transformasi Tahun 2015-2019

Acuan utama yang digunakan periode transformasi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Terdapat empat kluster program penanggulangan kemiskinan namun diubah melalui 3 strategi yaitu: Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang komprehensif, Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan dan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)/*Sustainable Livelihoods Approach* (SLA)

Pemerintah menciptakan tiga program utama dengan peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah (melalui UU Desa, DAK, dll.). Pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan *Sustainable Livelihoods Approach* (SLA) yang didasarkan pada pengembangan lima aset utama: aset manusia, fisik, sumber daya alam, sosial, dan finansial. Pendekatan tersebut mengalihkan fokus dari komunitas secara keseluruhan ke keluarga atau rumah tangga di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, berbeda dengan pendekatan PNPM Mandiri yang menyasar seluruh wilayah.

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab tidak optimalnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian oleh Laksmono (1998), Yesudian (2007), Yunusa (2012), dan Rakhmat (2015) menunjukkan bahwa kegagalan program sering terjadi karena bantuan tidak tepat sasaran, yang disebabkan oleh bias dalam implementasi di tingkat masyarakat oleh petugas lapangan. Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang baik mendukung proses sosialisasi program bantuan beasiswa Bidikmisi. Penghematan biaya tercermin dari dari efektifnya sosialisasi program (Santie & Wahono, 2016).

Fakta bahwa program Raskin memberikan subsidi ekonomi pemerintah kepada rumah tangga penerima manfaat (RTM) membuat program ini rentan terhadap masalah manipulasi. Subsidi ekonomi membuat seseorang dalam masyarakat ingin mengajukan diri sebagai RTM meskipun sebenarnya mereka tidak termasuk RTM. Kemungkinan manipulasi memunculkan pertanyaan mengenai efektif tidaknya program raskin (Hutagaol & Asmara, 2007). Ali &

Alam (2012) menyatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan pemerintah mencerminkan berbagai aspek kehidupan publik dan ditujukan untuk masyarakat umum, termasuk negara dan masyarakat dalam berbagai status. Kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak zaman orde lama hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Murdiyana & Mulyana, 2017). Pengentasan kemiskinan pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai merupakan usai penghapusan subsidi minyak tanah, dan program konversi bahan bakar gas, penerangan /lampu, infrakstruktur, air bersih. Jamkesmas merupakan pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat namun bantuan air bersih dan kesehatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan (Liwiya dkk., 2018).

Suripto (2005) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kebijaksanaan pembangunan yang dikombinasikan dengan program redistribusi pendapatan. Keseimbangan pertumbuhan industri dan pertanian dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah harus membuat program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Program tersebut tidak hanya harus jangka panjang tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan lokal. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan yang sudah lama karena padatnya populasi. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang perlu ditangani secara menyeluruh (Herlina & Komariah, 2017).

2.7.2 Kebijakan Pemerintah dalam Intervensi Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini beroperasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Konsep Transfer Uang Kondisi (CCT). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berhak mendapatkan: a) Bantuan Sosial PKH; b) pendampingan PKH; c) layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; dan d) program Bantuan Komplementer dalam bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya (Wisnubroto Kristantyo, 2021).

Keluarga yang menerima PKH harus memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen pendidikan meliputi anak-anak dari usia 0 hingga 6 tahun. Komponen kesehatan meliputi anak-anak di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; c) sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak-anak usia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Bantuan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening, yang terdiri dari bantuan tetap dan bantuan yang disesuaikan dengan anggota keluarga. Maksimal empat orang dalam satu keluarga dapat menerima bantuan komponen tersebut (Wisnubroto Kristantyo, 2021).

Individu yang memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Keluarga yang menerima bantuan PKH ini memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti keluarga penerima manfaat PKH. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan uang tunai, layanan kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah yang berbeda tergantung pada anggota keluarga atau komponen yang memilikinya. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Mereka juga harus memenuhi komitmen. Tanggung jawab tambahan yang harus dipenuhi oleh KPM PKH termasuk melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu yang sedang hamil, melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu yang

nifas, dan memeriksa anak usia balita dan prasekolah ke fasilitas kesehatan. Namun, tanggung jawab pendidikan, seperti mendaftarkan atau menyekolahkan anak-anak di sekolah dan yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (Hasna, dkk., 2019).

Salah satu program utama pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan telah memenuhi persyaratan untuk diterima oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang termasuk dalam kategori miskin atau sangat miskin sejak dimulai pada tahun 2007 hingga 2023. Banyak organisasi lokal dan internasional mendukung program Keluarga Harapan ini. Laporan World Bank (2006) “*Making the New Indonesia Work for The Poor*” melaporkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan program PKH karena empat alasan utama yang sangat nyata. Pertama, masih terdapat sekitar 6,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berpenghasilan kurang dari Rp130.000,00 per bulan. Kedua, kasus malnutrisi di kalangan anak-anak Indonesia masih tinggi, dengan lebih dari seperempat anak-anak usia di bawah 5 tahun memiliki berat badan di bawah standar kesehatan, serta banyak keluarga miskin yang mengonsumsi makanan dengan gizi rendah. Ketiga, tingkat kematian ibu melahirkan masih tinggi, karena perempuan miskin sering tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur selama kehamilan dan lebih memilih jasa dukun beranak tradisional. Keempat, banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP) sesuai dengan program wajib belajar, dengan angka partisipasi sekolah SD dari keluarga miskin kurang dari 45% dan SMP kurang dari 20%, meskipun program wajib belajar telah dicanangkan secara nasional.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program nasional yang telah menjangkau 21.471 desa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat menghentikan kemiskinan antar generasi dengan menggunakan:

1. Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin).

2. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*).
3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
4. Mengurangi pekerja anak maupun anak jalanan.
5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender).
6. Memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.

Berbagai studi nasional dan internasional telah melaporkan dampak Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan sosial bersyarat yang mengangkat keluarga miskin dari kemiskinan meningkatkan konsumsi pangan serta mendorong akses layanan kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia perubahan perilaku serta sinergi dengan program komplementer seperti BPNT KIS dan KIP sehingga menurunkan ketimpangan sosial serta angka kemiskinan secara efektif (Suharto & Thamrin, 2012). PKH memiliki dampak pada keberdayaan Masyarakat. Rukmana, dkk., (2022) mengemukakan bahwa ciri keberdayaan PKH adalah sebagai berikut; eberdayaan individu dan komunitas mencakup kemampuan menentukan pilihan hidup menuntut hak asasi mendefinisikan kebutuhan mengemukakan gagasan mengontrol institusi mengelola sumber daya ekonomi mengatur produksi distribusi pertukaran serta sosialisasi pendidikan. PKH mendorong aspek-aspek tersebut melalui peningkatan pengetahuan motivasi partisipasi aktif kemandirian dan akses layanan sosial sehingga KPM mampu memperjuangkan hak mengelola aset serta berkontribusi pada perbaikan kehidupan bersama. Indikator umum yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat adalah perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi dilihat dari daya beli apabila KPM tersebut dinyatakan keluar dari kemiskinan. Perubahan yang dialami KPM ini menjadi domain utama dalam evaluasi dampak program (Sari, dkk, 2020).

2.7.3 Kebijakan Pemerintah dalam Intervensi Kemiskinan Melalui Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT)

Kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kemiskinan di suatu negara harus diperhatikan sebagai masalah yang sangat serius. BPNT dilaksanakan dengan bantuan pengembangan sarana usaha E-warung (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25, 2016). Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara (Zhou & Hendriks, 2017).

Program bantuan pangan merupakan dasar bantuan kemanusiaan tetapi juga merupakan intervensi untuk mengatasi kerentanan dan kerawanan pangan bagi keluarga yang tergolong kurang dalam pemenuhan nutrisi dan kebutuhan pangan dasar lainnya (Waity, 2019; Zhou & Hendriks, 2017). Tujuan program BPNT BPNT antara lain mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan memberikan gizi seimbang meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan serta memberikan pilihan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program ini mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah untuk mengubah program Subsidi Rastha karena Rastha memiliki beberapa masalah yang rumit selama pelaksanaannya (Peraturan Menteri Sosial No.11, 2018). Perlu diingat bahwa indikator keberhasilan Rastha diukur melalui 6T, yaitu tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi, dan tepat waktu. Beberapa masalah yang timbul pada Rastha antara lain masih ada ketidaktepatan penerima dan waktu penyaluran setiap bulan.

BPNT menjadi bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ewarung yang bekerjasama dengan bank. BPNT menjadi solusi pengganti

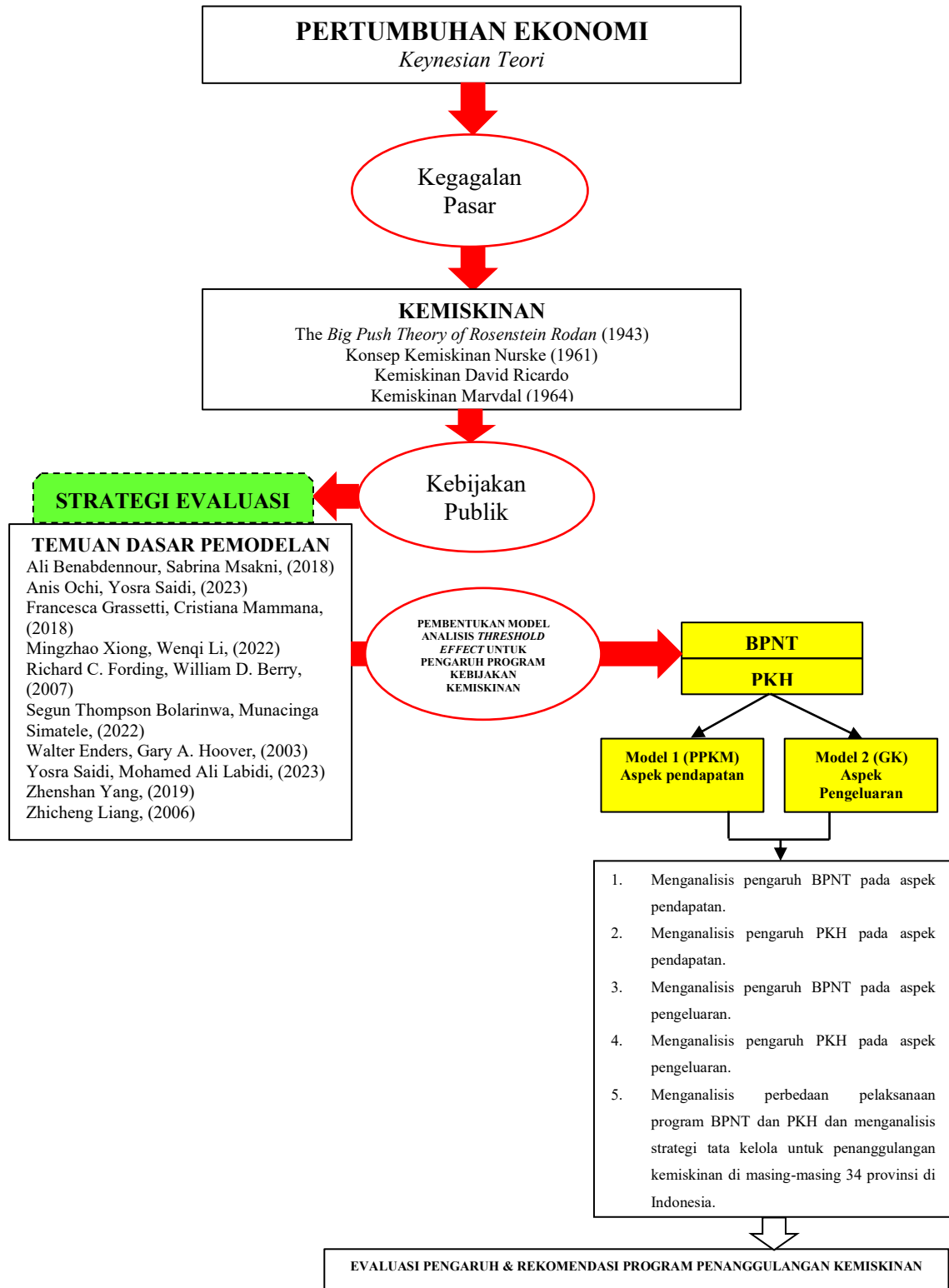
Rastra dengan harapan dapat memberikan keleluasaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan serta sesuai indikator 6T.

Pemerintah mengharapkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tujuan utama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengurangi biaya mereka dengan memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan mereka, memberikan nutrisi yang lebih seimbang, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (PerPres No.63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 8 n.d.). Pemberian bantuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. BPNT diharapkan dapat memenuhi hak kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BPNT merupakan kebijakan yang bersifat *Top Down* yaitu kebijakan yang dibuat oleh pusat yang kemudian diimplementasikan oleh daerah (Handriani, L. A. Y., & Arka, S., 2021). Implementasi program BPNT di berbagai daerah tentu tidaklah sama. Beberapa penelitian tentang BPNT di daerah lain menunjukkan hasil yang beraneka ragam. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memahami jenis dan nilai bantuan yang diberikan tetapi hanya sedikit yang memahami kebebasan memilih kuantitas dan kualitas bahan pangan sesuai kebutuhan mereka (Rakhmat, F. F, 2019).

2.8 Kerangka Pemikiran

Secara singkat penelitian memiliki kerangka alur sebagai berikut:



Sumber: Penelitian, 2025

Gambar 2.4. Kerangka Alur Pemikiran

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, Pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya ([BPS] Badan Pusat Statistik, 2019). ekonomi modern Adam Smith mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan secara alami atau kebiasaan (Smith, 1776).

Kemiskinan ditandai beberapa keadaan seperti kekurangan gizi, kurangnya akses asuransi, pertumbuhan populasi, lingkungan dan bahkan pertumbuhan ekonomi (West & Marchand, 2001). Kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui program jaring pengaman sosial QPS) atau *social safety net* (SSN) dan program kompensasi (CP) yang dipadu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan atau *Poverty Alleviation* (PA). Program JPS bertujuan untuk membantu penduduk miskin agar tidak menjadi semakin miskin dan terpuruk, serta agar dapat hidup layak (Mitchell Stewart, Aileen, 1998). JPS sudah mulai diterapkan pada awal 1880-an ketika pemerintah Otto von Bismark di Jerman dan David Lloyd George di Inggris melembagakan sistem perlindungan dan jaminan sosial (*social security*). Amerika Serikat mulai meluncurkan JPS pada 1935 dan Eropa Timur pada 1980-an. JPS masuk ke Indonesia sebagai program strategi penyesuaian struktural atau *Structure Adjustment Programme* (SAP) yang disodorkan oleh lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan the World Bank (Albers & Henry, 1969).

Salah satu faktor penyebab belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah terkait dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hasil dari beberapa penelitian terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di berbagai negara misalnya Laksmono (1998), Yesudian (2007), dan Yunusa (2012), Rakhmat, (2015) menunjukkan bahwa kegagalan disebabkan karena bantuan diberikan tidak tepat sasaran. Berdasarkan

penelitian tersebut dikemukakan bahwa ketidaktepatan sasaran tersebut lebih disebabkan karena terjadinya bias implementasi program di tingkat masyarakat yang dilakukan oleh para petugas di lapangan.

Konsumsi makanan merupakan konsumsi primer yang erat kaitannya dengan kemiskinan karena rumah tangga miskin lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dibandingkan kebutuhan non-makanan (Badan Pusat Statistik, 2017). Struktur perluasan konsumsi pangan dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga maka semakin rendah persentase pengeluaran konsumsi pangan (Clements & Si, 2017; Deaton & Drèze, 2010; Maizunati, 2017). Peningkatan konsumsi pangan akan meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga berdampak pada rumah tangga yang mendekati atau bahkan melampaui garis kemiskinan. Menurut Keynes, belanja pemerintah dapat meningkatkan output dan menurunkan laju reaksi karena belanja pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmawati, 2022). Belanja pemerintah merupakan intervensi pemerintah yang paling efektif dalam perekonomian, karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, membangun infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, mendistribusikan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Lantu dkk., (2017) menemukan bahwa meskipun belanja pemerintah secara keseluruhan mempunyai dampak yang nyata, baik belanja langsung maupun tidak langsung tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Pemahaman yang beragam ini menggarisbawahi pentingnya membedakan berbagai kategori pembelanjaan untuk memahami berbagai implikasi terhadap pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan (Remi dkk., 2002). Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tergantung pada kelompok sasaran dan daerah mana yang ditargetnya. Todaro (2015) menuliskan bahwa diperlukan lebih banyak pengetahuan tentang

siapa yang termasuk golongan miskin dan apa karakteristik ekonomi mereka sebelum merumuskan program dan kebijakan yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Bappenas (2007) menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup program-program yang ditujukan khusus untuk kaum miskin. Jika program-program ini dilaksanakan secara efektif maka keluarga miskin dalam kelompok ini akan sangat diuntungkan. Contoh program bagi kelompok pertama antara lain bantuan beras untuk masyarakat miskin, bantuan langsung tunai, dan jaminan kesehatan. Contoh program bagi kelompok kedua antara lain pengurangan biaya sekolah, penyediaan obat generik dan pendanaan pelayanan kesehatan. Peruntukkan program kelompok kedua ini tidak hanya untuk keluarga miskin.

Waluyo, B dkk., (2021) menyatakan bahwa PKH periode tahun 2015-2019 memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan, baik di tingkat nasional, daerah tertinggal maupun non tertinggal. Pengaruh PKH lebih kecil untuk daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Naiknya nominal tunjangan PKH perlu diiringi peningkatan cakupannya, terutama di kawasan timur Indonesia yang sebagian daerahnya masih tertinggal. Peningkatan aksesibilitas wilayah, prasarana pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai, serta ketepatan dalam penyaluran PKH kepada masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal dapat menjadi faktor penentu efektifnya pelaksanaan PKH.

Osabohien (2020) menganalisis tentang pengaruh program bantuan sosial terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara Afrika. Hasil studi menunjukkan bahwa program bantuan sosial berpengaruh signifikan pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Karakteristik regional di masing-masing negara yang memiliki karakter berbeda membutuhkan jenis kebijakan perlindungan sosial yang berbeda pula dari satu daerah ke daerah lain. Skoufias dkk., (2008) menyatakan program *Progres* di Mexico berkontribusi pada penurunan kemiskinan dalam jangka pendek. *Progres* secara signifikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, dengan pengaruh yang lebih besar pada level kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan rumah tangga. Penelitian

selanjutnya akan mencoba menganalisis dua model regresi terkait kemiskinan. Model pertama yang dikembangkan akan menggunakan nilai pendapatan per kapita penduduk miskin sebagai variabel terikat. Model diharapkan dapat melihat pengaruh perbaikan pendapatan penduduk miskin dengan adanya program penanggulangan kemiskinan seperti BPNT dan PKH. Model kedua dalam penelitian akan menggunakan garis kemiskinan sebagai variabel terikat. Model kedua ini ingin melihat pengaruh penetapan program penanggulangan kemiskinan; BPNT dan PKH dengan konsep standar kemiskinan di Indonesia yaitu menggunakan garis kemiskinan.

2.9 Pengembangan Hipotesis Berdasarkan Telaah Teoritis Penelitian Terdahulu

Sebagai jawaban sementara dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan teori maka dapat dijelaskan hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

Program BPNT dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran pangan keluarga miskin sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan riil mereka. Namun, sebagaimana dilaporkan oleh Nadhifah dan Mustofa (2021), pengaruh BPNT masih terbatas dan variatif antar wilayah karena pendekatan metodologis sebelumnya mengasumsikan linearitas pengaruh dan menggunakan data agregat nasional. Sementara Anggrasari dan Hanri (2025) menemukan bahwa pengaruh bantuan sosial memiliki efek ambang batas di mana efektivitasnya mulai terlihat bila mencapai titik tertentu. Oleh karena itu, pada level regime minimum, dampak BPNT terhadap pendapatan per kapita kemungkinan bersifat positif namun belum signifikan secara efektif, menunggu melewati ambang batas sosial-ekonomi untuk memperoleh efek optimal.

H_1 = Diduga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita penduduk miskin (Y).

PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sangat miskin melalui akses pendidikan dan kesehatan

(Waluyo dan Khoirunurrofik, 2021). Kendati begitu, efektivitas PKH dalam meningkatkan pendapatan per kapita belum maksimal terutama di daerah tertinggal dengan cakupan layanan yang terbatas. Analisis wilayah dan sosial menunjukkan bahwa pengaruh intervensi sosial tidak linear dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial-ekonomi (Osabohien, 2020). Model regresi ambang batas yang digunakan oleh Anggrasari dan Hanri (2025) juga mendukung bahwa pengaruh PKH membutuhkan melewati level ambang tertentu untuk menjadi efektif.

H_2 = Diduga Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita penduduk miskin (Y).

Pada level regime maksimum, intensitas dan cakupan program BPNT lebih besar sehingga dampak pengurangan beban pangan dapat dirasakan nyata, meningkatkan pengeluaran warga miskin untuk kebutuhan lainnya. Studi Handriani dkk., (2021) menunjukkan bahwa implementasi BPNT yang optimal mampu meningkatkan pilihan bahan pangan berkualitas sesuai kebutuhan keluarga miskin. Studi lain seperti Rakhmat (2019) menyebutkan bahwa efektivitas program sangat tergantung pada ketepatan sasaran dan pelaksanaan di lapangan. Ketepatan sasaran mengindikasikan bahwa ketika program sudah melewati ambang minimum dan dijalankan maksimal, pengaruh positif dan efektif terhadap pengeluaran penduduk miskin menjadi signifikan.

H_3 = Diduga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh positif terhadap pengeluaran penduduk miskin (Y).

PKH yang berjalan maksimal dan memenuhi persyaratan layanan kesehatan dan pendidikan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara menyeluruh (Suharto, 2012). PKH diharapkan memberikan efek positif pada pengeluaran rumah tangga miskin yang lebih sehat dan produktif selain memperbaiki akses layanan dasar. Studi evaluasi pemerintah dan lembaga internasional memperkuat bahwa program PKH yang efektif dan optimal dapat mengurangi kemiskinan lintas generasi.

H_4 = Diduga Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif terhadap pengeluaran penduduk miskin (Y).

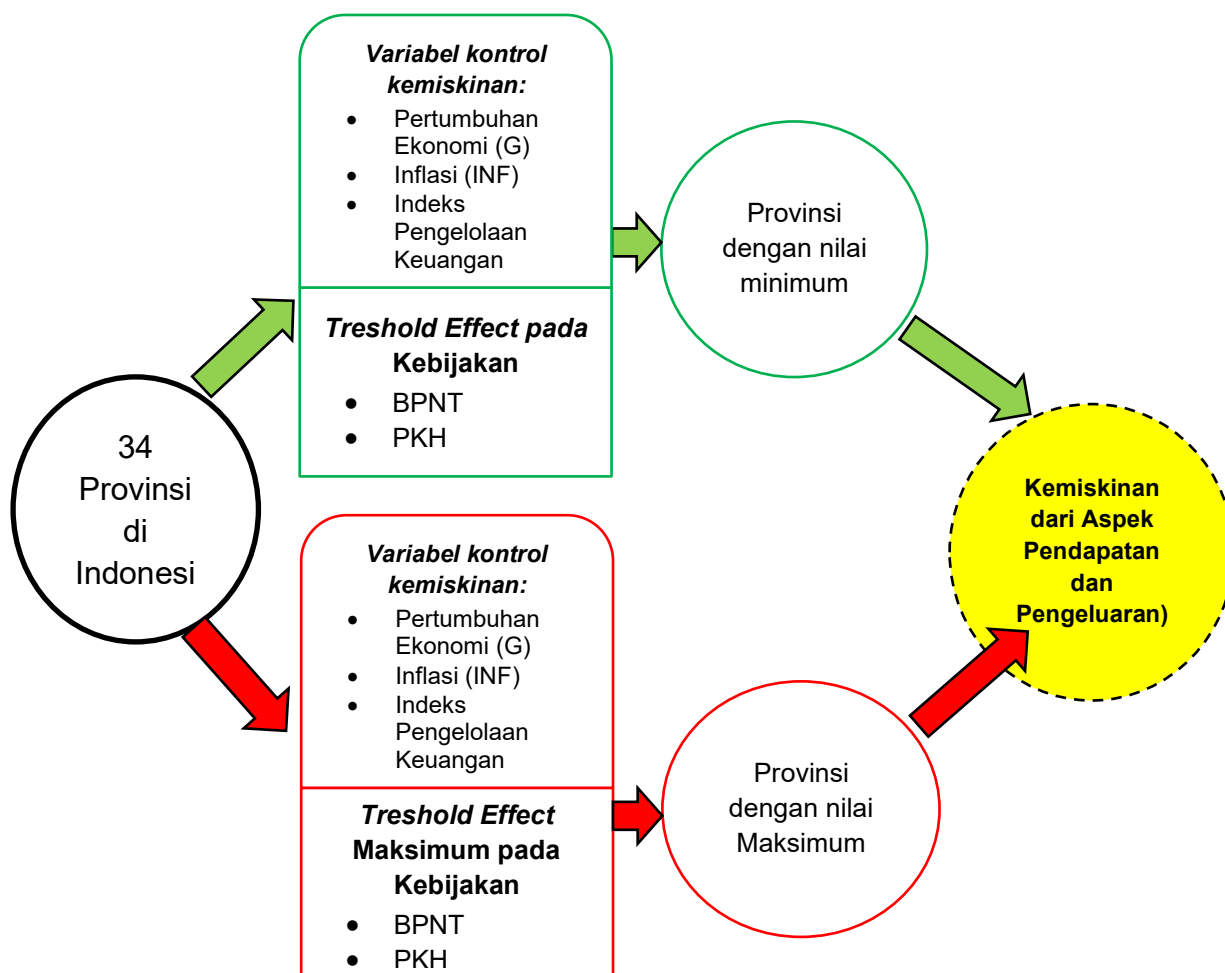
BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian menggunakan model regresi ambang batas (*threshold*). Penelitian merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat statistik 34 Provinsi di Indonesia, dengan terbitan <https://lampung.bps.go.id/> serta berbagai terbitan publikasi yang relevan dengan sumber data. Data yang digunakan berbentuk time series (runtun waktu).

Gambar 3.1 menggambarkan kerangka metodologi *threshold* terhadap kemiskinan.

Gambar 3.1 menggambarkan bagaimana alur analisis dampak ambang kebijakan bantuan sosial, terutama BPNT dan PKH, terhadap kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Analisis dimulai dengan pemetaan seluruh provinsi selama 2000-2022. Model analisis dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan aspek kemiskinan pendapatan dan pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi (G), inflasi (INF), dan indeks pengelolaan keuangan daerah adalah variabel kontrol yang memengaruhi kemiskinan pada masing-masing kelompok provinsi. Proses analisis ambang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan BPNT dan PKH mempengaruhi berbagai tingkat kemiskinan. Diagram tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial berkemungkinan tidak efektif secara universal tetapi pengaruhnya sangat bergantung pada kondisi struktural kemiskinan di setiap provinsi.



Sumber: Penelitian, 2024

Gambar 3.1. Tahap Alur Regresi Threshold Model Bantuan Sosial

3.2 Objek Data

Penelitian wilayah observasi 34 Provinsi di Indonesia dengan jangka waktu pengamatan penelitian selama 23 tahun.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Creswell (2014) menjelaskan bahwa variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seseorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Variabel-variabel bebas (*independent variables*) merupakan variabel-variabel yang (mungkin) menyebabkan, mempengaruhi, atau berefek pada

outcome, adapun variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah perkembangan pariwisata dan variabel kontrol. Penelitian terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel tidak terikat (*independent variable*) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel terikat (*dependent variabel*) model pertama dalam penelitian adalah pendapatan per kapita penduduk miskin untuk model 1 (Pov1) dan garis kemiskinan untuk model 2 (Pov2). Penggunaan dua model dengan dua variabel terikat tersebut bertujuan untuk melihat lebih dalam program kebijakan kemiskinan dengan dua jenis pendekatan pendapatan. Model pertama dengan pendapatan per kapita penduduk miskin sebagai variabel terikat dianalisis untuk melihat bagaimana perbaikan pendapatan dengan diimplementasikannya program penanggulangan kemiskinan; BPNT dan PKH. Model kedua dengan garis kemiskinan sebagai variabel terikat dianalisis untuk melihat bagaimana pengaruh program penanggulangan kemiskinan terhadap perbaikan standar kemiskinan di Indonesia. Perbaikan standar dapat membantu pemerintah dan organisasi dalam memahami seberapa besar masalah kemiskinan di wilayah tersebut dan merancang kebijakan atau untuk menguranginya. Pada model variabel bebas akan dibedakan menjadi 2 tipe variabel, yaitu *non threshold* variabel dan *Threshold Variabel*. Hansen (2000) menyatakan variabel *non- threshold* akan digunakan sebagai kontrol penting dalam sebuah persamaan, sedangkan variabel *threshold* berperan sebagai asumsi variabel yang tidak selalu bergerak linier tetapi memiliki titik terendah, menengah dan maksimal.
2. Variabel bebas (*independent variabel*) *non threshold* dalam penelitian adalah pertumbuhan ekonomi (G) atau persentase perubahan PDRB dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang menunjukkan seberapa cepat atau lambat ekonomi provinsi tersebut tumbuh, inflasi (INF) inflasi merujuk pada tingkat kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mengukur seberapa banyak harga-harga rata-rata meningkat dari waktu ke waktu dan merupakan indikator penting untuk kebijakan ekonomi. Variabel bebas *non threshold* lainnya adalah indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) Tujuan pengukuran IPKD untuk

mengetahui kualitas/tingkat pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing pemerintah daerah, yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. IPKD memotret proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan di daerah hingga proses pelaporan keuangan dan juga mengukur kualitas kerja tata kelola layanan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

3. Variabel bebas (*Independent variabel*) pertama dalam penelitian adalah BPNT. BPNT menyatakan persentase masyarakat yang mendapatkan BPNT Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). BPNT adalah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan, berupa persentase penerima BPNT pada 34 setiap provinsi. Variabel bebas *threshold* kedua adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah besaran jumlah rumah tangga yang masuk dalam program PKH.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Simbol	Formulasi	Sumber Data
1	Pendapatan Per kapita Penduduk Miskin	Pendapatan per kapita penduduk miskin adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam kelompok penduduk miskin di suatu wilayah. Variabel ini dihitung dengan membagi total pendapatan kelompok penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin dalam wilayah tersebut. Pendapatan per kapita berfungsi sebagai indikator kesejahteraan ekonomi bagi kelompok miskin dan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Jika rata-rata pendapatan per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan, individu tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. $\text{Rasio Kemiskinan} = \frac{\text{Total Pendapatan Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Pov1	Rasio (%)	Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id
2	Garis Kemiskinan	Laju garis kemiskinan adalah tingkat perubahan garis kemiskinan dari satu periode ke periode berikutnya, dinyatakan dalam persentase. Garis kemiskinan sendiri menggambarkan ambang batas minimum pendapatan atau pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, meliputi kebutuhan makanan dan non-makanan. Perubahan pada laju garis kemiskinan biasanya dipengaruhi oleh inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan perubahan kebijakan sosial-ekonomi. Laju	Pov2	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Variabel	Definisi Operasional	Simbol	Formulasi	Sumber Data
		ini digunakan untuk mengukur dinamika standar minimum hidup dalam konteks kemiskinan serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan. $\text{Laju Garis Kemiskinan} = \frac{GK \text{ Tahun } t - GK \text{ Tahun } t - 1}{GK \text{ Tahun } t - 1} \times 100\%$			
Non Threshold Variabel (Variabel Kontrol)					
3	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Berikut adalah cara perhitungan: $\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \left(\frac{PDRB_{t-1} - PDRB_t}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Pertumbuhan ekonomi menggunakan perhitungan laju tiap PDRB Lapangan usaha tiap 34 Provinsi. Persentase perubahan PDRB dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang menunjukkan seberapa cepat atau lambat ekonomi provinsi tersebut tumbuh.	G	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id
4	Inflasi	Variabel inflasi merujuk pada tingkat kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mengukur seberapa banyak harga-harga rata-rata meningkat dari waktu ke waktu dan merupakan indikator penting untuk kebijakan ekonomi. Inflasi juga adalah besarnya	INF	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Variabel	Definisi Operasional	Simbol	Formulasi	Sumber Data
		sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional. Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan, merupakan gabungan andil dari jenis barang/jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan. Inflasi menggunakan acuan perhitungan inflasi IHK dengan rumus: $Tingkat\ Inflasi = \left(\frac{IHK_1 - IHK_{0t}}{IHK_0} \right) \times 100\%$ Ukuran umum inflasi yang menghitung perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK sering digunakan untuk menentukan tingkat inflasi. Inflasi menggunakan perhitungan laju tiap inflasi umum tiap 34 Provinsi di Indonesia.			
5	Indeks pengelola keuangan daerah	IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan mediator untuk memiliki kualitas kerja tata kelola layanan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Cara perhitungan IPKD sebagai berikut: $IPKD\ Realisasi = \left(\frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \right) \times 100\%$ Tujuan pengukuran IPKD untuk mengetahui kualitas/tingkat pengelolaan keuangan daerah pada	IPKD	Rasio (%)	Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Variabel	Definisi Operasional	Simbol	Formulasi	Sumber Data
		masing-masing pemerintah daerah, yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut memotret proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan di daerah hingga proses pelaporan keuangan.			
Threshold Variabel					
6	Program Bantuan Pangan Non-Tunai	BPNT mencakup proporsi atau persentase individu atau keluarga di dalam suatu populasi yang menjadi peserta atau penerima manfaat dari program BPNT. Partisipasi yang tinggi dalam program ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar keluarga miskin dan rentan telah terjangkau oleh program bantuan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. memiliki bentuk berupa kartu elektronik yang diberikan kepada peserta program. Kartu ini berfungsi sebagai alat pembayaran untuk membeli bahan pangan di pedagang yang telah bekerja sama dengan program BPNT. Peserta program dapat menggunakan kartu ini untuk membeli bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPNT	Persentase (%)	Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id/publication/2005/03/02/6798bf19ae7b1e7fdc845304/data-dan-informasi-kemiskinan--buku-1dan-2-provinsi.html
7	Program keluarga Harapan	Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. PKH mencakup jumlah keluarga atau individu yang berpartisipasi dalam program PKH. PKH mencerminkan seberapa luasnya cakupan program ini terhadap keluarga miskin dan rentan di suatu wilayah.	KPM	Rasio (%)	Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/id/publication/2005/03/02/6798bf19ae7b1e7fdc845304/data-dan-informasi-kemiskinan--buku-1dan-2-provinsi.html

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Variabel	Definisi Operasional	Simbol	Formulasi	Sumber Data
		Rasio antara jumlah penerima PKH dengan uang yang dikeluarkan untuk PKH, kita membahas tentang seberapa efisien dan efektif dana yang diinvestasikan. Jumlah Penerima PKH: Rasio merujuk pada jumlah keluarga yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan. Data biasanya diperoleh dari daftar penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Anggaran untuk PKH merujuk pada total dana yang dianggarkan dan dibelanjakan oleh pemerintah untuk menjalankan Program Keluarga Harapan dalam periode tertentu. Dana PKH digunakan untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah penerima PKH dengan total uang yang dikeluarkan untuk program tersebut. Rumusnya adalah: $\text{Rasio PKH} = \frac{\text{Jumlah Penerima PKH}}{\text{Anggaran untuk PKH}} \times 100\%$ Rasio PKH memberikan gambaran tentang berapa banyak penerima yang diuntungkan untuk setiap unit uang yang dihabiskan. Dalam contoh di atas, rasio 0.0001 berarti setiap satu rupiah yang dikeluarkan pemerintah membantu 0.0001 penerima. Rasio PKH dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas program.			

Sumber: Penelitian, 2025

3.4 Model Statistik Penelitian

3.4.1 Uji Stasioner

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model regresi ambang batas. Regresi adalah studi bagaimana pengaruh satu variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui.

Pengujuan model selanjutnya didasarkan pada pengujian stasioner. Pengujian stationer merupakan langkah awal yang sangat penting dalam analisis data deret waktu (*time series*) karena sifat stasioneritas menentukan validitas model yang akan digunakan. Menurut Gujarati & Porter (2009), suatu deret waktu dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata, varians, dan kovariansnya tidak berubah sepanjang waktu. Ketidakstasioneran (*non-stationary*) dapat menyebabkan masalah *spurious regression*, yaitu menghasilkan hubungan yang tampak signifikan secara statistik padahal tidak memiliki makna ekonomis. Pengujian tersebut menjadi kunci untuk memastikan keandalan estimasi parameter dan interpretasi model. Pada model dengan *threshold effect*, stasioneritas penting karena perubahan rezim atau titik ambang (*threshold*) sering kali hanya valid bila data berada pada kondisi stasioner. Pengukuran stationeritas pada perbedaan perilaku deret waktu di bawah dan di atas ambang dapat diidentifikasi secara konsisten. Pengujian stasioner tidak hanya menjadi prosedur teknis awal tetapi juga bagian fundamental dalam mengembangkan model yang akurat dan dapat digunakan untuk peramalan maupun analisis kebijakan.

1. Uji *Stasionary*: Uji Akar Satuan (*Unit Root Test*)

Pada umumnya data ekonomi *time-series* seringkali tidak *stationary* pada level series. Kondisi *stationary* dapat dicapai dengan melakukan differensiasi satu kali atau lebih. Apabila data telah *stationary* pada level series maka data tersebut adalah *integrated of order zero* atau $I(0)$. Apabila data *stationary* pada *first difference* level maka data tersebut adalah *integrated of order one* $I(1)$. pengujian unit root dalam penelitian akan menggunakan *Augmented Dickey Fuller* (ADF) untuk menguji *stationary* masing-masing variabel. Pengujian pada masing-masing variabel dimulai dengan pengujian pada ordo level.

Jika data tidak *stationary* pada ordo level, maka dilakukan pengujian tingkat integrasi (*1st difference*) untuk melihat *stationary* data pada ordo tersebut. Hasil dari uji tersebut dibandingkan dengan *McKinnon Critical Value*. Data dikatakan *stationary* apabila *Test critical values* lebih besar dari *Augmented Dickey Fuller (ADF) test statistic* artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, begitupun sebaliknya. Hasil uji analisis dilakukan dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 5 persen. Hipotesis yang digunakan dalam uji *stationary* yaitu:

H_0 : $\rho = 1$, ada unit root atau data tidak *stationary*, sedangkan

H_a : $\rho < 1$, tidak ada unit root atau data *stationary*.

3.4.2 Pemodelan Kemiskinan dengan Regresi *Threshold Effect Model*

Berikut adalah fungsi model awal persamaan matematika ambang batas (*threshold*):

$$Pov_{it} = \alpha_1 + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \beta_4 k_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan berupa: (POV) Kemiskinan, (G) adalah pertumbuhan ekonomi, (INF) Inflasi adalah tingkatan inflasi, Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) adalah besaran efektivitas pengelolaan keuangan dan tata kelola dan k adalah variabel-variabel kebijakan yang akan dikategorikan dalam variabel ambang batas (*threshold*). Model di atas diasumsikan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan akan didasari dengan fungsi pengendalian dasar/kontrol dengan komponen variabel kontrol berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks pengelolaan keuangan daerah untuk mempengaruhi kemiskinan. Model ambang batas (*threshold*) akan menggunakan variabel yang berperan sebagai variabel kebijakan karena suatu kebijakan tidak selalu akan memberikan efek langsung ambang yang linier meningkatkan atau menurunkan bahkan konstan. Kebijakan memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada setiap tahunnya baik akan tidak berpengaruh, memiliki pengaruh yang minimal atau maksimal terhadap intervensi untuk kemiskinan.

Pemodelan dalam penelitian menggunakan metode ambang batas (*threshold regression*) yang diadopsi oleh Po dan Huang (2008) dan Chiu dan Weh (2016) menggambarkan bentuk sederhana dari regresi *non-linier* yang menampilkan

piecewise spesifikasi linier dan *switching rezim* yang terjadi ketika variabel yang diamati melintasi ambang batas diketahui. Model ambang batas dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dalam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya menekan kemiskinan. Hubungan kebijakan-kebijakan kemiskinan terhadap kemiskinan cenderung tidak konstan. Pemodelan dilakukan pada masing-masing negara dengan runtun waktu 23 tahun sepanjang 2000-2022 (*time series*) untuk mengidentifikasi 34 Provinsi dengan kategori kebijakan yang tidak berpengaruh signifikan tidak memiliki nilai ambang (tidak memiliki pengaruh) dan kategori kebijakan yang berpengaruh memiliki nilai ambang (memiliki pengaruh). Penelitian menggunakan dua variabel program penanggulangan kemiskinan sebagai variabel ambang batas (*threshold*) dan tiga variabel ekonomi makro sebagai variabel kontrol. Dengan menyatakan variabel ambang sebagai k_i untuk representasi dan nilai ambang sebagai c^* Model pertama modifikasi persamaan linier yang terbentuk sebagai berikut:

$$Pov_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(k_i \leq c_1^*) \dots \dots \dots (2. a)$$

$$Pov_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(c_1^* < k_i \leq c_2^*) \dots \dots \dots (2. b)$$

$$Pov_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(k_i > c_2^*) \dots \dots \dots (2. c)$$

Keterangan:

Pov1	=	Rasio Pendapatan Per Kapita Penduduk Miskin (POV 1) (%)
Pov2	=	Laju Garis Kemiskinan (%)
G	=	Pertumbuhan Ekonomi (%)
INF	=	Tingkat Inflasi (%)
IPKD	=	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (%)
α	=	Koefisien konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi dari masing-masing variabel C dan G
k_i	=	Nilai <i>Threshold</i> BPNT dan KPM
BPNT	=	Persentase Penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai (%)
KPM	=	Rasio Penerima Program Keluarga Harapan (KPM) (%)
c_1^*	=	Nilai <i>Threshold</i> ambang batas minimal
c_2^*	=	Nilai <i>Threshold</i> ambang batas optimal
ε_i	=	<i>error term</i>

Model matematis diatas merupakan fungsi linier menjadi non linier dengan (Pov) menjadi *logaritma natural* agar mendapatkan data yang stasioner dan memasukan *proxy* variabel kebijakan kemiskinan ke dalam model dengan menggunakan batas

ambang $f(k_i \leq c_1^*)$. Analisis model juga menguji variabel ekonomi makro sebagai variabel kontrol; G, INF, IPKD. G, INF, IPKD diuji bersama-sama variabel *threshold* Kemiskinan BPNT dan KPM untuk mendapatkan nilai signifikasi variabel *threshold* BPNT dan PKH terhadap kemiskinan (aspek pendapatan dan pengeluaran) dengan melihat residual persamaan dari BPNT dan KPM serta hasil F standar *Threshold*.

Penambahan variabel kontrol dalam model *threshold* diperlukan untuk menghindari bias estimasi dan memastikan bahwa pengaruh variabel *threshold* (BPNT dan KPM) terhadap tingkat kemiskinan (Y) tidak dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel utama penelitian. Variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi (G), inflasi (INF), dan Indeks Pembangunan Manusia Daerah (IPKD) dimasukkan sebagai variabel kontrol karena ketiganya secara teoritis dan empiris berpengaruh terhadap dinamika kemiskinan. Dengan memasukkan variabel kontrol tersebut, model *threshold* menjadi lebih robust dan mampu menangkap pengaruh murni dari BPNT dan KPM terhadap perubahan tingkat kemiskinan, sekaligus menjaga kestabilan dan validitas hasil estimasi.

Persamaan (2) adalah model dua rezim sederhana yang digambarkan oleh nilai variabel ambang batas. Model menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penjelas dan Kemiskinan diwakili oleh $\beta_l = (\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ ketika k_i (variabel ambang batas) kurang dari atau sama dengan nilai ambang batas c_1^* (rezim 1), tetapi dengan $\beta_2 = (\alpha_2, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8)$ ketika k_i lebih besar dari nilai ambang batas c_2^* (rezim 2). Persamaan (2) dapat diestimasi hanya setelah menolak hipotesis nol dari model linier. *Threshold* mengandung fungsi karakteristik data dan nilai ambang sebagai berikut:

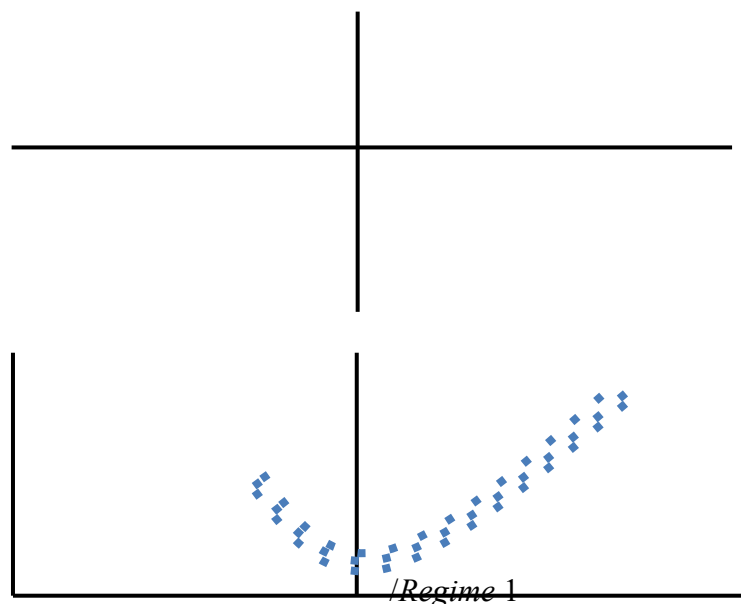
1. Fungsi karakteristik variabel yang memiliki nilai ambang bawah atau nilai masuk ke dalam *regime* 1 : $f(k_i \leq c_1^*) = \left\{ \begin{array}{l} \text{Nilai 1 ketika } k_i \leq c_1^* \\ \text{Nilai 0 ketika } k_i > c_1^* \end{array} \right\}$
2. Fungsi karakteristik variabel yang memiliki nilai ambang tengah atau nilai masuk ke dalam *regime* 2 : $f(k_i > c_2^*) = \left\{ \begin{array}{l} \text{Nilai 1 ketika } k_i > c_2^* \\ \text{Nilai 0 ketika } k_i < c_2^* \end{array} \right\}$

Fungsi karakteristik membagi data ke dalam suatu *range regime*, data-data tersebut yang ditandai c_1^* dan c_2^* bersifat fleksibel dapat berada pada ambang nilai titik minimal, titik ambang tengah dan titik optimal, secara ilustrasi digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 3.2 merupakan ilustrasi pertama di atas menunjukkan bagaimana regim terbagi, pada saat data memiliki titik ambang minimal/ c_1^* maka data cenderung menunjukkan nilai-nilai minimal pada variabel threshold yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam satu lingkup data masuk pada regime 1 menunjukkan nilai minimal yang didapatkan oleh variabel threshold mempengaruhi variabel terikat secara signifikan, sehingga menghasilkan nilai c_1^* .

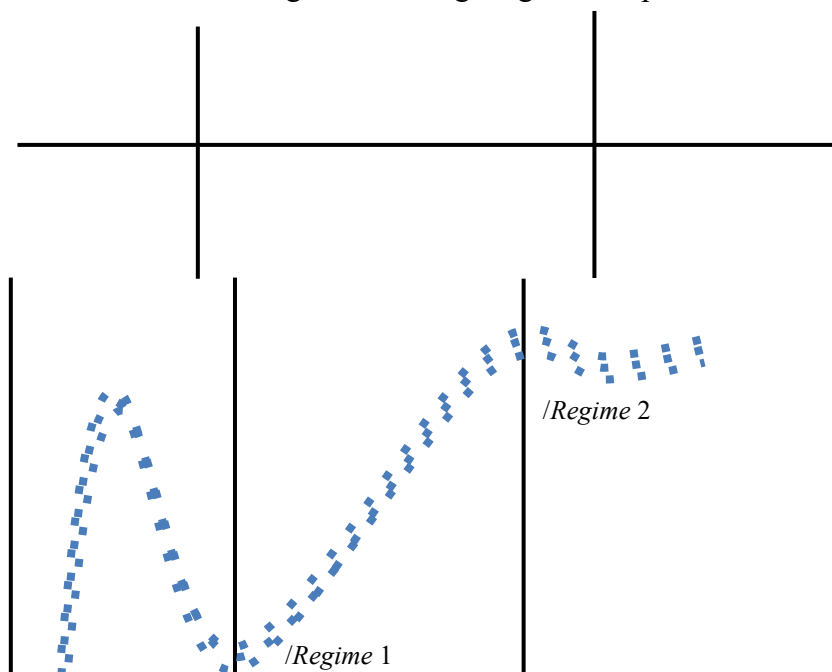
1. Ilustrasi nilai ambang titik minimal *threshold*:



Sumber: Tsay, Ruey. S dan Rong Chen, 2018, hal 44-49

Gambar 3.2. Nilai Ambang Titik Minimal Threshold

2. Ilustrasi nilai ambang titik ambang tengah dan optimal *threshold*:



Sumber: Tsay, Ruey. S dan Rong Chen, 2018, hal 44-49

Gambar 3.3. Nilai Ambang Titik Tengah dan Optimal *Threshold*

Ilustrasi kedua menunjukkan bagaimana *regim* terbagi kembali karena mendapatkan nilai ambang tengah dan nilai optimal. Pada saat data memiliki titik optimal/ c_2^* maka data cenderung membentuk ambang tengah dan menunjukan nilai-nilai optimal pada *variable threshold* yang mempengaruhi *variabel terikat*. Dalam satu lingkup data masuk pada *regime 2* menunjukkan nilai optimal yang membentuk ambang tengah didapatkan oleh *variable threshold* mempengaruhi *variabel terikat* secara signifikan, sehingga hal ini menghasilkan nilai c_2^* , dan nilai ambang tengah didapatkan.

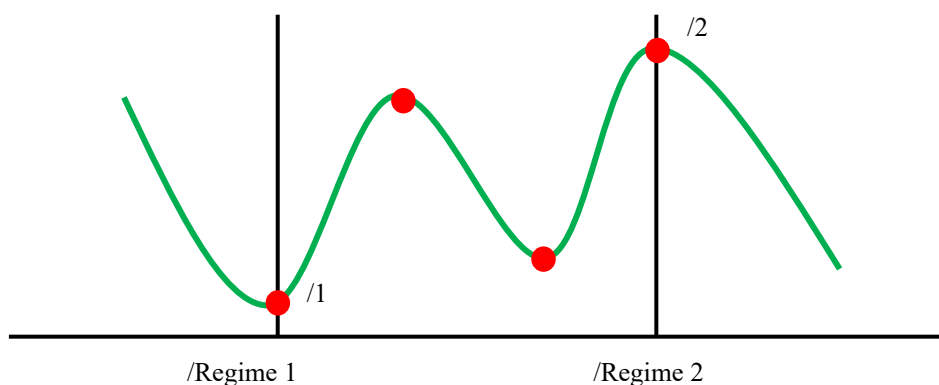
Pengujian *threshold* dilanjutkan dengan melihat F signifikansi yang menunjukkan, *regim 1* dan *regim 2* harus memenuhi syarat F yang signifikan, maka persamaan (2) dapat diestimasi hanya setelah menolak hipotesis nol dari model linier. Karena nilai ambang (c) tidak diketahui, uji-F tradisional tidak sesuai untuk menguji hipotesis nol. Oleh karena itu Tong dan Hansen (1978) dalam Chiu dan Yeh (2016) menyarankan untuk menggunakan tes dengan kekuatan mendekati optimal terhadap jarak alternatif dari hipotesis nol, yang berbentuk statistik F standar *Threshold* seperti berikut:

$$F = n \left(\frac{\tilde{\sigma}_n^2 - \sigma_n^2}{\hat{\sigma}_n^2} \right) \dots \dots \dots (3)$$

Pengujian nilai F digunakan untuk distribusi dan melihat *residual* dari setiap model variabel BPNT dan KPM terhadap pengaruh kemiskinan (Pov) pada setiap model persamaan. Rumus di atas dengan klasifikasi sebagai berikut $\tilde{\sigma}_n^2$ varian residual dari model linier dan $\hat{\sigma}_n^2$ varian residual dari persamaan untuk mengestimasi persamaan, perlu mengatur data dalam urutan menaik di k , dan setelah mempertimbangkan masalah derajat kebebasan. Maka model linier residual yang di dapatkan dari variabel BPNT dan KPM akan dibagi dengan f statistik untuk menjadikan persamaan kedalam non linier, dengan ruang sampel 70% sisanya yang dibatasi oleh nilai ambang batas $[c, c]$ dibagi menjadi n . hasil persamaan akan mendapatkan $\widehat{\sigma}(c_i)$ untuk setiap c , nilai ambang optimal c_1^* dapat ditentukan dengan memilih $\hat{\sigma}_n^2(c_i)$ terkecil dengan persamaan sebagai berikut:

$$c_1^* = \arg \min \hat{\sigma}^2(c_i), i = 1, \dots, n, \\ c_1^* \in [c, c] \dots \dots \dots (4)$$

dimana $\hat{\sigma}_n^2(c_i)$ adalah varian residual dari persamaan dengan nilai *threshold* optimal c_2^* . F-statistik secara keseluruhan ditandai dengan hasil signifikasi, signifikasi dibentuk pada setiap *regim*. Signifikasi F statistik ditandai dengan 0 vs 1* = menandakan *regim* 1 signifikan dan memiliki nilai ambang minimal $c_1^* = signifikan$, 1 vs 2* = menandakan *regim* 2 signifikan dan memiliki nilai ambang optimal dan membentuk nilai ambang tengah $c_2^* = signifikan$, secara ilustrasi ditandai oleh grafik berikut:



Sumber: Tsay, Ruey. S dan Rong Chen, 2018, hal 44-49

Gambar 3.4. Nilai Arg Min 1 dan Arg Max 2 Threshold

Ilustrasi di atas menggambarkan ilustrasi F-statistik, arg min 1 dan arg max 2 harus memenuhi syarat signifikasi F antar *regim*. *Regim* 0 merupakan model tanpa *regim* atau *regim threshold* tidak terbentuk data tidak signifikan, ketika data bergerak dari titik 0 menuju titik *regim* 1, *Threshold* mulai signifikan dan terbentuk maka F disimpulkan 0 vs 1* = c_1^* signifikan. Data ambang minimal signifikan selanjutnya bergerak dari titik *regim* 1 menunjuk titik *regim* 2 *threshold* mulai signifikan, maka F disimpulkan 1 vs 2* = c_2^* signifikan. Hal ini juga menyimpulkan secara bersama-sama variable *threshold* baik di *regim* 1 maupun 2 signifikan secara statistik (negara terspesialisasi grup 2).

Model *threshold* terbentuk perlahan dengan dasar linier menuju non linier dengan proses penurunan secara matematis. Persamaan *threshold* dimulai dari persamaan dasar linier, selanjutnya di turunkan menjadi *non-linier* model persamaan ambang minimal dan optimal maka pada persamaan turunan berikutnya mendapatkan nilai ambang tengah dengan ditemukannya nilai batas ambang minimal dan optimal. Persamaan akhir model kedua yang terbentuk secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

$$Pov1_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(BPNT \leq c_1^*) \dots \dots \dots (5. a)$$

$$Pov1_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(c_1^* < BPNT \leq c_2^*) \dots \dots \dots (5. b)$$

$$Pov1_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(BPNT > c_2^*) \dots \dots \dots (5. c)$$

$$Pov1_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(PKH \leq c_1^*) \dots \dots \dots (6. a)$$

$$Pov1_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(c_1^* < PKH \leq c_2^*) \dots \dots \dots (6. b)$$

$$Pov1_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(PKH > c_2^*) \dots \dots \dots (6. c)$$

$$Pov2_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(BPNT \leq c_1^*) \dots \dots \dots (7. a)$$

$$Pov2_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(c_1^* < BPNT \leq c_2^*) \dots \dots \dots (7. b)$$

$$Pov2_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(BPNT > c_2^*) \dots \dots \dots (7. c)$$

$$Pov2_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(PKH \leq c_1^*) \dots \dots \dots (8. a)$$

$$Pov2_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(c_1^* < PKH \leq c_2^*) \dots \dots \dots (8. b)$$

$$Pov2_i = (\alpha + \beta_1 G_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 IPKD_{it} + \varepsilon_i) * f(PKH > c_2^*) \dots \dots \dots (8. c)$$

Keterangan:

Pov1	=	Rasio Pendapatan Per Kapita Penduduk Miskin (POV 1) (%)
Pov2	=	Laju Garis Kemiskinan (%)
G	=	Pertumbuhan Ekonomi (%)
INF	=	Tingkat Inflasi (%)
IPKD	=	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (%)
α	=	Koefisien konstanta persamaan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi dari masing-masing variabel control G, INF dan IPKD
k_i	=	Nilai <i>Threshold</i> BPNT dan KPM
BPNT	=	Persentase Penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai (%)
KPM	=	Rasio Penerima Program keluarga Harapan (KPM) (%)
c_1^*	=	Nilai <i>Threshold</i> ambang batas minimal
c_2^*	=	Nilai <i>Threshold</i> ambang batas optimal
ε_i	=	<i>error term</i>

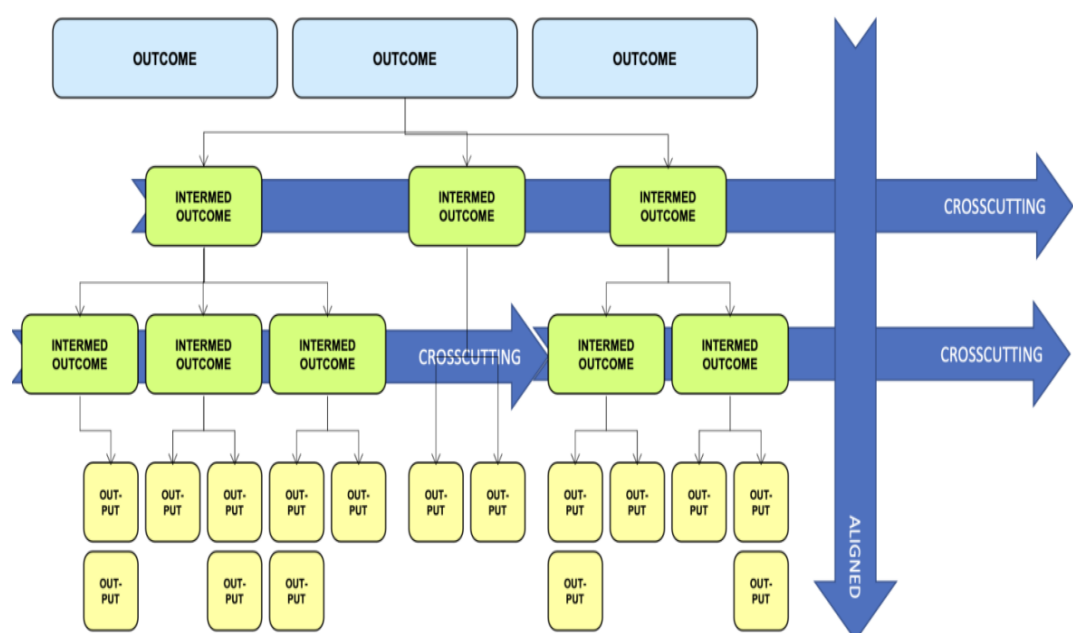
Persamaan (5) merupakan model matematis dasar untuk model ambang batas (*threshold*). Persamaan (6) dan (7) merupakan model matematis BPNT pada aspek pendapatan dan pengeluaran. Persamaan (8) dan (9) merupakan model matematis PKH (KPM) pada aspek pendapatan dan pengeluaran.

3.5 Rekomendasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pohon faktor kinerja Kinerja

3.5.1 Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (Pohon faktor kinerja Kinerja) Instansi Pemerintah Sebagai Strategi Dasar Usaha Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis nasional yang memerlukan pendekatan komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 membahas pohon faktor kinerja sebagai strategi dasar penanggulangan kemiskinan. Strategi ini berlandaskan pada penjenjangan kinerja yang menekankan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Daerah memiliki permasalahan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya sehingga strategi pengetasan harus dirancang untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut.

Pohon faktor kinerja digunakan untuk menggambarkan pola dan langkah program penanggulangan kemiskinan berdasarkan arahan Peraturan Kementerian. Pemilihan kesesuaian pohon faktor kinerja diselaraskan dengan kriteria masalah yang ada pada masing-masing Kuadran Pengaruh BPNT dan PKH. Penelitian menjadikan pohon faktor kinerja sebagai penjelasan logis antara output sehingga setiap program dan kegiatan pemerintah dapat diukur kontribusinya terhadap tujuan akhir. Pohon faktor kinerja dapat menjadi pilihan strategi yang bersifat lebih komprehensif, menyentuh akar masalah sesuai karakteristik wilayah, serta mendorong efektivitas dan efisiensi anggaran melalui sinergi lintas sektor dan lintas dinas. Pohon faktor kinerja tidak hanya memastikan program bantuan tepat sasaran, tetapi juga mengintegrasikan upaya pemberdayaan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi lokal agar hasilnya berkelanjutan. berikut adalah kerangka dasar pohon faktor kinerja penjenjangan kinerja:



Sumber: BPKP, PANRB No. 89, 2021

Gambar 3.5. Kerangka Dasar Pohon Faktor Kinerja Penjejangan Kinerja PANRB No. 89 Tahun 2021

Penjelasan Diagram Pohon faktor kinerja (PermenPANRB No. 89/2021)

1. *Outcome* (Kotak Biru Paling Atas)

Outcome adalah hasil akhir atau tujuan strategis dari suatu program. Konteks *outcome* pada pengetasan kemiskinan dapat berupa; menurunnya angka

kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkurangnya kesenjangan sosial dan meningkatnya kualitas sdm. Luaran menjadi arah besar dari seluruh kebijakan lintas dinas.

2. *Intermediate Outcome* (Kotak Hijau Muda di Tengah)

- a. *Intermediate outcome* merupakan **hasil antara** yang menghubungkan antara *output* dengan *outcome*.
- b. Fungsi utama dari *intermediate outcome* adalah menjadi *jembatan* dari hasil kegiatan (*output*) agar berdampak lebih luas dan memberikan kontribusi langsung ke *outcome*. Bentuk *intermediate outcome* pada strategi kemiskinan adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja, meningkatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, bertambahnya kesempatan kerja dan usaha produktif dan meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

3. *Output* (Kotak Kuning di Bagian Bawah)

- a. Output adalah hasil langsung dari program/kegiatan yang dapat diukur secara nyata.
- b. Output biasanya berbentuk barang/jasa publik yang dihasilkan oleh anggaran. Contoh output pada kemiskinan yaitu pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat miskin, pemberian modal usaha untuk masyarakat miskin serta pembangunan unit rumah layak huni. Output inilah yang nantinya diakumulasi menjadi *intermediate outcome*.

4. *Crosscutting* (Panah Biru Mendatar)

Lintas sektor/lintas dinas diartikan sebagai sinergi beberapa dinas pemerintahan yang saling mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Program harus terintegrasi antara dinas sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pertanian, perdagangan, hingga badan perencanaan ekonomi daerah. Contoh program dapat dilaksanakan oleh dinas sosial dengan dukungan dinas dinas ketenagakerjaan untuk pelaksanaan pelatihan kerja serta dukungan dinas koperasi dengan pemberian akses modal. *Crosscutting* menjadi sinkronisasi program antar dinas agar tidak tumpang tindih dan hasilnya lebih efektif.

5. *Aligned* (Panah Biru Vertikal ke Bawah)

Keselarasan kebijakan dari pusat hingga daerah dibuktikan dengan adanya program kementerian/lembaga dari pusat yang selaras dengan program provinsi serta disinergikan dengan kabupaten/kota. Sinergi ditujukan untuk pencapaian *outcome* nasional (penurunan kemiskinan) benar-benar tercapai hingga tingkat akar rumput. Contoh pelaksanaan sinergi pemerintah pusat sampai kabupaten terlihat pada penetapan target kemiskinan ekstrem 0% tahun 2024. Pemerintah provinsi melanjutkan target tersebut dengan menurunkan kemiskinan di bawah 10% selanjutnya pemerintah kabupaten menargetkan penurunan jumlah keluarga miskin melalui program spesifik di wilayah kabupaten.

Diagram pohon faktor kinerja menjadi penjenjangan kinerja yang menunjukkan alur logis terintegrasinya lintas dinas (*crosscutting*). Pohon faktor kinerja mengarahkan program menjadi lebih efektif dan efisien serta benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan. Implikasi dalam penanggulangan kemiskinan perlu kerjasama semua dinas dan sektor terhubung. Pengukuran kinerja perlu berbasis *output/outcome*, bukan sekadar membahas penyerapan anggaran.

Strategi penanggulangan kemiskinan dapat diterapkan pada wilayah *non threshold* dan wilayah yang memiliki *threshold*. Pelaksanaan *crosscutting* pada wilayah yang sudah efektif dapat dijadikan standar dasar strategi jangka panjang dalam menurunkan angka kemiskinan di 34 provinsi melalui penerapan pohon faktor kinerja. Seluruh dinas harus mampu secara efektif menyisihkan dan mengalokasikan anggaran untuk merancang maupun mengadopsi program pengetasan kemiskinan yang tercantum dalam pohon faktor kinerja. Setiap intervensi yang dilakukan tidak hanya selaras dengan penjenjangan kinerja tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian output dan outcome penurunan kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (KPM) memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap aspek pendapatan dan pengeluaran. Beberapa hasil temuan penelitian antara lain.

1. BPNT bersifat efektif dan berpengaruh signifikan pada aspek pendapatan pada 16 provinsi seperti Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara.
2. PKH bersifat efektif dan berpengaruh signifikan pada aspek pendapatan pada 10 provinsi seperti Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Papua Barat.
3. BPNT bersifat efektif dan berpengaruh signifikan pada aspek pengeluaran pada 6 provinsi seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau dan Sulawesi Selatan.
4. PKH bersifat efektif dan berpengaruh signifikan pada aspek pengeluaran pada 5 provinsi seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Jambi.
5. Terdapat perbedaan pengaruh BPNT dan PKH yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural ekonomi, dinamika politik dan kebijakan, kerentanan sosial dan geografis, serta heterogenitas respons rumah tangga. Kondisi kemiskinan memiliki karakter yang berbeda. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terbukti memiliki manfaat yang lebih luas dibandingkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan

oleh pemetaan kuadran dalam analisis threshold regression pada 34 provinsi. BPNT berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat miskin di 16 provinsi. Secara praktis, BPNT terasa di lebih banyak daerah karena bantuan pangan secara langsung memenuhi kebutuhan paling dasar, yaitu konsumsi makanan, sehingga meskipun tidak selalu meningkatkan pendapatan, BPNT mampu mencegah masyarakat miskin jatuh lebih dalam akibat kerentanan pangan. PKH hanya efektif di 11 provinsi dampaknya tidak selalu langsung terasa dan sangat bergantung pada kesiapan struktural wilayah, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Dengan demikian, BPNT lebih tepat diposisikan sebagai intervensi nasional yang cepat dan merata untuk perlindungan dasar, sementara PKH berfungsi sebagai instrumen jangka menengah dan panjang yang memerlukan fondasi struktural minimum agar memberikan dampak optimal terhadap pengentasan kemiskinan.

6. BPNT dan PKH sama-sama bisa meningkatkan pengeluaran rumah tangga miskin di beberapa provinsi, tetapi cara kerjanya berbeda. BPNT adalah bantuan dalam bentuk pangan (*in-kind/in natura*) sehingga mendorong naiknya pengeluaran dan konsumsi makanan karena voucher hanya bisa dipakai untuk kebutuhan primer. PKH adalah bantuan tunai bersyarat, sehingga uang yang diterima bisa dibagi untuk makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain; garis anggaran naik lebih merata di semua jenis barang, sehingga pengeluaran non-pangan juga meningkat. Karena itu, BPNT lebih kuat sebagai pelindung konsumsi pangan, sedangkan PKH lebih kuat memperluas keseluruhan pola pengeluaran dan peluang investasi rumah tangga, dan kombinasi keduanya di provinsi yang responsif membuat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan menjadi lebih lengkap.

5.2 Pengembangan Penelitian Masa Depan

Pengembangan penelitian lebih lanjut di masa depan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program BPNT dan PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Salah satu area penting yang perlu diperhatikan adalah pengembangan model analisis yang lebih mendalam dengan memperhitungkan variabel-variabel yang lebih kompleks, seperti ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi, dampak dari pemekaran wilayah, serta dinamika perubahan sosial

yang terjadi pasca-pandemi. Penggunaan indikator yang lebih holistik, seperti kualitas infrastruktur, tingkat urbanisasi, dan aksesibilitas pendidikan, akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Penelitian masa depan juga dapat memperluas ruang lingkup dengan mengkaji interaksi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah, serta peran pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah. Evaluasi dampak jangka panjang dari program BPNT dan PKH, dengan mempertimbangkan efek *multiplier* terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pengurangan ketimpangan, juga merupakan arah yang sangat relevan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Integrasi antara data sektoral dan makroekonomi, serta kerangka kerja yang berbasis pada prinsip kolaborasi antar sektor, akan menjadi landasan bagi pengembangan program menanggulangi kemiskinan yang lebih efektif di masa depan.

Penelitian yang komprehensif selanjutnya diperlukan juga untuk memperluas analisis dengan memasukkan variabel struktural seperti kualitas pendidikan, akses kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar, sekaligus mengkaji perancangan program tambahan di luar BPNT dan PKH melalui kebijakan lintas sektor (*crosscutting*) pemerintah daerah yang secara spesifik menyasar wilayah dengan kategori Kemiskinan moderat, wilayah dengan kategori ketimpangan pendapatan tinggi, wilayah dengan kategori kemiskinan multidimensi dan wilayah dengan kemiskinan struktural.

5.3 Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah saran dan rekomendasi kebijakan dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas program BPNT dan PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

1. Bantuan BPNT sudah mampu memberi pengaruh terhadap pendapatan masyarakat miskin tetapi dampaknya masih terbatas dan lebih banyak dirasakan oleh kelompok miskin yang relatif lebih ringan kondisinya. Pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan bantuan ke kelompok yang

lebih rentan atau sangat miskin agar manfaatnya lebih merata. Distribusi BPNT ke kelompok masyarakat miskin dengan kondisi yang lebih ringan juga perlu diperkuat sehingga dampaknya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat miskin. Program BPNT dan PKH harus lebih fleksibel dan adaptif dengan menggunakan data *real time* untuk menyesuaikan target penerima dan memperbaiki mekanisme distribusi bantuan. Kedua, untuk memaksimalkan dampak jangka panjang, program penanggulangan kemiskinan harus disertai dengan program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih terintegrasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah.

2. Tingginya biaya hidup di wilayah tertentu juga membuat pengaruh bantuan terasa lebih kecil terhadap pendapatan per kapita. PKH dapat disertai dengan diversifikasi program pengentasan kemiskinan. Program tersebut memprioritaskan pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, serta akses pendidikan yang lebih baik, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Pelatihan keterampilan dan pengembangan kewirausahaan selayaknya membantu masyarakat miskin menciptakan sumber penghasilannya sendiri untuk mengkompensasi biaya hidup tinggi.
3. Koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, penting untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien dan pengawasan yang lebih baik terhadap implementasi program. Sinergi antara BPNT/PKH dan program pembangunan ekonomi lokal, seperti pengembangan UMKM atau sektor industri lokal, dapat mendorong keberlanjutan dan efektivitas program jangka panjang.
4. Kebijakan kemiskinan yang mengacu pada karakteristik wilayah sangatlah penting. Wilayah non-threshold dalam penelitian ini memiliki empat karakteristik utama yang menuntut kebijakan penanggulangan kemiskinan yang spesifik dan lintas sektor. Wilayah dengan tingkat kemiskinan struktural tinggi, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat, memerlukan kebijakan

penguatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli. Wilayah yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan tradisional, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, seluruh Kalimantan, dan Sulawesi Utara, membutuhkan intervensi peningkatan produktivitas, nilai tukar petani, hilirisasi komoditas, dan perlindungan pekerja tani.

Wilayah perkotaan dengan kemiskinan relatif tinggi akibat tekanan biaya hidup dan keterbatasan pekerjaan formal, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, dan Kepulauan Riau, memerlukan penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan penguatan UMKM. Sementara itu, wilayah kepulauan dan daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan publik, seperti Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, harus diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Seluruh kebijakan tersebut perlu dijalankan pemerintah daerah secara crosscutting dengan identifikasi wilayah yang kuat dan kebijakan tambahan di luar BPNT dan PKH agar pengentasan kemiskinan bersifat struktural dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). Dasar- dasar kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta.
- Ailiyah, N. (2023). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo. 131–141.
- Akerlof, G. A. (1970). *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. [Harvard Link](#)
- Albers, Henry, (1969). Principles of Management, A Modern Approach, Wiley International: New York.
- Aliya Gul, (2013) An Estimation Of Per Capita Food Consumption and Related Poverty In Faqirabad Area (Peshawar City). European Scientific Journal December 2013 /SPECIAL/ edition vol.2 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. *EconoSains*, X, 158–169.
- Anderson and Jan Isaksen, (2002), Best Practice in Capacity Building in Public Finance Management in Afrika, International Swedish Institut for Public Administration and Michelen Institut Development Studies and Human Right ([http: www.cmi.no](http://www.cmi.no))
- Anderson, D. M. (2009). The Effects of Poverty on the Susceptibility to Crime in South Africa. *Internasional Journal of Economic*, 1(1), 1–12
- Anis Ochi, Yosra Said, Mohamed Ali Labidi, (2023), Nonlinear Threshold Effect of Governance Quality on Poverty Reduction in South Asia and Sub-Saharan Africa: a Dynamic Panel Threshold Speciation. *Journal of the Knowledge Economy* <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01271-3>
- Anisya. (2013). "Aplikasi Sistem Database Sistem Informasi Geografis (PHP – MySQL)." *Jurnal Momentum*, 15(2), 49–58. UIN SUSKA REPOSITORY.
- Annisa, A. (2020). Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

- Ardella Wahyu Luthvia, Triyono, Noer Sasongko,(2023), Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening. *Journal of Economics and Business UBS* e-ISSN: 2774-7042 p-ISSN: 2302-8025 Vol. 12 No. 3 Mei-Juni 2023
- Ariansyah, D., Sagita, M., & Julia, R. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. 2(May).
- Arsyad, Lincoln, (1992). Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia : Suatu Pengantar, JEBI No. 1 Tahun VII Fakultas Ekonomi UGM: Yogyakarta.
- Asmara, A., & Cahaya, S. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 41-53.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 (Vol. 53).
- Bambang Indra Rukmana, Fitriah Permata Citra, (2022) Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Sosial. *Nusantara Journal of Economics* Vol. 04 No. 01 Mei 2022, pp. 10 - 18.
- Banerjee, A., dkk. (2024). The Impacts Of In-Kind Food Transfers Versus Electronic Vouchers On Poverty Reduction In Indonesia. *J PAL Working Paper*
- Bappenas. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barro, R dan Sala-i-Martin, X. (1992). *Convergence. Journal of Political Economy*, Vol. 100, No.2: 223-251,<http://doi.org/10.1086/261816>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1990). Economic Growth and Convergence Across the United States (No. 3419). Cambridge. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w3419>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1991). *Convergence across States and Regions*.
- Barro, R. J., Mankiw, N. G., & Sala-i-Martin, X. (1995). *Capital Mobility in*
- Barro, Robert J & Xavier Sala-i-Martin. (2004). *“Economic Growth 3 rd ed”*. *Journal of Economic*. Cambridge.
- Bintarto, R. (1989). Interaksi desa-kota dan permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R. (1989). Interaksi desa-kota dan permasalahannya. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Blackmore, Ken. and Edwin Griggs. (2007). “Social Policy an Introduction”. New

York : McGraw-Hill.

Boediono. (1998). *Ekonomi Moneter*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.

Bolarinwa, S.T. and Simatele, M. (2022), “Informality and poverty in Africa: which comes first? A paper awaiting publication in sustainable development”, Online First, 2022.

Brookings Papers on Economic Activity, 22(1), 107–182.

Budi Winarno dalam James Anderson, (1979) *Public Policy Making*, (Second ed, New York : Holt, Rinehart and Winston)

Budi Winarno dari James P.Lester dan Joseph Stewart., (2000). *Public Policy:an Evolutionary Approach*, (second edition, Australia : Wadsworth)

Budi Winarno dari James P.Lester dan Joseph Stewart., 2000. *Public Policy:an Evolutionary Approach*, (second edition, Australia : Wadsworth)

Budi, Winarno, (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Medpress

Clements, K. W., & Si, J. W. (2017). Engel’s law, diet diversity, and the quality of food consumption. *American Journal of Agricultural Economics*, 100(1), 1–22. <https://doi.org/10.1093/ajae/aax053>.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (2020). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Research Policy*, 49(4), 104103.

Coibion, O. (2019). *Monetary Policy Communications And Their Effects On Household Inflation Expectations*. National Bureau Of Economic Research.

Cristian, F Sepuldeva and Vazques. (2011). The Consequences of Fiscal Desentralization on Poverty and Income Quality. *Journal Government and Policy* Vol. 29 Page 321-343.

Crook, R.C., (2003). Decentralisation and poverty reduction in Africa: the politics of local–central relations. *Public Adm. Dev.* 23, 77–88.

D’Agostino, G., Pieroni, L., & Scarlato, M. 2020. Social Transfers And Income Inequality in OECD Countries: Further Evidence Of The Relationship Between Social Transfers And Income Inequality in OECD Countries. *Structural Change and Economic Dynamics*, 52, 313–327. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.11.004>

Deacon, Alan. (2002). “Perspectives on Welfare”. Buckingham: Open University Press.

Deaton, A., & Drèze, J. (2010). Nutrition, Poverty and Calorie Fundamentalism: Response to Utsa Patnaik. *Economic & Political Weekly*, 45(14), 78–80.

- Di Nitto, Diana M. (2003). "Social Welfare Politics and Public Policy". USA : Allyn and Bacon.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2018). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. University of Chicago Press
- Doglas Norton, Anastasia Alexaxi. et all, (2003), *Evaluating Capacity Development*, ISNAR (international service for National Agricultural research, Netherland [http: www.isnar.cgiar.org](http://www.isnar.cgiar.org).
- Downs, Anthony, (1957), "An Economic Theory of Political Action in a Democracy." *Journal of Political Economy*, Vol. 65, No. 2 (Apr. 1957): pp. 135-150.
- Draf Ringkasan- Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia) per 25 Agustus 2005 oleh Sri Mulyani Indrawati/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Dapat diakses di internet
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik* (Cet.10). Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dwiandana, Arya Putri, 2013. Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Bebandem. *E-Jurnal EP Unud*, 2 (4).
- Dyer, J. H., & Dyer, W. G. (2020). *The innovative leader: How to inspire your team to achieve remarkable results*. Harvard Business Press
- Eade, D., (1997), *Capacity Building: An Approach To People Centered Development*" Oxford UK, Oxfam GB.
- Fardian, M. I. (2024). The impact of Rastra–BPNT Assistance On Household Food Expenditure Patterns And Poverty Status In Indonesia. *INFEB Journal*, 6(1), 28–37
- Firstiani, R., & Egamawati, S. E. (2021). Analisis Efisiensi Program Bantuan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan: Parametrik Stochastic Frontier Analysis. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 96–116.
<https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/41%0Ahttps://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/download/41/48>
- Francesca Grasseti, (2018), Poverty trap, boom and bust periods and growth. A nonlinear model for non-developed and developing countries. *Decisions in Economics and Finance* <https://doi.org/10.1007/s10203-018-0211-6>.
- Fung, A. (2004). *Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy*. Princeton: Princeton University Press.

- George C. Galster, (2018), Nonlinear and Threshold Effects Related to Neighborhood: Implications for Planning and Policy. Journal of Planning Literature 1-17^a The Author(s) 2018 Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/0885412218793693 journals.sagepub.com/home/jpl
- Gistut, (1994). Sistem Informasi Geografis. Gramedia Pustaka Utama.
- Grindle, MS., (editor), (1997), Getting Good Governance: Capacity Building in The Public Sector of Developing Countries, Boston MA, Harvard Institute for International Development
- Handriani, L. A. Y., & Arka, S. (2021). Dampak BPNT Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Dan Pola Konsumsi Rumah Tangga Penerima BPNT, Kecamatan Mengwi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 10(10), 839. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i10.p02>.
- Hansen, B. E. (2000). "Sample Splitting and Threshold Estimation." *Econometrica*, 68(3), 575-603.
- Haughton, Jonathan, and Shahidur R. Khandker. (2012). Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Hedstrom, Peter & Stern, Charlotta, (2008). "Rational Choice and Sociology". *Journal the New Palgrave Dictionary of Economics*. (Second Edition,).
- Henry, Nicholas. (1995). *Public Administration and Public Affairs*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International, Inc dalam Putra Hidayat. 2011. Etika Dalam Kajian Kebijakan Publik. <http://putrahidayat.blogspot.co.id>. <http://kfm.depsos.go.id>. Program Penanggulangan Kemiskinan: Pusat Data dan Informasi Kemiskinan Departemen Sosial RI. <http://tkpkri.org>. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan/SNPK. Diakses tanggal 15 Desember 2016. <http://doi.org/10.2307/2534639>
- Huber, J. (1997). *Rational Choice Models in Sociology*. The American Sociologist, Vol. 28 (2), pp. 42-53.
- Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
- Ismanto, IGN, (1995). Kemiskinan di Indonesia dan Program IDT, Centre For Strategic and International Studies : Jakarta.
- Jamrozik, Adam. (2001). "Social Policy in The Post-Welfare State : Australians on The Threshold of The 21st Century. Australia : Longman.
- Johnson, D (1994). Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johson, P (1986). Contemporary Sociological Theory An-Integrated Multi- Level Approach. New York: Springer.

- Jones, G. R., & George, J. M. (2021). *Contemporary management*. McGraw-Hill Education
- Jung, S., Cho, S.-H., & Roberts, R. K. (2009). Public Expenditure and Poverty Reduction in the Southern United States. Selected Paper prepared for presentation at the Southern Agricultural Economics Association, 2(1), 1–12.
- Jütting, J.P., Kauffmann, C., McDonnell, I., Osterrieder, H., Pinaud, N., Wegner, L., (2004). Decentralization and Poverty in Developing Countries: Exploring the Impact. SSRN Electron. J.
- Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak Dan Efektivitas Program Bantuan Sosial. 6(3), 3580–3592.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian PANRB; 31 Desember 2021.
- Kementerian Sosial RI. (2013). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (P K H). Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. <https://pkh.kemensos.go.id/>.
- Kharisma, B., Hasanah, A., Soemitro Remi, S. & Zakia, I. (2021). “The pattern of poor household food consumption: The case of West Java Province”. *Economía Agraria y Recursos Naturales*, 21(2), 07-27. <https://doi.org/10.7201/earn.2021.02.01>
- Kogut, B., & Zander, U. (2018). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. *Organization Science*, 29(1), 46-62.
- Kremer, S., Bick, A., & Nautz, D. (2013). Inflation and growth: New evidence from a dynamic panel threshold analysis. *Empirical Economics*, 44(2), 861–878.
- Krugman, P., (2018). The General of Theory Employment, Interest, and Money. In: *The General Theory*. s.l.:s.n., p. 27.
- Lailan Safina Hasibuan, (2016). Analisis Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Simalungun. *Journal Ekonomikawan , ilmu ekonomi dan studi pembangunan*, Vol 16, No 1 (2016) .
- Laksani, Chichi Shintia. (2010). Analisis Pro-Poor Growth di Indonesia melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. *Jurnal Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. lib.ui.ac.id/file?file=digital/131336-T%2027617.
- Lantu, Y.S.M., Koleangan, R.A.M., Rotinsulu, T.O (2017). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*, 19 (2) 2, 1-19.

<https://doi.org/10.35794/jpekd.15785.19.2.2017>

- Laporan Kinerja BPKP Tahun (2021), "Pohon faktor kinerja", dokumen penerapan manajemen kinerja dan pencapaian outcome sebagai hasil pemantauan BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Republik Indonesia.
- Levitan, S. A., Mangum, G. L., Mangum, S. L., & Sum, A. M. (2003). *Programs in Aid of the Poor*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Liang, Zhicheng (2006) : Threshold estimation on the globalization-poverty nexus: Evidence from China, WIDER Research Paper, No. 2006/57, ISBN 9291908274, The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki.
- Maizunati, N. A. (2017). Pengaruh Dimensi Sosial Dan Lingkungan Terhadap Tingkat Konsumsi Pangan Pada Penduduk Miskin Perkotaan Di Jawa Tengah (The Effect of Social and Environmental Dimensions on The Level of Food Consumption in Urban Poverty in Central Java). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 227–248. <https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.532>
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mansbridge, Jane (1980). *Beyond Adversary Democracy*. New York, NY: Basic Books
- March, James, G. (ed), (1965), *Hand Book Of Organizations*, rand McNally College Publishing Company, Chicago, USA.
- Marhaeni, AA IN, KT Sudibia, IGAP Wirathi, Surya Dewi R. 2013. *Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Martorano, B., & Sanfilippo, M. (2012). Innovative features in conditional cash transfers: an impact evaluation of chile solidario on households and children. *Journal of International Development*, 1030–1041.
- Maskovsky, J. (2001). Afterword: Beyond the privatist consensus. In J. Goode, & J. Maskovsky (Eds.), *The New Poverty Studies*. New York: New York University Press.
- Midgley, J. (2012). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. In *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. <https://doi.org/10.4135/9781446221839>
- Miftahuddin 2011. Analisa Karakteristik Rumah Tangga Miskin Dengan Metode Regresi Terbaik. *Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi*. Vol. 7, No.2, 79-91, Januari 2011.
- Mishkin, Frederic S. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Edisi 8. Salemba Empat : Jakarta.

- Mitchell Stewart, Aileen, (1998). *Empowering People, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, (2013). *“Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi”* Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Bukhori Dalimunthe, (2022), The Relationship Between Economic Growth And Poverty Inindonesia. *Journal of Social Sciences* Vol. V, no. 3 (2022), pp. 33 - 38 Fascicle Social Science ISSN 2587-3490 Topic Sociology eISSN 2587-3504.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Gerald Duckworthand Co.
- Narayanan and Raghu Nath, (1993), *Organization Theory*, Irwin , Boston, USA.
- Nasikun. (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Nasution, A., Krisnamurthi, B., & Rachmina, D. (2020). Analisis Permintaan Pangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bogor. *Forum Agribisnis*, 10(1), 1–10.
- Nazara, Suahasil (2007), *Warta Demografi: Pengentasan Kemiskinan: Pilihan Kebijakan dan Program yang Realistis*, Depok: Gemilang Grafika, , hal. 34 *Neoclassical Models of Growth*. *The American Economic Review*, 85(1),
- Nissanke, M., and E. Thorbecke (2005). ‘Channels and Policy Debate in the Globalization-Inequality-Poverty Nexus’. WIDER Discussing Paper No. 2005/08. Helsinki: UNU-WIDER.
- North, D. C. (2018). *Understanding the Process of Economic Change*. Princeton University Press.
- Nugroho D., R. (2008). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurma Mustika., Nugraha, Nurhadji., Mustikarini, Indriyana Dwi. (2019). “Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 108-116 Avaliable online at: <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship> Print ISSN: 2302-433X Online ISSN: 2579-5740.
- Nursiah Chalid, & Yusbar Yusuf. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12.
- Nursini, N., Tawakkal, T., (2019). Poverty alleviation in the contex of fiscal decentralization in Indonesia. *Econ. Sociol.* 12, 270–285.
- O'Connor, A. (2001). *Poverty Knowledge*. Princeton: Princeton University Press.

- Olken, Benjamin A. (2006). "Corruption and the Costs of Redistribution: Micro Evidence from Indonesia." *Journal of Public Economics*, 90 (4-5): 853-870
- Omari, L. V., Muturi, W., (2016). The Effect of Government Sectoral Expenditure on Poverty Level in Kenya. *J. Econ. Sustain. Dev.* 7, 220–242.
- Osabohien, R., Matthew, O., Ohalet, P., & Osabohien, E. (2020). Population–poverty–inequality nexus and social protection. *Social Indicators Research*, 575–598.
- Permendagri, "19 tahun (2020), Pengukuran Indeks Pengelolaan 22 Keuangan Daerah"
- Pocut Eliza, (2016). Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Buku kajian Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2016.
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. 2019. Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 87-100.
- Puspa, Dwi Hambarsari. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Hal* 257-282. Vol. 1. No. 2, September 2016.
- Putri, N. V. W., Munir, A., & Anam, S. (2021). Students' perceptions of teacher feedback in EFL English class and their self-regulated learning after receiving feedback. *Journal on English as a Foreign Language*, 11(1), 42–60.
- Qisti Marhamah Nasution, Akhmad Yusuf Khoiruddin, Slamet Haryono, (2023), The Effect of Islamic Financial Inclusion, Urbanization, Inflation, and GDP on Poverty in Indonesia. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2023) 89-103 Published by Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga e-ISSN 2963-9182.
- Quigley, W. P. (2003). *Ending Poverty As We Know It*. Philadelphia: Temple University Press.
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan NonTunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rahmawati, H. (2022). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi (JEMI)*, 31 (2), 77 – 82. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.745>.
- Raines, S. (2019). The role of middle management in public organizations:

Strategies for success. *Public Administration Review*.

- Rakhmat, F. F. (2019). Dinamika Implementasi Program menanggulangi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*.
- Reveiu, A., & Dardala, M. (2011). "Visualisasi Data Menggunakan Sistem Informasi Geografis untuk Potensi Bank Sampah di Surabaya." *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 2(1), 40-49. RESEARCHGATE
- Rezqyana Ayu Pertiwi, Raden Rara Aulia Qonita, Joko Sutrisno. (2019). "The Effectiveness of Rice for the Prosperous Population Program and Non-Cash Food Assistance (Case Study in Sikayu Village, Buayan SubDistrict, Kebumen District)." *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* 34(2): 140–49. <https://jurnal.uns.ac.id/carakatani/article/view/27346>.
- Ridha, M. R. (2024). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non-Tunai terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pertanian di Maluku Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non-Tunai terhadap Pengeluaran*. 24(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.02>
- Ritzer, George (2012). *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Roidah, I. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 12(14), 39-47.
- Rukmana, Bambang Indra & Citra, Fitriah Permata. (2022). "Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial" *Nusantara Journal of Economics* Vol. 04 No. 01 Mei 2022.
- Sachs, J. D. (2015). *Economic Possibilities for Our Time*.
- Sadono, Sukirno. (1994). *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sari, Ainun Oktavia., Sulistiyowati, Rahayu., Prihantika, Ika. (2020). "Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCT)" *AdministrativA | Vol 2 Nomor 3 Tahun 2020*.
- Sarman, Mukhtar & Sajogyo, (2000). "Masalah Penanggulangan Kemiskinan".Puspa Swara, Jakarta.
- Sayema Haque Bidisha, Tanveer Mahmood, Md. Biplob Hossain, (2021), *Assessing Food Poverty, Vulnerability and Food Consumption Inequality in the Context of COVID-19: A Case of Bangladesh*. *Social Indicators Research* (2021) 155:187–210 <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02596-1>

- Scott, W. R. (2019). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. SAGE Publications.
- Setiadi, Elly M. & Usma Kolip.(2011). *Pengantar Sosiologi; pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Shanping Wang,(2022), Nonlinear influence of construction land on poverty reduction efficiency in Chinese poor counties: new evidence using a panel threshold model. *Environment, Development and Sustainability* (2024) 26:3557–3587, <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02848-9>.
- Sher, J. P. (1977). *School Based Community Development Corporations: A New Strategy for Education and Development in Rural America*. In J. P. Sher (Ed.), *Education in Rural America* (pp. 291-346). Boulder: Westview.
- Sindzingre, A. (2005). ‘Explaining Threshold Effects of Globalization on Poverty: An Institutional Perspective’. WIDER Research Paper No. 2005/53. Helsinki: UNUWIDER.
- Skoufias, E., & Di Maro, V. (2008). Conditional cash transfers, adult work incentives, and poverty. *The Journal of Development Studies*, 935-960.
- Sofaa, W. A. (2024). From Rastra to BPNT: An empirical quantitative evaluation of food assistance reform in Indonesia. *Economic and Financial Indonesia*, 69(2).
- Sohail Jehangir Malik, Hina Nazli and Edward Whitney (2015), Food Consumption Patterns and Implications for Poverty Reduction in Pakistan. *The Pakistan Development Review* , Winter 2015, Vol. 54, No. 4, Papers and Proceedings: PARTS I and II The 30th Annual General Meeting and Conference of the Pakistan Society of Development Economists Islamabad, December 2 - 4, 2014 (Winter 2015), pp. 651-669
- Stiglitz, J. E. (1989). *Markets, Market Failures, and Development*. *The American Economic Review*, 79(2), 197–203. [JSTOR Link](#)
- Suharto Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Alfabeta.
- Suharto, Edi., & Thamrin, Djuni. (2012). “Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa” *Aspirasi* Vol. 3 No. 1, Juni 2012.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. (2003). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. (2010). *Makro Ekonomi*, Teori Pengantar. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman,(2022), Relationship Between Economic Growth, Income Inequality

- And Poverty By Provinces In Indonesia: Panel Data Regression Approach. International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences ISSN 2720-9644 (print); ISSN 2721-0871 (online) <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss>.
- Suryahadi, Asep dan Sumarto. (2001). “Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia.” Smeru Newsletter, No.03, Mei – Juni.2001.
- Suryanta, (2019), Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Depok. Jurnal Cakrawala, Volume 2 Nomor 2 November Tahun 2019.
- Suseno dan Siti Astiyah. (2009) .Inflasi.Jakarta:Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi kebijakan publik (cet. 1). Yogyakarta: Lukman. tentang Kesejahteraan Sosial. Suluh media.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT.Bumi Aksara, Jakarta .
- Tarigan, Robinson. (2010). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi* , Bumi Aksara, jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2018). Program Bantuan pemerintah untuk individu, keluarga, dan kelompok tidak mampu menuju bantuan sosial terintegrasi. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. 13th Edition. Pearson Education.
- Todaro, P Michael (1977), dalam terjemahan, *Economics Development In The Third World*, Longman Limited, New York,
- Todaro, P Michael (1997), dalam terjemahan, *Economics Development In The Third World*, Longman Limited, New York,
- Tri Widodo Wu, (2004), *Decentralization and Capacity Building in Indonesia Local Administration: case studi of Bandung ity Government*, Department International Cooperative Graduate School of International Development, Nagoya University
- Triest, Robert K. (2009). *The Economics of Subsidies for Community Development: A Primer*. Diunduh dari <https://www.bostonfed.org/-/media/...subsidy/10-triest.pdf>. Pada tanggal 15 Januari 2015.
- Triyanto, Suseno Widodo. (1990). *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: KANISIUS.
- UNDP, (1999), *Empowering People. A guide to Participation*, <http://www.>

undp.org

- Verberi, C., & Yaşar, S. 2021. The Effects of Social Spending on Income Inequality in 30 OECD Countries. *Istanbul Journal of Economics / İstanbul İktisat Dergisi*, 71(1), 39–57. <https://doi.org/10.26650/istjecon2021-808121>.
- Wahab Solichin Abdul. (2004). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Abdul (2002). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang UMM Press
- Wahab, S. A. (2005). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementaskebijaksanaan negara (Ed.2, cet.). Jakarta ; Bumi Aksara.
- Waity, J. F. (2019). Geographic variation in barriers to the usage of food assistance in Indiana. *Journal of Hunger & Environmental Nutrition*, 14(4), 511– 525. <https://doi.org/10.1080/19320248.2018.1434100>
- Waluyo, B., & Khoirunurrofik (2021). Hubungan program keluarga harapan (PKH) dengan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal dan non tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4) 361-373.
- Wayne Parsons (2005), *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, hal. 467. 16.
- Wirawan, I (2014). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wisnubroto, Kristantyo. (2021). Program Keluarga Harapan (PKH) 2021, Berikut Syarat dan Ketentuan Penerimaannya. *Indonesia.go.id*, didownload tanggal 20 juni 2024. Diakses dari <https://www.indonesia.go.id/kategori/keuangan/2320/program-keluarga-harapan-pkh2021-berikut-syarat-dan-ketentuan-penerimaannya>.
- World Bank. (2006). *Making the New Indonesia Work for The Poor*. USA: The World Bank.
- World Bank. (2025). June 2025 Update to Global Poverty Lines, di download pada 15 September 2025 pada pukul 12.02. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/05/june-2025-update-to-global-poverty-lines>
- Yuliani, E. (2024). The effects of the Indonesian conditional cash transfer on structural transformation. *World Development*.
- Yunus, R., & Radjab, M. (2018). Analisis Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=pjedDwAAQBAJ>

- Yuriswanto Adam, Ahmad Mahyani. (2018). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 14 Nomor 27 Februari
- Zastrow, Charles. (2010). "Social Work and Social Welfare". Canada: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Zhenshan Yang, (2019), Threshold Effect of Poverty Alleviation Funds on Human Capital Accumulation: A Case Study of Impoverished Counties in China. *Sustainability* 2019, 11, 809; doi:10.3390/su11030809.
- Zhou, A. C., & Hendriks, S. L. (2017). Does Food Assistance Improve Recipients' Dietary Diversity and Food Quality in Mozambique? *Agrekon*, 56(3), 248–262. <https://doi.org/10.1080/03031853.2017.1360783>.